



Laporan Tahunan PPSDM POM.

2022



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Tahunan Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM Tahun 2021. Laporan ini merupakan laporan tahunan kedua Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja sebagai sektor publik yang mengemban tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan tahunan ini menyajikan informasi terkait kegiatan-kegiatan Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM berdasarkan tugas dan fungsinya dan target yang ditetapkan pada tahun 2020, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi. Akhir kata, kepada seluruh lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja sama dengan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dan kepada seluruh jajaran pegawai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan kami ucapkan terima kasih atas hasil-hasil capaian oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan selama tahun 2021. Kami berharap Laporan Tahunan ini dapat memberi kontribusi yang positif sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 15 April 2022
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI INSTITUSI	1
B. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI UNIT KERJA	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI	4
C.1. KEGIATAN UTAMA	5
C.2. KEGIATAN PRIORITAS PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	6
BAB II	8
A. LINGKUNGAN INTERNAL	8
A.1. SARANA DAN PRASARANA.....	8
A.2. DATA KEPEGAWAIAN.....	9
A.3. ANGGARAN	11
BAB III	17
A. MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	19
A.1. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.....	20
A.2. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Teknis.....	29
A.3. Ujian Dinas (UD)/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)/Alih Jenjang.....	40
A.4. Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 41	
A.5. Manajemen Mutu/Akreditasi Pusat pengembangan SDM POM.....	43
A.6. Peningkatan dan Penguatan Organisasi dan Tata Laksana PPSDM POM.....	44
A.7. Review Dokumen Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.....	47
B. Jumlah SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang Tersertifikasi Sesuai Standar	50
B.1. Sertifikasi SDM Pengawas Obat dan Makanan.....	51
B.2. Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi.....	57
B.3. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri di UPT Badan POM	60



B.4.	Menyusun SKKNI terkait Obat dan produk Biologi, Obat Tradisional, Produk Komplemen dan Kosmetika	64
B.5.	Sosialisasi dan Menjaring Minat Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif dari K/L maupun Pemerintah Daerah.	69
B.6.	Mengembangkan Jurnal terakreditasi “Eruditio: <i>Indonesia Journal of Food and Drug Safety</i> ”	71
B.7.	Mengembangkan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI) 73	
B.8.	Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	76
B.9.	Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior	84
C.	TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TERKAIT MANAJEMEN PERUBAHAN SESUAI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BADAN POM 2020 – 2024.....	95
C.1.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.....	95
D.	MENINGKATNYA SDM BADAN POM YANG DIKEMBANGKAN KOMPETENSINYA	96
D.1.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM. 96	
D.2.	Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti	121
E.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM	121
E.1.	Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	121
E.2.	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.....	122
F.	TERLAKSANANYA RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TERKAIT MANAJEMEN PERUBAHAN SESUAI ROAD MAP.....	122
F.1.	Road Map Reformasi Birokrasi	125
F.2.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	126
F.3.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.....	128
G.	TERWUJUDNYA ORGANISASI PPSDM POM YANG EFEKTIF	134
G.1.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.....	134
G.2.	Nilai AKIP PPSDM POM	139
H.	TERSEDIANYA SDM PPSDM POM YANG BERKINERJA OPTIMAL.....	141
H.1.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	141
I.	TERBANGUNNYA SISTEM OPERASIONAL TERMASUK TIK PPSDM POM TERINTEGRASI DAN ADAPTIF.....	142
I.1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang Optimal	142



J.	TERKELOLANYA KEUANGAN PPSDM POM SECARA AKUNTABEL.....	142
J.1.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.....	142
J.2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM	144
K.	SURVEI INDEKS KEPUASAN PELANGGAN DAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	145
K.1.	Profil Responden Survei.....	145
K.2.	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan	147
K.3.	Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi	148
L.	AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT.....	149
M.	SISTEM MANAJEMEN MUTU (QMS)	151
BAB IV	153
A.	KESIMPULAN.....	153
A.1.	KESIMPULAN UMUM	153
A.2.	KENDALA.....	155
B.	SARAN	157



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM.....	5
Gambar 2. Data Pegawai PPSDM POM Tahun 2021.....	10
Gambar 3. Data Pegawai PPSDM POM Berdasarkan Gender	10
Gambar 4. Data Pendidikan Pegawai PPSDM POM.....	11
Gambar 5. Kegiatan Penilaian Kompetensi Daring dan Luring TA 2021.....	23
Gambar 6. Coaching Clinic dan Feedback Hasil Penilaian Kompetensi TA 2021	27
Gambar 7. Keterlibatan Asesor Eksternal Dalam Penilaian Kompetensi.....	28
Gambar 8. Sertifikat Akreditasi atas Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi	28
Gambar 9. Halaman Depan psikotes.pom.go.id.....	29
Gambar 10. Kegiatan Uji Kompetensi TA 2021.....	38
Gambar 11. Kegiatan Pembahasan Perubahan Kamus Kompetensi	39
Gambar 12. Bimtek Asesor Kompetensi UPT dan Refreshment Asesor Kompetensi	40
Gambar 13. Sosialisasi Pelaksanaan UDUPKP TA 2021	41
Gambar 14. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Soal SKB Tahun 2021.....	43
Gambar 15. Proses Produksi Video <i>E-learning</i>	50
Gambar 16. Penyerahan sertifikat LSP Badan POM oleh Kepala BNSP kepada Kepala Badan POM	52
Gambar 17. Sertifikasi Kompetensi Batch 1 Tahun 2021	56
Gambar 18. Sertifikasi Kompetensi Batch 2 Tahun 2021	56
Gambar 19. Sertifikasi Kompetensi Batch 3 Tahun 2021	56
Gambar 20. Sertifikasi Kompetensi Batch 4 Tahun 2021	57
Gambar 21. Sebaran Asesor Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi(TUK)	58
Gambar 22. Pelatihan Asesor Kompetensi LSP BPOM Batch - 2 di Denpasar	59
Gambar 23. Pelatihan Asesor Kompetensi LSP BPOM <i>Batch</i> 1 di Jakarta	59
Gambar 24. Sosialisasi Pengembangan TUK.....	60
Gambar 25. Verifikasi TUK tahun 2021.....	62
Gambar 26. Finalisasi Tahap lanjut Penyusunan SKKNI Bidang Pengawasan Mutu Obat dan produk Biologi oleh Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program pelatihan Kementerian Tenaga kerja	65
Gambar 27. Pembahasan Roadmap Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.....	66



Gambar 28. Bimtek Penyusunan Standard Kompetensi Teknis Kerja	67
Gambar 29. Dokumentasi Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Kerja.....	67
Gambar 30. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Menjaring Minat Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif dari K/L maupun Pemerintah Daerah	70
Gambar 31. Open Journal System (OJS) Jurnal Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety	71
Gambar 32. Sampul Jurnal Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety Vol. 1 No. 1 Edisi Desember 2020 dan Vol. 1 No. 2 Edisi Juni 2021	72
Gambar 33. Sosialisasi Pedoman KTI, Jurnal Eruditio dan <i>Bridging Competency: Citation, Reference Production dan Plagiarisme</i> dalam Jurnal	73
Gambar 34. Penyampaian Pengantar tentang Organisasi PFMI oleh Kepala PPSDM POM	75
Gambar 35. Pembukaan Sosialisasi Organisasi Profesi PFMI oleh Sekretaris Utama BPOM	75
Gambar 36. Paparan tentang Organisasi PFMI oleh Ketua PFMI	76
Gambar 37. Kegiatan Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai Pusat	78
Gambar 38. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan PFM.....	79
Gambar 39. Hasil SIT Pengembangan Aplikasi Penilaian Angka Kredit	80
Gambar 40. Kegiatan Focus Group Discussion	81
Gambar 41. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanggal 15 November 2021 : Balai Besar POM di Medan	82
Gambar 42. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanggal 18 Oktober 2021, Balai Besar POM di Padang....	82
Gambar 43. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanggal 08 November 2021, Balai Besar POM di Makassar	82
Gambar 44. Kegiatan Bimtek Tanggal 24 Desember 2021, Loka POM Tangerang.....	83
Gambar 45. Kegiatan Bimtek Tanggal 15 Desember 2021, Balai Besar POM di Denpasar	83
Gambar 46. Kegiatan Bimtek Tanggal 07 Desember 2021, Balai Besar POM di Bandung	83
Gambar 47. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Bets 1 di Kota Bekasi	86
Gambar 48. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Batch- 3 di Kota Surabaya	87
Gambar 49. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Batch 2 di Kota Bandung.....	87
Gambar 50. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Batch- 4 di Kota Medan	88
Gambar 51. Kegiatan Pelatihan DFI Junior Batch-1 di Kota Bekasi	91
Gambar 52. Kegiatan Pelatihan DFI Batch- 2 di Kota Bandung	92
Gambar 53. Kegiatan Pelatihan DFI Junior Batch- 3 di Kota Surabaya.....	93
Gambar 54. Kegiatan Pelatihan DFI Junior Batch- 4 di Kota Medan	94



Gambar 55. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Melalui Pendidikan Lanjutan Selama Tahun 2021	96
Gambar 56. Foto kegiatan Pemberian Materi dan Diskusi dalam Kegiatan Pelatihan SDP 2021 ..	100
Gambar 57. Foto kegiatan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Secara Daring	101
Gambar 58. Foto kegiatan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Secara Luring	102
Gambar 59. Dokumentasi Kegiatan selama Pelatihan TNA 2021.....	103
Gambar 60. Kegiatan Pelatihan Pembentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil tahun 2021	107
Gambar 61. Kegiatan Pelatihan Auditor Internal Tahun 2021	108
Gambar 62. Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I	109
Gambar 63. Kegiatan pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Tingkat kesulitan II tahun 2021	110
Gambar 64. Kegiatan Pelatihan Infografis selama tahun 2021	111
Gambar 65. Kegiatan Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat.....	116
Gambar 66. Kegiatan Pelatihan Penangan Kasus di Bidang Obat dan Makanan tahun 2021	117
Gambar 67. Kegiatan Group Coaching Proses Refleksi dan Awal Pengembangan Diri PPNS dan Calon PPNS BPOM	119
Gambar 68. Subsite Reformasi Birokrasi BPOM tahun 2021.....	126
Gambar 69. Subsite e-monevrb.pom.go.id	126
Gambar 70. Kegiatan Presentasi 5 Tim Agen Perubahan Terbaik BPOM 2021	128
Gambar 71. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Agile Agent 2021.....	129
Gambar 72. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Agen Perubahan 2021	129
Gambar 73. Hasil Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi dan Indeks Budaya Organisasi BPOM tahun 2021.....	132
Gambar 74. Penandatanganan Pakta Integritas Semua Tim PPSDM tahun 2021.....	135
Gambar 75. Kegiatan Penggalangan Komitmen, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021	138
Gambar 76. Responden Survei menurut Unit Kerja Tahun 2021	145
Gambar 77. Responden Survei Menurut Pendidikan tahun 2021.....	146
Gambar 78. Responden Survei Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	146
Gambar 79. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan ..	150
Gambar 80. Kegiatan Study Tiru Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan ke BPSDM Jabar.....	150





PPSDM POM
Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

**EDUCATE
ENGAGE
EMPOWER**



Gambar 81. Sertifikat ISO 9001:2015 PPSDM POM 152



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Anggaran PPSDM POM di Tahun 2021.....	13
Tabel 2. Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural TA 2021	20
Tabel 3. Capaian Kompetensi Manajerial Sosial Kultural Kelompok Jabatan Struktural, Fungsional dan Seluruh Pegawai Tahun 2021	24
Tabel 4. Capaian Kompetensi Manajerial Sosial Kultural per Level Standar Jabatan.....	25
Tabel 5. Persentase SDM BPOM yang Memenuhi Standar Kompetensi.....	26
Tabel 6. Kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis Tahun Anggaran 2021.....	30
Tabel 7. Verifikasi TUK tahun 2021.....	61
Tabel 8. Rancangan Peta Okupasi Pengawasan Obat dalam Kerangka Kualifikasi.....	68
Tabel 9. Jumlah Profesi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI) tahun 2021..	74
Tabel 10. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tingkat Pertama Tahun 2021.....	84
Tabel 11. Kegiatan District Food Inspector Junior tahun 2021	88
Tabel 12. Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS selama Tahun 2021	97
Tabel 13. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Tahun 2021	101
Tabel 14. Kegiatan Pelatihan Training Need Analysis (TNA) tahun 2021	102
Tabel 15. Kegiatan Pelatihan Fungsional non PFM Selama Tahun 2021.....	104
Tabel 16. Kegiatan Pelatihan Fungsional PFM Selama Tahun 2021	106
Tabel 17. Kegiatan pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tingkat Kesulitan I	109
Tabel 18. Kegiatan pelatihan Infografis Selama Tahun 2021	111
Tabel 19. Kegiatan Pelatihan Public Speaking dan Komunikasi efektif Selama Tahun 2021.....	112
Tabel 20. Kegiatan ToT PKP dan DFI selama tahun 2021	113
Tabel 21. Kegiatan Pelatihan Pemeriksaan sarana Distribusi Tingkat Kesulitan II selama tahun 2021	114
Tabel 22. Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi Tahun 2021.....	120
Tabel 23. Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Tingkat Dasar tahun 2021.....	120
Tabel 24. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.....	122
Tabel 25. Kegiatan tentang Core Value ASN BerAKHLAK tahun 2021.....	131
Tabel 26. Nilai SAKIP PPSDM TA 2020 tahun 2021.....	139
Tabel 27. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) PPSDM tahun 2021.....	143





PPSDM POM
Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

**EDUCATE
ENGAGE
EMPOWER**



Tabel 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPSDM tahun 2021	143
Tabel 29. Survei Kepuasan Pelanggan PPSDM tahun 2021	147
Tabel 30. Hasil Survei Anti Korupsi PPSDM Tahun 2021	148





PPSDM POM
Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

**EDUCATE
ENGAGE
EMPOWER**



DAFTAR LAMPIRAN



HIGHLIGHT KEGIATAN PPSDM POM 2021

7 Januari 2021



Pisah Sambut Kepala PPSDM POM

Pada tanggal 7 Januari 2021, Ibu Kepala Badan POM melantik 27 orang pejabat struktural di lingkungan Badan POM. Salah satu di antaranya adalah Jabatan Kepala PPSDM POM. Bapak I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM diamanahi untuk memimpin PPSDM POM melanjutkan kepemimpinan Ibu Syamsidar Thamrin, ST, MBA yang telah menjabat sebagai Kepala PPSDM POM sejak 2019.

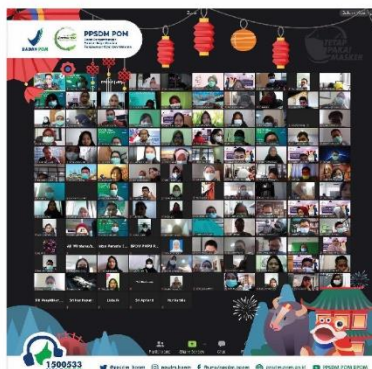
26 Januari 2021



Penyerahan Sertifikat Lisensi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi oleh BNSP

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat menyerahkan sertifikat lisensi kepada Badan POM, sebagai Lembaga Penyelenggara Sertifikasi kompetensi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Penyerahan dilaksanakan bersamaan dengan Audiensi yang dilakukan oleh PPSDM POM selaku unit pengelola LSP Badan POM pada tanggal 26 Januari 2021.

5 Februari 2021



Pemetaan Kompetensi CPNS Badan POM

Penilaian kompetensi merupakan sarana untuk memetakan kompetensi pegawai dalam rangka Manajemen Talenta. Penilaian ini juga menjadi salah satu tools untuk menentukan jalur karier. Sosialisasi ini merupakan pengantar bagi para peserta yang akan mengikuti penilaian kompetensi secara daring melalui aplikasi SiPenaTemanku dan Psikotes Online.

9 Februari 2021



Konsultasi Publik tentang PerBPOM untuk Pelatihan Pengawas Keamanan

Pada kegiatan ini, PPSDM POM melaksanakan Konsultasi Publik terkait rancangan PerBPOM bersama lembaga pemerintahan dan lembaga swasta yang nantinya akan menyelenggarakan pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.

22 Februari 2021



Studi Tiru Widyaiswara (WI) PPSDM POM ke LAN

Untuk meningkatkan kapasitas WI dan calon WI di Badan POM, PPSDM POM melakukan kegiatan studi tiru terkait Jabatan Fungsional WI dengan LAN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional WI. Melalui kegiatan ini, diharapkan WI dan calon WI di Badan POM menjadi lebih siap dengan tantangan yang ada dalam mendukung kegiatan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Badan POM.

Sepanjang Tahun 2021



Sharing & Discussion on Monday (SDM) di Aplikasi IDEAS PPSDM POM

SDM adalah kegiatan berbagi pengetahuan dan diskusi dengan tema menarik baik dalam bidang pengawasan obat dan makanan, maupun bidang lain yang berkaitan dengan dunia kerja. Kegiatan yang rutin diadakan setiap hari Senin, menghadirkan narasumber dari internal dan eksternal Badan POM. Peserta SDM yang mengikuti secara otomatis mendapatkan JP dan Sertifikat kegiatan.

23 - 26 Februari 2021



Pelatihan *Training of Trainer (ToT) District Food Inspector (DFI)*

PPSDM POM telah menyelenggarakan Training of Trainers District Food Inspector (DFI), pada tanggal 23 s.d 26 Februari 2021. Pelatihan diikuti oleh 30 peserta dari Badan Pelatihan Kesehatan Provinsi, instansi terkait, dan unit kerja di lingkungan Badan POM. Pelatihan DFI ini bertujuan untuk mempersiapkan para peserta untuk menjadi pelatih atau trainer dalam pelatihan District Food Inspector (DFI).

12 Maret 2021



Sosialisasi Penyusunan Soal SKB CPNS dan Seleksi Kompetensi Bidang Teknis PPPK

PPSDM POM menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Soal SKB CPNS dan Seleksi Kompetensi Bidang Teknis PPPK untuk Jabatan Fungsional dengan mengundang Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, **Bpk. Mohammad Ridwan, ST., M.Eng.** Diharapkan soal-soal SKB yang disusun dapat menjangkau Sobat Pandai baru yang turut menjunjung tinggi budaya kerja Badan POM.

15 - 18 Maret 2021



Pelatihan dan Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Batch 1

Pada hari Senin, 15 Maret 2021, telah dibuka pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Batch 1. Pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama ini diselenggarakan secara klasikal mulai 15 s.d. 18 Maret 2021, di Hotel Aston Bekasi.

22 Maret 2021



Pencanangan dan Pengembangan LSP Badan POM

Sebagai langkah awal beroperasinya LSP Badan POM, Bapak Kunjung Masehat selaku Ketua BNSP akan menyerahkan Sertifikat Lisensi kepada Kepala Badan POM yaitu Ibu Penny K. Lukito. Kegiatan ini diadakan di hotel Aryaduta Jakarta Pusat sekaligus pembukaan Pelatihan Asesor Kompetensi Batch 1 yang diselenggarakan tanggal 22-26 Maret 2021.

22, 23, dan 26 April 2021



Bimbingan Teknis Penyusunan *Tools* Simulasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Kegiatan ini diikuti oleh para Asesor Badan POM beserta tenaga asesor pembantu dari Kemendesa PDTT, BMKG, Lemhannas, Bapeten, Kanreg VII BKN, Pemprov Kepri, Pemkot Batam, Pemkab Pematang Jaya, dan Pemkab Sidoarjo. Kegiatan diselenggarakan secara daring pada tanggal 22, 23, dan 26 April 2021.

3 dan 4 Mei 2021



Leadership Dialogue bersama Kepala Badan POM

Kegiatan ini diisi langsung oleh Kepala Badan POM, Ibu Penny K Lukito. Peserta kegiatan merupakan Pimpinan Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM berkesempatan mendengar pengalaman karir dan berdialog terkait kepemimpinan dengan Kepala Badan POM secara langsung. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan lahirnya generasi-generasi pemimpin hebat yang memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya membangun negeri.

16 - 17 Juni 2021



Pelatihan Coaching untuk Pegawai

PPSDM POM telah melaksanakan Pelatihan Coaching untuk pegawai di PPSDM POM, Biro Umum, dan Biro SDM selaku unit kerja yang berperan dalam proses pengembangan kinerja dan kompetensi pegawai di Badan POM. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan para coach sehingga dapat menciptakan SDM yang mampu bekerja dengan baik serta memiliki motivasi dari dalam diri dan mampu mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki.

26 Juli 2021



Penyusunan SKKNI Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Kegiatan Penyusunan SKKNI ini dihadiri langsung oleh Ibu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. SKKNI merupakan pondasi dari Sistem Manajemen dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini.

30 Agustus 2021



Diskusi Pengembangan LSP BPOM dan Perangkat Sertifikasi PKP dan DFI

Pertemuan daring ini dihadiri oleh Komisioner Bidang Sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), LSP BPSDM PUPR, LSP Polri dan LSP Pertanian. Hal-hal yang dibahas yaitu: (1) Tata kelola LSP masing-masing Kementerian/Lembaga; (2) Mekanisme biaya sertifikasi; (3) Target dan mekanisme sertifikasi.

15 September 2021



Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Dasar

Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara PPSDM POM dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tujuannya adalah untuk mendukung komitmen Badan POM untuk mewujudkan SDM yang kompeten sesuai dengan agenda pembangunan tahun 2020-2024 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui penyusunan karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengawasan farmasi dan makanan.

16 September 2021



Penggalian Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penggalangan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PPSDM POM, meningkatkan wawasan dan perolehan kiat-kiat terkait Pembangunan Zona Integritas serta Penguatan Pelayanan Publik, sehingga pegawai PPSDM POM dapat menyiapkan dan mengimplementasikan dengan baik dalam rangka menuju WBK / WBBM.

16 September 2021



Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Badan POM yang dalam hal ini diwakili oleh PPSDM POM menerima sertifikat Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi. Sebelumnya pada tanggal 15 September 2021, secara daring BKN mengumumkan hasil penilaian kelayakan 24 Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi.

23 September 2021



Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) di Pusbang ASN, Ciawi

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala PPSDM POM, Kepala Pusbang Kepegawaian ASN, Koordinator Pelaksanaan Latsar CPNS Pusbang BKN dan 70 CPNS BPOM yang terdiri dari 40 peserta latsar Gol. 3 dan 30 peserta latsar Gol. 2. Pelaksanaan latsar CPNS Badan POM di Pusbang ASN, Ciawi telah dilakukan selama beberapa tahun belakangan. Semoga kerjasama antara PPSDM POM dengan Pusbang ASN Ciawi dapat terus terjalin dengan baik.

12 Oktober 2021



Penandatanganan MoU antara PPSDM POM dan UJIPEDIA

Kerjasama LSP Badan POM x UJIPEDIA adalah bentuk peningkatan perangkat sertifikasi dalam rangka pengembangan LSP Badan POM. Selain penandatanganan MoU kedua pihak, pada tanggal 12 Oktober 2021 juga diadakan Bimbingan Teknis Sistem Sertifikasi Kompetensi LSP Badan POM batch 2. Agenda ini diikuti secara luring oleh 15 asesor pusat, dan secara daring diikuti oleh seluruh asesor LSP Badan POM di Indonesia.

1 November 2021



Bimtek Penyusunan Dupak untuk JF Asesor SDM Aparatur

PPSDM POM menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK untuk JF Asesor SDM Aparatur. Bimbingan tersebut diberikan oleh Bu Alivia dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, BKN. Selain asesor internal Badan POM, turut hadir rekan-rekan asesor dari Instansi Pemerintah lainnya yang selama ini bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya asesor Badan POM.

15 Desember 2021



Studi Tiru Manajemen dan Operasional LSP MSDM Baliasean Int.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan LSP MSDM Baliasean Int', Manajer sertifikasi LSP Badan POM, Asesor LSP Badan POM, Admin LSP Badan POM dan tenaga IT Support. Diskusi awal membahas mengenai pengelolaan LSP MSDM Baliasean Int' oleh manajer sertifikasi LSP MSDM Baliasean Int', Bapak Freedy. Dilanjutkan dengan paparan proses sertifikasi dan history pengajuan Asesmen Jarak Jauh dari LSP pada BNSP.

27 Desember 2021



Diskusi Hasil Evaluasi Permenpan RB No. 38 Th. 2017 dengan Kemenpan RB, IASA, dan Asesor SDM Aparatur pada Beberapa Instansi

Hasil dari diskusi ini adalah tambahan masukan asesor dari IASA dan berbagai Instansi terhadap Standar Kompetensi Jabatan ASN. Harapannya, seluruh masukan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan standar kompetensi dan meningkatkan kualitas ASN seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan Smart ASN

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI INSTITUSI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selanjutnya menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM membentuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) dalam rangka mendukung visi dan misi BPOM dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM, terutama dalam memperkuat pengembangan dan pembinaan kompetensi SDM BPOM.

Kedudukan:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Tugas Pokok:

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan.



Fungsi PPSDM POM:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan
2. Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan.
4. Pelaksanaan administrasi pusat dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI UNIT KERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia berpedoman pada visi dan misi Badan POM, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024, dimana di dalam Bab II memuat dan menjelaskan Visi dan Misi Badan POM:

Visi Badan POM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong



Misi Badan POM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

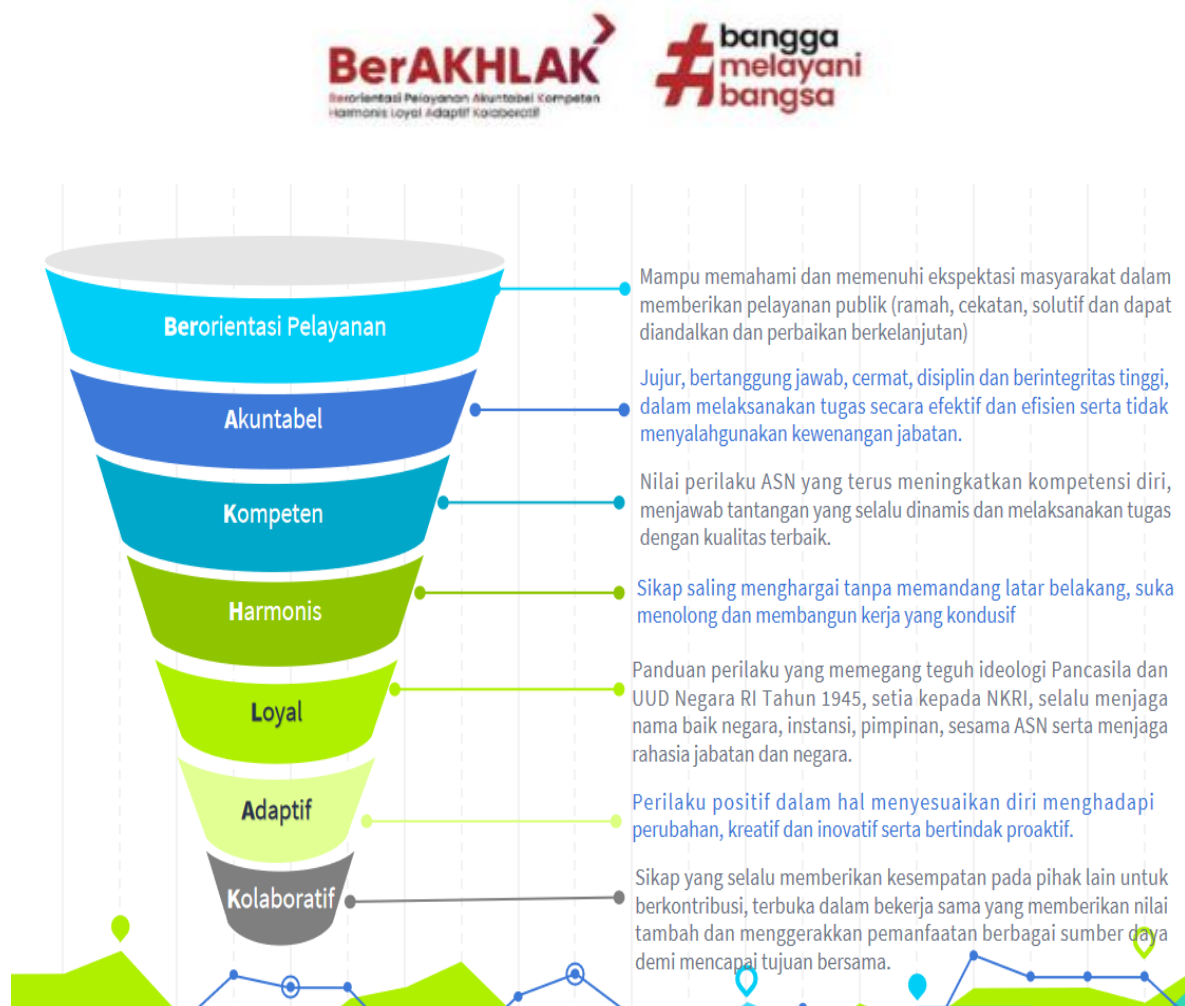
BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya. Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi di lingkungan Badan POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

P	Profesional Meegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi
I	Integritas Konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
K	Kredibilitas Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
K	Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik
I	Inovatif Mampu melakukan pembaruan sesuai imu pengetahuan dan teknologi terkini
R	Responsif / Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah



Amanah Presiden Joko Widodo tentang lahirnya core value Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dalam lingkungan Badan POM, yaitu BerAKHLAK dan employer branding ASN Badan POM yang “Bangga Melayani Bangsa.” Transformasi ASN yang lincah dan inovatif sebagai daya ungkit memberi pelayanan prima pada masyarakat.



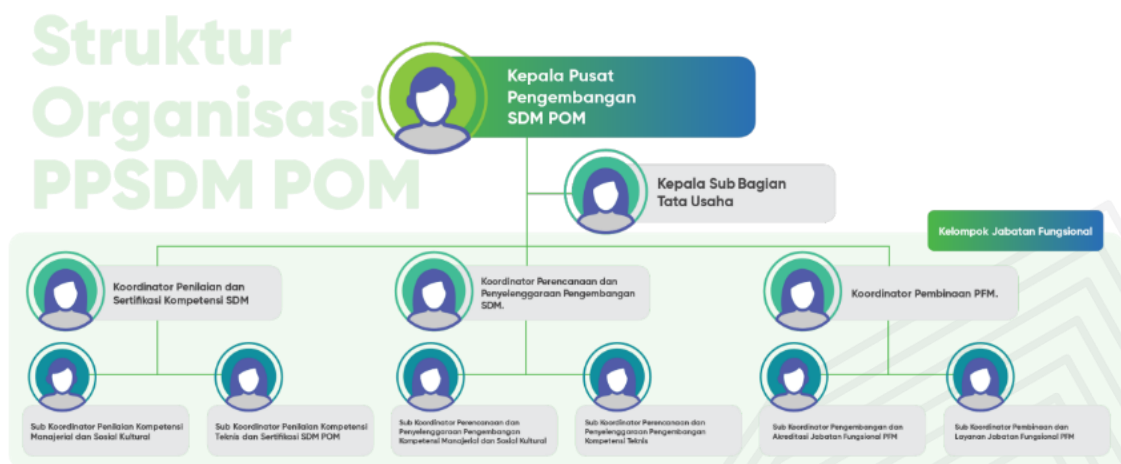
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Secara struktural, PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. PPSDM POM dipimpin oleh seorang Kepala. Susunan organisasi PPSDM POM terdiri atas Subbag Tata Usaha dan kelompok jabatan Fungsional. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM mempunyai 3 (tiga)



kelompok substansi yaitu: Kelompok Substansi Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia , Kelompok Substansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kelompok Substansi Pembinaan Pengawas farmasi dan Makanan.

Struktur Organisasi PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM

Secara struktural PPSDM POM merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama.

C.1. KEGIATAN UTAMA

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun kegiatan utama yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.
2. Terwujudnya RB BPOM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB BPOM 2020-2024.
3. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.
4. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.

5. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup PPSDM POM yang efektif.
7. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.
8. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.
9. Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.

C.2. KEGIATAN PRIORITAS PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Berdasarkan kegiatan utama di atas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan menyusun kegiatan prioritasnya untuk tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural

Penilaian Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta turunannya terkait pengembangan kompetensi. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi yang dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM Tingkat Keterampilan dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM Tingkat Keahlian. Sedangkan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.



2. *Capacity Building* Agen Perubahan

Reformasi birokrasi merupakan program perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Guna meningkatkan indeks reformasi birokrasi dilaksanakan dalam lingkungan Badan POM, maka perlu dilakukan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman pada ASN bahwa tujuan reformasi birokrasi membutuhkan peran dari tiap-tiap unit kerja di lingkungan Badan POM.



BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. LINGKUNGAN INTERNAL

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan bertempat di Gedung Gudang Listrik Jalan Salemba Raya No 19, Jakarta Pusat. Dengan Luas bangunan gedung kantor 774 m² ,terdiri dari 3 lantai yaitu lantai 4, lantai 5 dan lantai 6. Lantai 4 memiliki luas bangunan 258 m² , lantai 5 memiliki luas bangunan 258 m² dan lantai 6 memiliki luas bangunan 258 m².

A.1. SARANA DAN PRASARANA

A.1.1. STATUS KEPEMILIKAN TANAH

Status bangunan adalah sewa.

A.1.2. SARANA KOMUNIKASI

- 1) Nomor Telepon : 021 – 3103100
- 2) Nomor Faximile : 021 – 3103700
- 3) Nomor Whatsapp : 0811-1530533
- 4) Alamat e-mail : ppsdm@pom.go.id/ppsdm.pom@gmail.com
- 5) Twitter : @ppsdm_bpom
- 6) Facebook : [fb.me/ppsdm.bpom](https://www.facebook.com/ppsdm.bpom)
- 7) Instagram : @ppsdm.bpom



A.1.3. KENDARAAN

1. Kendaraan operasional roda empat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk/Type	Nomor Polisi	Jenis	Tahun Pembuatan	Kondisi
1.	Toyota Innova Venturer	B 1297 PQT	Mini Bus	2018	Baik
2.	Daihatsu Terios	B 1765 PQN	Mini Bus	2009	Baik

2. Kendaraan Operasional roda dua berjumlah 1 (satu) buah dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk/Type	Nomor Polisi	Jenis	Tahun Pembuatan	Kondisi
1.	Honda Vario	B 6076 PNQ	Sepeda Motor	2010	Baik

A.2. DATA KEPEGAWAIAN

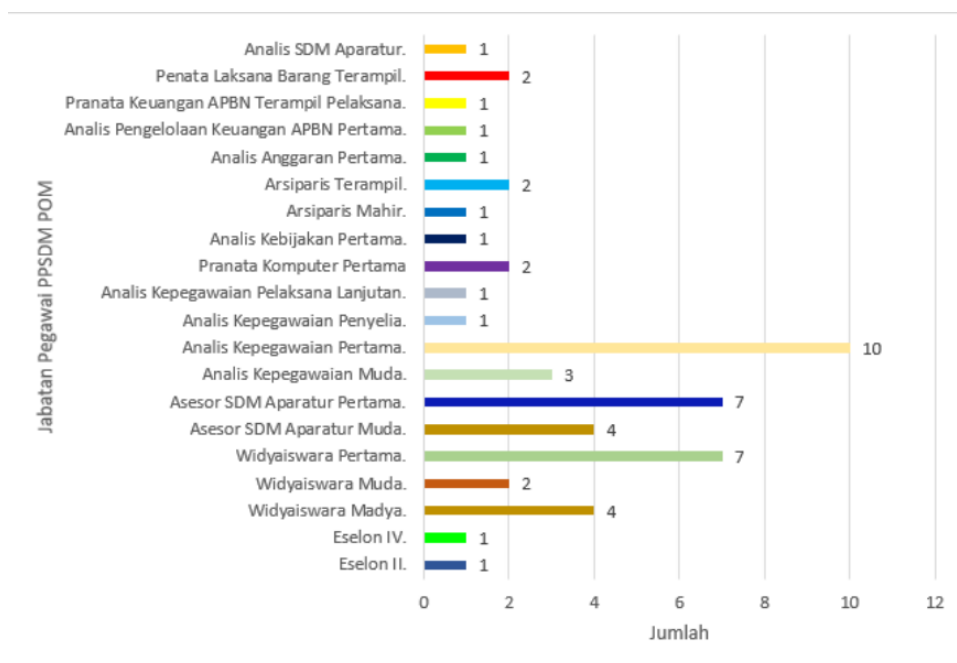
Sumber daya manusia PPSDM POM per 31 Desember 2021 berjumlah 69 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

PNS : 53 orang

Pramubakti : 16 orang

Jumlah PNS PPSDM POM tahun 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala PPSDM POM (Pejabat Struktural Eselon II), 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha PPSDM POM (Pejabat Struktural Eselon IV), dan kelompok Jabatan Fungsional.

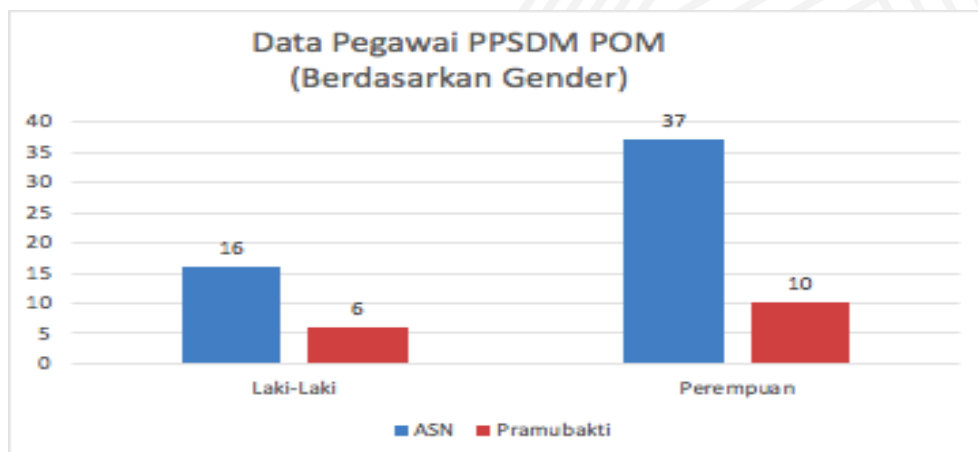




Gambar 2. Data Pegawai PPSDM POM Tahun 2021

Berikut data pegawai PPSDM POM berdasarkan beberapa klasifikasi:

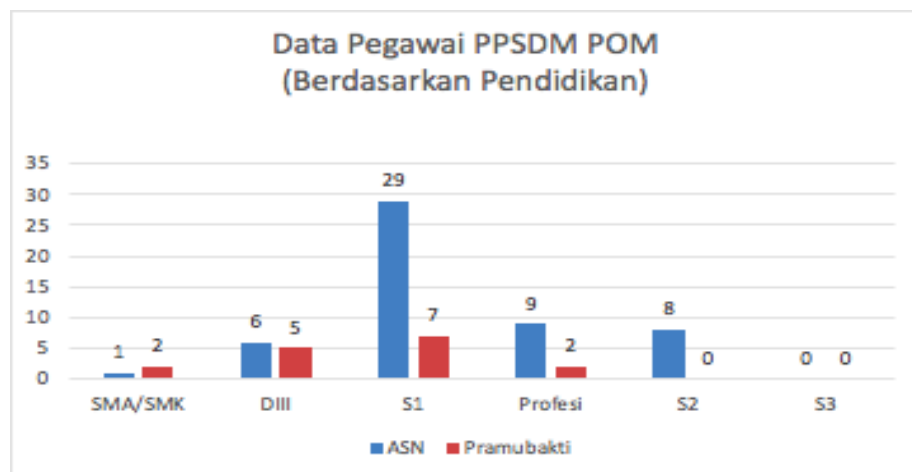
A.2.1. Berdasarkan Gender



Gambar 3. Data Pegawai PPSDM POM Berdasarkan Gender

Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22 orang (terdiri dari 16 orang ASN dan 6 orang Pramubakti), sedangkan pegawai yang berjenis kelamin wanita berjumlah 47 orang (terdiri dari 37 orang ASN dan 10 orang Pramubakti).

A.2.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Data Pendidikan Pegawai PPSDM POM

Jumlah pegawai PPSDM POM dengan pendidikan Magister (S2) sejumlah 8 (delapan) orang ASN, pendidikan Profesi sebanyak 9 (sembilan) orang ASN dan 2 (dua) orang pramubakti, pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang ASN dan 7 (tujuh) orang pramubakti, pendidikan Diploma (DIII) sebanyak 6 (enam) orang ASN dan 5 (lima) orang pramubakti, dan pendidikan SMA sebanyak 1 (satu) orang ASN dan 2 (dua) orang pramubakti.

A.3. ANGGARAN

Pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tahun 2021, pagu anggaran PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM sebesar Rp.48.447.825.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pada bulan Mei 2021 sesuai surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-KU.01.2.021.05.21.01 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyampaian Langkah-Langkah Revisi Penghematan Belanja K/L, terdapat kebijakan penghematan Belanja Pegawai sebesar Rp.399.512.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Juli 2021 sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.327 tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp.3.268.113.000,- (tiga milyar dua ratus enam

puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah), serta Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021, terdapat kebijakan penghematan anggaran sebesar Rp3.548.995.000,- (Tiga milyar lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.41.138.418.263,- (empat puluh satu milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,77 % (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen).



Tabel 1. Realisasi Anggaran PPSDM POM di Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INPUT /KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	TE	CAPAIAN TE	KRITERIA
		T	R	T	R	INPUT	OUTPUT					
Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi terhadap total SDM.	1.871.574.000	1.863.636.085	77	79.65	99.58	103.44	1.04	1	0.04	100%	Efisien
Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	10.544.295.750	10.539.720.545	45	61	99.96	135.56	1.36	1	0.36	100%	Efisien
	Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	341.503.000	341.431.902	12	12	99.98	100.00	1.00	1	0.00	100%	Efisien



Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	59.258.000	59.257.500	4.40	4.60	100.0	104.55	1.05	1	0.05	100%	Efisien
	Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	3.514.765.250	3.513.240.182	91	99	99.96	108.79	1.09	1	0.09	100%	Efisien
	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan Tersertifikasi sesuai Standar.	11.659.793.000	11.635.037.409	655	716	99.79	109.31	1.10	1	0.10	100%	Efisien
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	638.928.750	638.920.404	4.3	4.56	100.0	106.05	1.06	1	0.06	100%	Efisien



Badan POM 2020-2024.													
Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	212.976.250	212.973.468	87	87	100.0	100.00	1.00	1	0.00	100%	Efisien	
Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	76.050.000	76.049.700	90	85.34	100.0	94.82	0.95	1	-0.05	75%	tidak Efisien	
	Nilai AKIP PPSDM POM.	197.140.000	196.967.840	83	75.09	99.91	90.47	0.91	1	-0.09	75%	tidak Efisien	



Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	366.086.000	366.059.504	77	81.89	99.99	106.35	1.06	1	0.06	100%	Efisien
Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	348.915.000	348.886.100	2.00	1.00	99.99	50.00	0.50	1	-0.50	75%	Tidak Efisien
Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	6.366.006.000	6.312.344.251	94	90.90	99.16	96.70	0.98	1	-0.02	75%	Tidak Efisien
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	5.033.914.000	5.033.893.373	92	100	100.00	108.70	1.09	1	0.09	100%	Efisien



BAB III

HASIL KEGIATAN

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN merupakan salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier dalam rangka menerapkan merit system. Merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada misi Badan POM yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan sumber daya sebagai modal penggerak organisasi, baik yang tangible maupun yang intangible. Sumber daya di sini termasuk sumber daya manusia, PPSDM Pengawasan Obat dan



Makanan Badan POM berperan dalam pengembangan sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh PPSDM POM sebagaimana yang diamanatkan dalam Sasaran Strategis Badan POM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam 9 (sembilan) sasaran Strategis PPSDM POM 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- 1) “Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal”, dengan sasaran strategis PPSDM POM:
 - a. Meningkatnya kompetensi SDM POM.
 - b. Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.
 - c. Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.
 - d. Terwujudnya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.
 - e. Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.
- 2) “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal”, dengan sasaran strategi PPSDM POM:
 - a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.
 - b. Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai Road Map.
 - c. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.
 - d. Terkelolanya keuangan PPSDM POM secara akuntabel.



A. MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Persentase SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2021 tentang Rencana Kinerja PPSDM POM, 2 indikator ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi SDM POM dengan periode pelaporan triwulanan. Indikator Kinerja Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dasar hukum dan Standar Kompetensi yang digunakan pada tahun dalam rangka penilaian kompetensi, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019. tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keterampilan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar. Proses identifikasi kompetensi pegawai dilakukan melalui penilaian kompetensi dengan membandingkan antara nilai capaian kompetensi pegawai dengan persyaratan/standar kompetensi.



A.1. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan pada 23 kegiatan, yang meliputi kegiatan Seleksi Pengisian JPT Madya/Pratama, Pemetaan Kompetensi Pegawai BPOM, dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang / Pengangkatan Kembali / Perpindahan /Inpassing JF PFM. Penilaian Kompetensi dilaksanakan pada - Desember 2021 terhadap sebanyak 1.608 pegawai. Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi dilaksanakan secara daring dan luring di masa pandemi, untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi secara daring telah dibangun sistem penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang disingkat dengan Sipena Temanku.

Tabel 2. Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural TA 2021

Bulan/ Triwulan	Penilaian Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah per TW
(Triwulan-1)	1. Uji Penyetaraan 2021.	3	520
	2. Pemetaan CPNS TA 2019.	256	
	3. Uji Kompetensi Batch 1 dan Uji Kompetensi Ulang 2021.	37	
	4. Pemetaan BBPOM di Medan.	110	
	5. Pemetaan BBPOM di Batam	47	
	6. Pemetaan BBPOM di Jambi.	67	



Bulan/ Triwulan	Penilaian Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah per TW
(Triwulan-2)	7. Uji Kompetensi Pengangkatan Kembali 2021.	2	377
	8. Pemetaan BBPOM di Serang.	83	
	9. Pemetaan BBPOM di Pekanbaru.	108	
	10. Uji Kompetensi Batch 2	67	
	11. Pemetaan BBPOM di Pangkal Pinang.	48	
	12. Pemetaan BBPOM di Palu.	69	
(Triwulan-3)	13. Pemetaan Kompetensi BBPOM di Samarinda.	107	483
	14. Pemetaan Kompetensi BPOM di Kupang.	69	
	15. Uji Kompetensi Batch 3.	25	
	16. Pemetaan Kompetensi BPOM di Gorontalo.	39	



Bulan/ Triwulan	Penilaian Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah per TW
	17. Pemetaan Kompetensi BPOM di Mamuju.	33	
	18. Pemetaan Kompetensi Badan POM Pusat Batch 1, Batch 2, dan Batch 3.	198	
	19. Pemetaan Kompetensi Kepala Balai POM (Eselon III).	12	
(Triwulan-4)	20. Pemetaan Kompetensi Kepala Loka POM.	25	228
	21. <i>Re-Assessment</i> (pegawai yang diakses pada tahun 2019-2020 yang nilai kompetensinya kurang dari 78%).	141	
	22. Pemetaan Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM.	13	
	23. Uji Kompetensi <i>Batch IV</i> .	49	
Jumlah Peserta Penilaian Kompetensi Tahun 2021			1.608

Secara akumulasi sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021, jumlah SDM Badan POM yang telah dinilai kompetensinya sebanyak 1.608 (seribu enam ratus delapan) orang dari target 1.300 orang yang akan dipetakan jumlah kompetensinya di tahun



2021, secara persentase jumlah SDM yang telah dipetakan sampai dengan TW IV sebanyak 123.69%.

Capaian di atas telah melebihi target ini dikarenakan dalam perencanaan tidak ditambahkan jumlah target pegawai yang akan dinilai kompetensinya melalui mekanisme uji kompetensi dan re assessment untuk bagi pegawai pusat maupun balai yang memiliki kompetensi di bawah JPM yang dipersyaratkan sebanyak 150 orang pegawai pusat.

PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI SECARA LURING DI TAHUN 2021

Computerize Based Test



Wawancara Kompetensi

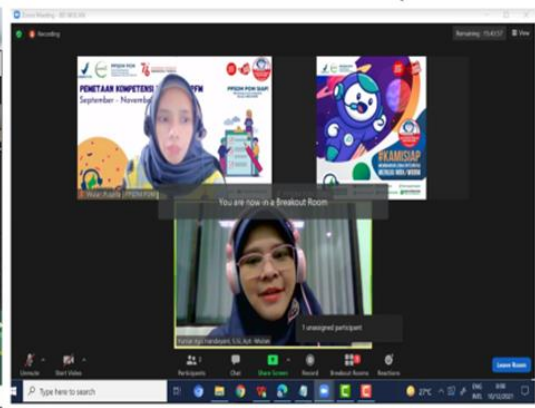


PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI SECARA DARING DI TAHUN 2021

Psikotes / SJT Online



Wawancara Kompetensi Online



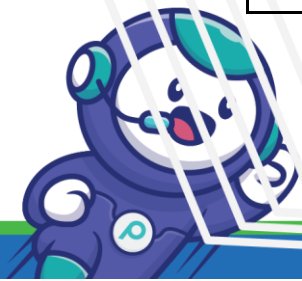
Gambar 5. Kegiatan Penilaian Kompetensi Daring dan Luring TA 2021



Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Tahun 2021 memetakan area kompetensi yang kuat dan area kompetensi yang perlu dikembangkan oleh organisasi. Kompetensi-kompetensi tersebut digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kompetensi Manajerial Sosial Kultural Kelompok Jabatan Struktural, Fungsional dan Seluruh Pegawai Tahun 2021

No.	Kompetensi	Capaian Kompetensi per Kelompok Jabatan		
		Struktural	Fungsional	Seluruh Pegawai
1.	Integritas	90%	81%	82%
2.	Kerjasama	98%	88%	89%
3.	Komunikasi	91%	88%	89%
4.	Orientasi pada Hasil	86%	79%	80%
5.	Pelayanan Publik	81%	74%	75%
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	86%	74%	75%
7.	Mengelola Perubahan	84%	76%	77%
8.	Pengambilan Keputusan	82%	79%	79%
9.	Perekat Bangsa	79%	77%	77%



Berdasarkan tabel di atas, secara umum Pejabat Struktural telah memenuhi Standar Kompetensi. Kompetensi yang masih membutuhkan pengembangan adalah Perekat Bangsa. Sementara itu, Kompetensi Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan, dan Perekat Bangsa pada Pejabat Fungsional belum memenuhi Standar Kompetensi dan perlu dikembangkan oleh organisasi. Secara lebih detail, capaian kompetensi dikelompokkan berdasarkan Level Jabatan dalam tabel di bawah ini. Kompetensi-kompetensi terendah pada sebagian besar Level Jabatan adalah Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, dan Perekat Bangsa.

Tabel 4. Capaian Kompetensi Manajerial Sosial Kultural per Level Standar Jabatan

No.	Kompetensi	Capaian Kompetensi per Level SKJ				
		1	2	3	4	5
1.	Integritas	120%	84%	69%	62%	60%
2.	Kerjasama	123%	92%	76%	72%	53%
3.	Komunikasi	124%	91%	76%	68%	40%
4.	Orientasi pada Hasil	114%	79%	69%	70%	33%
5.	Pelayanan Publik	104%	77%	64%	60%	33%
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	102%	78%	65%	64%	33%
7.	Mengelola Perubahan	104%	78%	67%	69%	40%



No.	Kompetensi	Capaian Kompetensi per Level SKJ				
		1	2	3	4	5
8.	Pengambilan Keputusan	104%	83%	69%	65%	33%
9.	Perekat Bangsa	112%	81%	64%	54%	30%

Berdasarkan hasil Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis, pegawai ASN yang memenuhi Standar Kompetensi adalah 3.644 (77,66%) dari 4.737 pegawai ASN Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, realisasi indikator “Persentase SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi” adalah 103.44% berdasarkan persentase 79.65% pegawai ASN yang memenuhi Standar Kompetensi dibandingkan target 77% yang ditetapkan.

Tabel 5. Persentase SDM BPOM yang Memenuhi Standar Kompetensi

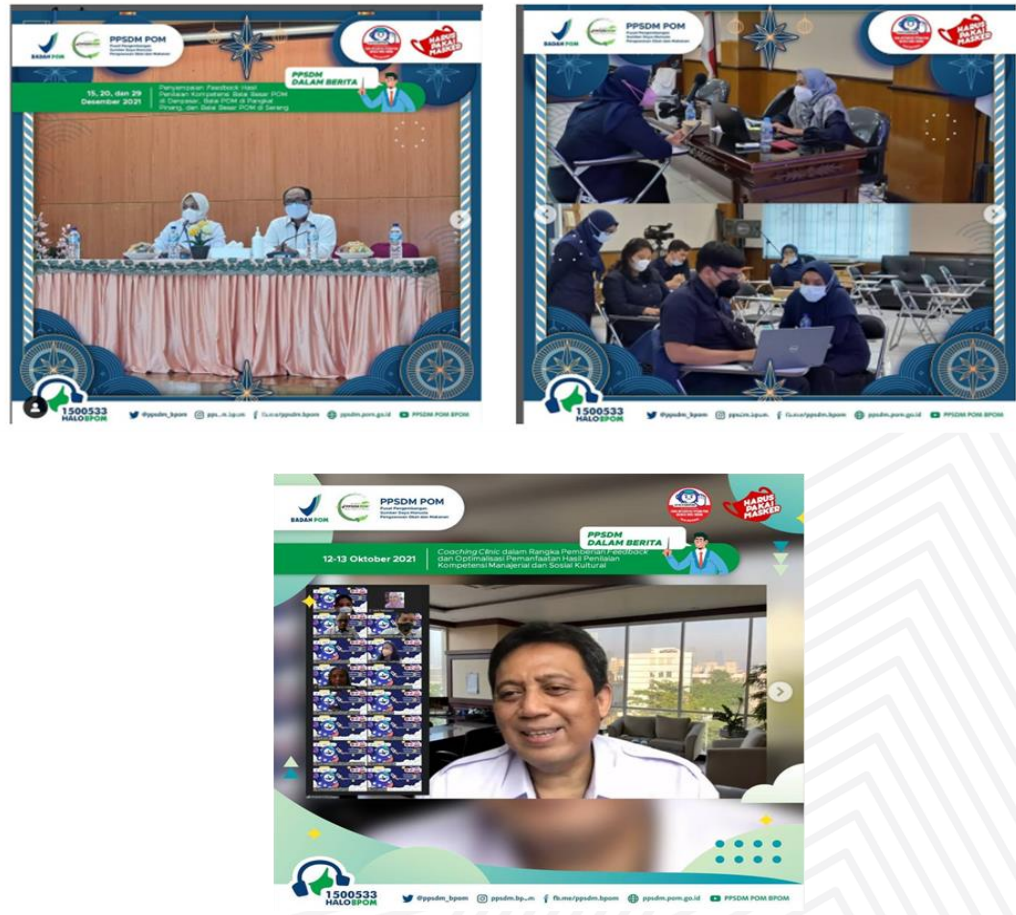
No.	Keterangan	Jumlah Pegawai
1.	Jumlah ASN Badan Pengawas Obat dan Makanan	4.737
2.	ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	3.644
3.	Persentase ASN Memenuhi Standar Dibanding Jumlah ASN	79.65%
4.	Persentase Capaian Memenuhi Standar Dibanding Target 77%	103.44%

Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan PPSDM POM telah melaksanakan Coaching Clinic Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara dari kepada pejabat struktural/coordinator/subordinator/pejabat fungsional pengelola kepegawaian.



Selain itu Asesor SDM Aparatur PPSDM POM juga melaksanakan pemberian umpan balik dari hasil penilaian kompetensi baik secara individu maupun kelompok.

PEMBERIAN UMPAN BALIK/FEEDBACK



Gambar 6. Coaching Clinic dan Feedback Hasil Penilaian Kompetensi TA 2021

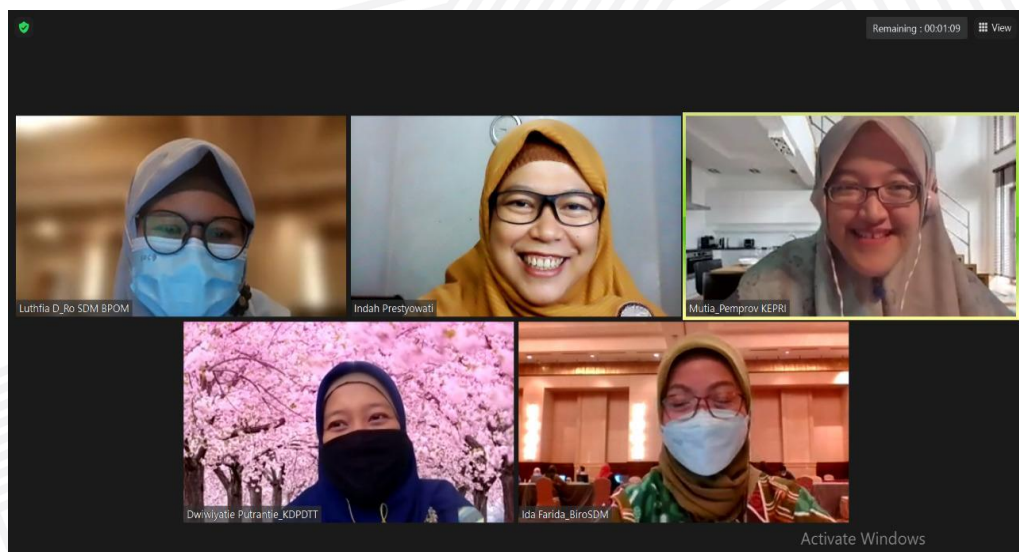
Pada tahun 2021 PPSDM POM mendapatkan Akreditasi A, pengakuan kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara. Capaian ini menunjukkan bahwa PPSDM POM telah diakui dan layak untuk melaksanakan penilaian kompetensi untuk Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah yang membutuhkan bantuan dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi.





Gambar 8. Sertifikat Akreditasi atas Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

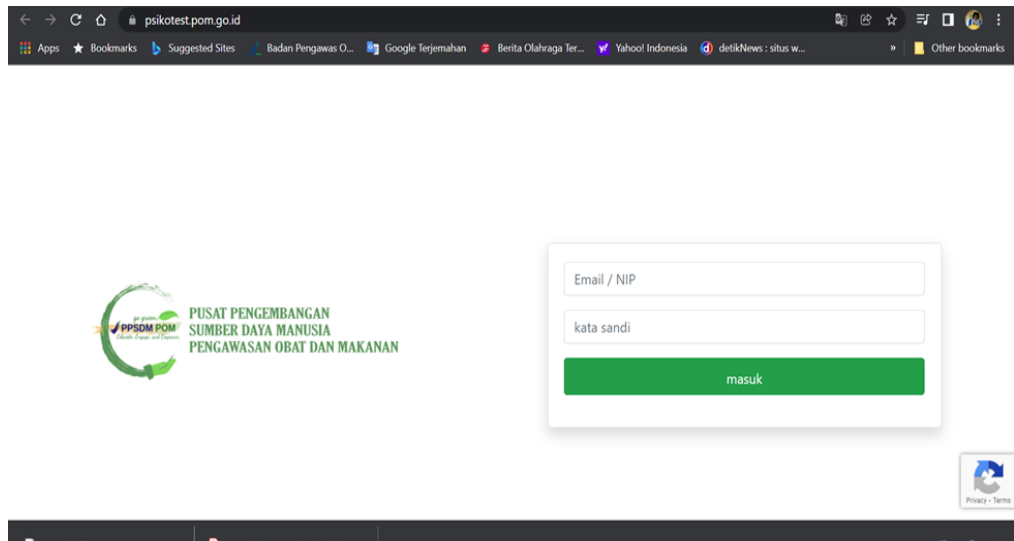
Dalam melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan maupun uji kompetensi Asesor SDM Aparatur juga berkolaborasi dan melibatkan Asesor SDM Aparatur dari Kementerian/Lembaga/Instansi Daerah. Sebagai penunjang pengembangan kompetensi dari Asesor SDM Aparatur, PPSDM POM melakukan kegiatan bimbingan teknis secara daring untuk penyusunan simulasi, penyusunan laporan kompetensi dan workshop pemberian feedback hasil penilaian kompetensi.



Gambar 7. Keterlibatan Asesor Eksternal Dalam Penilaian Kompetensi.



Aplikasi Psikotes Online yang dibangun di tahun 2021 menjadi salah satu investasi bagi PPSDM POM untuk melakukan penilaian potensi secara masif dalam rangka pemetaan ataupun seleksi tenaga kontrak yang dilakukan oleh unit kerja pusat. Aplikasi yang dibangun ini tidak hanya sekedar media pengambilan data tetapi juga untuk olah data, serta pelaporan sehingga dapat secara cepat dan akurat menampilkan hasil penilaian potensi.



Gambar 9. Halaman Depan psikotes.pom.go.id

A.2. Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Teknis

Penilaian Kompetensi teknis dilaksanakan pada 18 kegiatan, yang meliputi kegiatan Pemetaan Kompetensi Pegawai B / Pengangkatan Kembali / Perpindahan / Inpassing JF PFM. Penilaian Kompetensi dilaksanakan pada Bulan Januari - Desember 2021 terhadap sebanyak 1.559 pegawai dengan rincian terlampir pada tabel 6. Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi dilaksanakan secara daring dan luring di masa pandemi, untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi secara daring telah dibangun sistem penilaian kompetensi Pemetaan Kompetensi Teknis yang dilakukan lewat Aplikasi Penilaian KOMPetensi TEKnis (APOTEK).



Penilaian Kompetensi teknis dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung berupa:

- a. Tes tertulis Pilihan Ganda dan Essay
- b. Portofolio dan Wawancara Konfirmasi
- c. Penyusunan Makalah serta Wawancara Kompetensi Teknis

Tata cara penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian, dimana standar kelulusan disampaikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompetensi umum dengan nilai minimal 75
- b. Kompetensi inti dengan nilai minimal 70

Tabel 6. Kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis Tahun Anggaran 2021

Bulan/ Triwulan	Penilaian Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah Per TW
Januari (Triwulan-1)	1. Uji Kompetensi Pengangkatan kembali (keperluan khusus)	3	188
Februari (Triwulan-1)	2. Pemetaan BBPOM di Medan	66	
	3. Uji Kompetensi <i>Batch</i> 1	47	
Maret (Triwulan-1)	4. Pemetaan Balai POM di Batam	27	
	5. Pemetaan Balai POM di Jambi	45	



Bulan/ Triwulan	Penilaian Kompetensi	Jumlah Peserta	Jumlah Per TW
	16. Uji Kompetensi <i>Batch</i> 3	30	
	17. Uji Kompetensi Pengangkatan kembali (keperluan khusus)	3	
November (Triwulan-4)	18. Pemetaan Kompetensi dalam rangka <i>Carry Over</i> Tahun 2018-2020	558	937
	19. Pemetaan Kompetensi Unit Kerja Pusat dalam Rangka <i>Carry Over</i>	321	
	20. Uji Kompetensi <i>Batch</i> 4	57	
Desember (Triwulan-4)	21. Uji Kompetensi Pengangkatan kembali (keperluan khusus)	1	
Jumlah Peserta Penilaian Kompetensi Teknis Tahun 2021			1.559

Penilaian kompetensi teknis selama tahun 2021 dilakukan sebanyak 680 orang (sesuai target di Renstra) , karena perlu adanya pengurangan di pemetaan teknis, dilakukan pemetaan teknis kepada 879 orang (1.559-680) untuk peserta yang carry over (tahun 2019 - 2020) di mana saat penjadwalan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan/sakit dll)



Hasil Penilaian Kompetensi Umum yang dilakukan dalam rangka Pemetaan Kompetensi maupun uji kompetensi digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
APP.POM.PFM.A.1.1	Memahami Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	91%
APP.POM.PFM.A.2.1	Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan	90%
APP.POM.PFM.A.3.1	Memahami Sistem Manajemen Mutu Badan POM	85%
APP.POM.PFM.A.4.1	Memahami komunikasi risiko bidang obat dan makanan	83%
APP.POM.PFM.A.5.1	Memahami sistem informasi dan teknologi	91%

Kompetensi Inti mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 tahun 2017 terkait standar kompetensi teknis jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan jenjang keahlian. Pencapaian kompetensi inti berdasarkan fungsinya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
Pertama	APP.POM.PFM.II.B.2.21.1	melakukan pemeriksaan sarana produksi tingkat kesulitan I	85%
	APP.POM.PFM.II.B.2.25.1	melakukan pemeriksaan sarana distribusi tingkat kesulitan I	74%
	APP.POM.PFM.II.B.2.28.1	melaksanakan pengambilan contoh	87%
	APP.POM.PFM.II.B.2.29.1	melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar	89%
	APP.POM.PFM.II.B.2.30.1	melaksanakan pengawasan penandaan obat dan makanan	95%
	APP.POM.PFM.II.B.2.33.1	melakukan analisa / evaluasi permohonan surat keterangan impor/ ekspor/API-PI/IPB 2 obat dan makanan atau analisa hasil pengawasan narkotik, psikotropik dan prekursor	25%



Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
	APP.POM.PFM.II.B.2.34.1	melakukan pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilans tingkat kesulitan I	0%
Muda	APP.POM.PFM.II.B.2.22.1	melakukan pemeriksaan sarana produksi tingkat kesulitan II	91%
	APP.POM.PFM.II.B.2.23.1	melakukan pemeriksaan sarana produksi tingkat kesulitan III	92%
	APP.POM.PFM.II.B.2.26.1	melakukan pemeriksaan sarana distribusi tingkat kesulitan II	82%
	APP.POM.PFM.II.B.2.31.1	menyusun tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi, distribusi; penerapan farmakovigilans hasil pengambilan contoh dan pengujian; pengawasan iklan dan penandaan obat dan makanan.	90%
	APP.POM.PFM.II.B.2.35.1	melakukan pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilans tingkat kesulitan II	0%
Madya	APP.POM.PFM.II.B.2.24.1	melakukan pemeriksaan sarana produksi tingkat kesulitan IV	91%
	APP.POM.PFM.II.B.2.27.1	melakukan pemeriksaan sarana distribusi tingkat kesulitan III	86%
	APP.POM.PFM.II.B.2.32.1	melaksanakan kajian dan menyusun tindak lanjut terhadap isu keamanan obat dan makanan	86%
	APP.POM.PFM.II.B.2.36.1	menyusun prioritas pengawasan sarana dan produk	94%

PENYIDIKAN

Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
Pertama	APP.POM.PFM.II.B.3.38.1	melaksanakan investigasi	85%
	APP.POM.PFM.II.B.3.40.1	menyiapkan administrasi penyidikan	74%
	APP.POM.PFM.II.B.3.41.1	melakukan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	25%
Muda	APP.POM.PFM.II.B.3.37.1	melakukan manajemen investigasi	100%



Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
	APP.POM.PFM.II.B.3.39.1	melakukan manajemen operasi / penyidikan	85%
	APP.POM.PFM.II.B.3.41.1	melakukan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	96%
Madya	APP.POM.PFM.II.B.3.37.1	melakukan manajemen investigasi	50%
	APP.POM.PFM.II.B.3.39.1	melakukan manajemen operasi / penyidikan	56%
	APP.POM.PFM.II.B.3.41.1	melakukan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	78%

PENGUJIAN

Fungsi	Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
Pengujian Kimia	Pertama	APP.POM.PFM.II.B.4.44.1	melakukan pengujian kromatografi kompleks	85%
		APP.POM.PFM.II.B.4.45.1	melakukan pengujian spektrofotometri kompleks	66%
		APP.POM.PFM.II.B.4.46.1	melakukan pengujian disolusi kompleks	76%
		APP.POM.PFM.II.B.4.48.1	melakukan kalibrasi	50%
	Muda	APP.POM.PFM.II.B.4.42.1	melakukan pengujian secara <i>inductively couple plasma (ICP)</i>	72%
		APP.POM.PFM.II.B.4.43.1	melakukan pengujian spektrometri massa	64%
		APP.POM.PFM.II.B.4.44.1	melakukan pengujian kromatografi kompleks	67%
		APP.POM.PFM.II.B.4.46.1	melakukan pengujian disolusi kompleks	70%
		APP.POM.PFM.II.B.4.47.1	melakukan teknik analisis lanjutan	75%
		APP.POM.PFM.II.B.4.48.1	melakukan kalibrasi	81%
Pengujian Biologi	Pertama	APP.POM.PFM.II.B.4.49.1	melakukan pengujian dengan prinsip reaksi antigen-antibodi	40%
		APP.POM.PFM.II.B.4.50.1	melakukan pengujian berbasis DNA	62%
		APP.POM.PFM.II.B.4.51.1	melakukan pengujian potensi antibiotik, antimikroba, dan efektivitas pengawet	59%
		APP.POM.PFM.II.B.4.53.1	melakukan pengujian secara <i>In Vivo</i>	57%



Fungsi	Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
	Muda	APP.POM.PFM.II.B.4.55.1	melakukan pengujian kualitatif/ kuantitatif mikroba spesifik	76%
		APP.POM.PFM.II.B.4.47.1	melakukan teknik analisis lanjutan	73%
		APP.POM.PFM.II.B.4.49.1	melakukan pengujian dengan prinsip reaksi antigen-antibodi	86%
		APP.POM.PFM.II.B.4.50.1	melakukan pengujian berbasis DNA	86%
		APP.POM.PFM.II.B.4.52.1	melakukan pengujian menggunakan kultur sel	64%
		APP.POM.PFM.II.B.4.53.1	melakukan pengujian secara <i>In Vivo</i>	62%
		APP.POM.PFM.II.B.4.54.1	melakukan pengujian sterilitas	90%
		APP.POM.PFM.II.B.4.55.1	melakukan pengujian kualitatif/ kuantitatif mikroba spesifik	97%
Pengujian	Madya	APP.POM.PFM.II.B.4.56.1	melakukan analisis, evaluasi dan kajian terkait pengujian obat dan makanan	93%

PEMANTAUAN DAN KIE

Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
Pertama	APP.POM.PFM.II.B.5.62.1	membuat rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	95%
	APP.POM.PFM.II.B.5.65.1	melaksanakan kegiatan penyuluhan/kie (komunikasi, informasi, dan edukasi) tingkat kesulitan I	98%
	APP.POM.PFM.II.B.5.69.1	melakukan pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat sediaan farmasi dan makanan	72%
	APP.POM.PFM.II.B.5.70.1	membuat laporan pemantauan keamanan (laporan spontan efek samping) sediaan farmasi dan makanan tingkat kesulitan I	83%
	APP.POM.PFM.II.B.5.73.1	membuat laporan kajian keamanan, mutu dan manfaat tingkat kesulitan I	86%
Muda	APP.POM.PFM.II.B.5.63.1	mengevaluasi hasil rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	91%



Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Nama Unit Kompetensi	Pencapaian
	APP.POM.PFM.II.B.5.66.1	melaksanakan kegiatan penyuluhan/kie (komunikasi, informasi, dan edukasi) tingkat kesulitan II	95%
	APP.POM.PFM.II.B.5.71.1	membuat laporan pemantauan keamanan (laporan spontan efek samping) sediaan farmasi dan makanan tingkat kesulitan II	70%
	APP.POM.PFM.II.B.5.74.1	membuat laporan kajian keamanan, mutu dan manfaat tingkat kesulitan II	84%
Madya	APP.POM.PFM.II.B.5.64.1	menyempurnakan hasil rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE))	100%
	APP.POM.PFM.II.B.5.67.1	melaksanakan kegiatan penyuluhan/kie (komunikasi, informasi, dan edukasi) tingkat kesulitan III	88%
	APP.POM.PFM.II.B.5.68.1	melakukan advokasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan	92%
	APP.POM.PFM.II.B.5.72.1	membuat laporan pemantauan keamanan (laporan spontan efek samping) sediaan farmasi dan makanan tingkat kesulitan III	79%
	APP.POM.PFM.II.B.5.75.1	membuat laporan kajian keamanan, mutu dan manfaat tingkat kesulitan III	96%



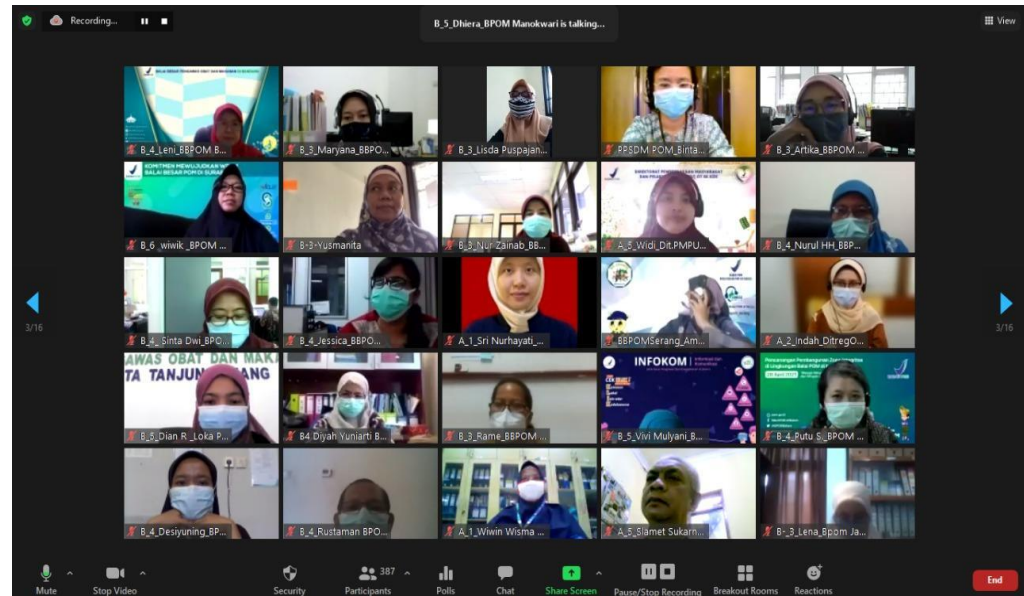


Gambar 10. Kegiatan Uji Kompetensi TA 2021

Kaji ulang terhadap kamus kompetensi teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan, dikarenakan perubahan struktur organisasi di Badan POM serta penyederhanaan birokrasi dimana telah dilakukan penyetaraan beberapa jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan pembahasan perubahan kamus kompetensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Farmasi dan Makanan dengan melibatkan seluruh unit Pusat dan Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM melalui pembahasan ruang lingkup dari kompetensi mengacu pada kamus kompetensi serta pembahasan kamus kompetensi baru untuk unit kerja yang terbentuk karena restrukturisasi organisasi di Lingkungan Badan POM dimana ada



penambahan unit kerja baru dengan ruang lingkup tugas baru. Pembahasan penyusunan standar kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit kerja dengan asistensi dari Kementerian PAN dan RB.



Gambar 11. Kegiatan Pembahasan Perubahan Kamus Kompetensi

Untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas JF PFM, PPSDM POM melaksanakan penilaian, pemetaan kompetensi, pengawasan dan pengendalian penilaian kompetensi yang melibatkan Tim Penilai Kompetensi BPOM. Dalam rangka pemutakhiran dan refreshment kemampuan asesor kompetensi dilakukan bimbingan teknis penilaian kompetensi teknis pada tanggal 25 sd 26 Oktober 2021, yang berasal dari 22 Unit Kerja Teknis di Badan POM, pada Fungsi Pemeriksaan, Penindakan, Pemantauan dan Penyuluhan, Pengujian Kimia, Pengujian Biologi, Standardisasi dan Penilaian yang diikuti oleh 60 Asesor. Selain itu juga dilakukan bimbingan teknis bagi 57 calon Asesor kompetensi dari lingkup UPT selama 3 hari, dari tanggal 1 sd 3 September 2021, yang berasal dari 33 Balai Besar / Balai POM, pada Fungsi Pemeriksaan, Penindakan, Pemantauan dan Penyuluhan, Pengujian Kimia, dan Pengujian Biologi.





Gambar 12. Bimtek Asesor Kompetensi UPT dan Refreshment Asesor Kompetensi

A.3. Ujian Dinas (UD)/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)/Alih Jenjang

Pelaksanaan UDUPKP 2021 dilaksanakan pada Triwulan II s.d Triwulan III. Pada tahun 2021 ada 6 pegawai yang mengusulkan untuk mengikuti UDUPKP, namun berdasarkan hasil administrasi hanya 4 pegawai yang dinyatakan lulus dan mengikuti UDUPKP. Kegiatan pembelajaran Modul dan Latihan Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dapat diakses oleh peserta pada tanggal 13 s.d 23 Juli 2021. Sebelum pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dimulai diadakan kegiatan pengarahan tanggal 26 Juli 2021. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Juli 2021, diundur menjadi tanggal 27 s.d 29 Juli 2021, sedangkan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 Juli 2021. Peserta yang lulus dalam pelaksanaan UDUPKP sebanyak 4 orang, terdiri dari 3 peserta di Ujian Dinas dan 1 peserta di Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.





Gambar 13. Sosialisasi Pelaksanaan UDUPKP TA 2021

A.4. Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah serangkaian kegiatan untuk menilai/mengukur kemampuan dan karakteristik seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu yang meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus.

BPOM sebagai instansi pembina jabatan fungsional menjadi salah satu dari instansi-instansi yang harus memperbarui soal SKB, berdasar surat MenpanRB NO. B/ 160 /M.SM.01.00/2021. Soal-soal yang perlu diperbarui yaitu soal SKB(Soal kemampuan Bidang) CPNS sebanyak 550 soal dan PPPK sebanyak 1650 soal.

BPOM melalui PPSDM POM telah melaksanakan kegiatan penyusunan soal SKB di TW II, yang kemudian naskah soal diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan rincian sebagai berikut:



No	Jabatan	Jumlah Soal
1.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ahli Pertama	550
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ahli Pertama	550
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ahli Muda	550
4.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ahli Madya	550

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan adalah berupa kendala teknis, yaitu kurang kuatnya sinyal wifi dan penginputan kisi-kisi dan skema soal yang seharusnya dilakukan sebelum kegiatan penyusunan soal seleksi kompetensi Bidang (SKB).





Gambar 14. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penelaahan Soal SKB Tahun 2021

A.5. Manajemen Mutu/Akreditasi Pusat pengembangan SDM POM

Untuk pemenuhan jaminan mutu lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), maka PPSDM POM sebagai lembaga pelatihan harus terakreditasi, sehingga dapat menyelenggarakan pelatihan secara mandiri dan sesuai standar. Untuk memperoleh Akreditasi tersebut persyaratan yang masih harus dipenuhi adalah:

1. Sarana prasarana berupa ruang kelas yang memadai, serta ruang pertemuan, penginapan peserta, dan beberapa fasilitas Diklat lainnya yang saat ini belum dimiliki oleh PPSDM POM.
2. Tenaga pengajar yaitu Widyaiswara yang jumlahnya sesuai ABK dan kompetensi yang sesuai.
3. Kurikulum untuk Pengembangan Kompetensi Teknis sesuai dengan Diklat yang akan diselenggarakan, saat ini belum tersedia lengkap sesuai kebutuhan kompetensi Badan POM (beberapa Diklat Teknis telah memiliki kurikulum yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala PPSDM POM). Namun demikian PPSDM POM sudah menyelenggarakan berbagai Diklat Teknis dan Fungsional melalui pola kerja sama dengan Lembaga Diklat lain yang sudah terakreditasi.



Selain menjamin pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan, PPSDM POM juga selalu menjaga kualitas dan mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. Aspek-aspek yang menjadi bagian dari penerapan mutu dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi, yang meliputi Kelembagaan, SDM, dan Metode Penilaian menjadi aspek yang selalu dikawal perbaikan secara berkelanjutan untuk selalu menjadi penyelenggara yang kredibel dan terakreditasi. Sehubungan dengan hal ini, telah dilakukan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang mencakup pembahasan atau refreshment terkait Prosedur dan mekanisme dan pembiayaan akreditasi lembaga diklat dan program pelatihan. selain itu, PPSDM POM juga telah melaksanakan studi tiru akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Program Pelatihan ke Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat. Untuk Rencana tindak lanjut, pada tahun 2022 PPSDM POM akan dilakukan Akreditasi Lembaga Diklat dan Reakreditasi Program pelatihan Teknis Bidang Pengawasan Obat dan Makanan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai surat Kepala PPSDM POM nomor B-PB.02.01.9.93.01.22.14 tanggal 4 Januari 2022.

A.6. Peningkatan dan Penguatan Organisasi dan Tata Laksana PPSDM POM

Tata Laksana merupakan salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi (RB). Terdapat 3 (tiga) hal yang diperhatikan dalam penguatan tata laksana RB adalah (1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama, (2) E-Office, dan (3) Keterbukaan Informasi Publik. Berikut ini merupakan monitoring dan evaluasi dalam penguatan tata laksana di PPSDM POM:

1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

SOP disusun guna menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System (QMS) di PPSDM POM. Pada tahun 2020 SOP mikro yang dimiliki PPSDM POM hanya tersedia dalam bentuk hardcopy. Saat ini pada tahun 2021 SOP Makro maupun SOP Mikro yang dimiliki PPSDM POM telah diunggah dalam subsite QMS Badan POM (<http://qms.pom.go.id>), sehingga saat ini dapat diakses dimanapun dan kapan saja.



SOP yang dibuat oleh PPSDM POM telah diterapkan dan dievaluasi, salah satu bentuk evaluasinya adalah dengan dilakukannya audit resertifikasi QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 20 Agustus 2021 dan dinyatakan tidak adanya temuan atau ketidaksesuaian baik mayor maupun minor. Berikut ini merupakan gambar kesimpulan dari audit resertifikasi QMS ISO 9001:2015 PPSDM POM:

Skema	Kesimpulan	Tanda tangan	
		Ketua tim audit	Perwakilan Organisasi
ISO9001:2015	Tim audit tidak menerbitkan ketidaksesuaian baik Major maupun minor dan observasi. Organisasi direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.	 (Name) : Mochamad Taufiq H. (Date) : 20 Agustus 2021	 (Name) : Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM. (Date) : 20 Agustus 2021

Written response of Non conformity(s) will be submitted to Sucofindo ICS on _____
 (Applied when Non Conformity(s) identified only)

2. E-Office

Dalam melaksanakan kinerja unit dan operasional manajemen SDM, PPSDM POM telah menggunakan teknologi informasi (*E-Office*). PPSDM telah menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), sehingga segala proses surat menyurat yang berjalan di PPSDM POM dapat tersimpan dan terarsipkan dengan baik. Penandatanganan naskah dinas juga sudah menggunakan *QR Code*. Selain itu, untuk mempermudah pelayanan kepada publik, PPSDM telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis website. Adapun aplikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. SIMPHONI (Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan dan Informasi)

Dalam upaya penerapan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) di Lingkungan BPOM, aplikasi ini dikembangkan. Setiap unit kerja di BPOM dapat melakukan sharing dan update data/informasi/pengetahuan dokumen yang dibutuhkan pegawai BPOM dan



dimiliki oleh Unit Kerja dan Pegawai. Monitoring dan Evaluasi penggunaan aplikasi juga selalu dilakukan secara rutin. Pada bulan September sebanyak 3.539 data/informasi/pengetahuan telah dikelola dalam aplikasi. Sebanyak 94 (dari 103) Unit Kerja telah melakukan *sharing knowledge*.

b. IDEAS (Integrated Development and Training Information System)

Aplikasi ini baru dikembangkan pada tahun 2021 dengan tujuan mempermudah pegawai BPOM dalam mengembangkan diri, mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Aplikasi ini juga mendorong adanya Sharing Knowledge di BPOM. Sehingga antar pegawai dapat saling berbagi kompetensi yang dimilikinya. Monitoring dan Evaluasi Aplikasi IDEAS terus dibuat secara rutin dan dapat didownload pada aplikasi SIMPHONI. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan melalui IDEAS pada bulan Desember sebanyak 1184 orang, terdapat peningkatan 14,11% dari bulan sebelumnya.

c. SiPandai (Sistem Pembelajaran Daring)

PPSDM POM mengembangkan sistem pembelajaran daring ini karena sistem pembelajaran yang ada telah bertransformasi dari pembelajaran konvensional menjadi bentuk digital/ e-learning, baik secara isi / konten dan sistem pembelajarannya yang tak terbatas ruang, jarak, dan waktu. Aplikasi ini digunakan oleh peserta yang diberi pelatihan oleh PPSDM, baik peserta dari internal maupun eksternal BPOM. Perlu adanya monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi yang dilakukan secara rutin, agar diketahui secara pasti prosentase pemanfaatan aplikasi. Aplikasi ini juga dapat mendokumentasikan tugas tugas pelatihan berbasis kompetensi, sehingga dapat dimanfaatkan saat uji kompetensi yang dilakukan bagi peserta yang telah lulus pelatihan berbasis kompetensi.



d. SiPena Temanku (Sistem Penilaian Kompetensi Manajerial)

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan penilaian kompetensi manajerial pegawai BPOM. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin setiap TW. Hingga triwulan ke-3, capaian kompetensi SDM POM yang dinilai kompetensinya di tahun 2021 adalah 85,54 % dari jumlah total pegawai yang dinilai kompetensi sejumlah 1394 pegawai, dari target awal sebanyak 1300 pegawai.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik telah diterapkan di PPSDM POM. Adapun aplikasi SIASN (Sistem Informasi ASN) BPOM yang didalamnya dapat terlihat secara terbuka pengembangan kompetensi dan hasil penilaian uji kompetensi manajerial yang telah dilakukan PPSDM untuk setiap pegawai. Pada aplikasi Simphoni juga dapat mendownload berbagai informasi publik yang dapat dibaca dan diketahui oleh pegawai. Sebagai upaya pemberian informasi secara aktual dan terkini, PPSDM POM telah aktif memanfaatkan sosial media yang dimiliki, baik melalui twitter, Instagram, maupun facebook. Pada akun sosial media akan diinformasikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh PPSDM atau yang akan dilakukan oleh PPSDM. Publik juga dapat mengetahui informasi melalui Website ppsdm.pom.go.id. Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan PPSDM juga dapat diakses oleh seluruh pegawai BPOM melalui aplikasi Simphoni.

A.7. Review Dokumen Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Dalam upaya mewujudkan dukungan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi, telah disusun kurikulum dan media pembelajaran online yang digunakan sebagai bahan pembelajaran online selama pandemi Covid-19. Kurikulum dan Pedoman yang disusun pada tahun 2021 meliputi:

- a. Kurikulum dan Modul Pelatihan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang terdiri dari 6 (enam) modul yakni Perikat Bangsa, Orientasi pada Hasil, Kerjasama, Komunikasi, Integritas serta Pengambilan Keputusan.



b. Kurikulum dan Modul Pelatihan Kompetensi Teknis yang terdiri dari 4 (empat), antara lain Kurikulum untuk fungsi KIE tingkat kesulitan II, Standarisasi tingkat kesulitan I, Pemeriksaan Sarana Distribusi tingkat kesulitan II, dan Penilaian tingkat kesulitan I. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 merupakan proses yang berkelanjutan bagi kurikulum dan modul yang telah disusun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kurikulum dan modul yang telah disusun ditetapkan dalam surat keputusan sebagai berikut:

1. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 2 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.
3. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor Hk.02.02.82.821.01.20.6787 tentang Kurikulum Pelatihan Penilaian Obat Tingkat Kesulitan I.
4. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.82.821.01.20.6788 tentang Kurikulum Pelatihan Penilaian Obat Tingkat Kesulitan II
5. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.923.09.21.10521 Tentang Kurikulum Pelatihan Pemeriksaan Sarana Distribusi Tingkat Kesulitan II berbasis e learning.
6. Peraturan Badan POM No 26 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan di kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan



c. Video Pembelajaran/*e-learning*

Pada tahun 2021 PPSDM POM menyusun media pembelajaran Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, serta untuk pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dalam bentuk video sebagai bahan *e-learning*, dengan judul sebagai berikut:

1. Video Pembelajaran Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, melalui video pembelajaran/*e-learning*. Video disusun berdasarkan kompilasi pembelajaran yang dilaksanakan secara online antara lain mencakup orientasi pada hasil, integritas ASN, komunikasi dan kerjasama, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan pengembangan diri dan orang lain.
2. Video Pembelajaran Kompetensi Teknis yang telah diproduksi pada tahun 2021 sebanyak 18 judul video *e-learning*, antara lain:
 - a. teknologi komunikasi dan informasi
 - b. pengawasan produk
 - c. senam peregangan (2 video)
 - d. Penyuluhan dan KIE tingkat kesulitan I
 - e. Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan tingkat kesulitan I
 - f. Penyuluhan dan KIE melalui pameran tingkat kesulitan I
 - g. Merancang materi penyuluhan atau produk KIE
 - h. Kajian penyusunan materi penyuluhan atau produk KIE
 - i. Anatomi dan Fisiologi Kulit, Rambut, Kuku, dan Membran Mukosa
 - j. Opening dan Closing Meeting Pemeriksaan Sarana Distribusi tingkat kesulitan II
 - k. Persiapan pemeriksaan sarana distribusi tingkat kesulitan II
 - l. Pemeriksaan lapangan dan dokumen Pelatihan Pemeriksaan Sarana Distribusi tingkat kesulitan II



- m. Mock up Pemeriksaan sarana distribusi obat (PBF)
- n. Mock up Pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian (apotek)
- b. Mock up Pemeriksaan sarana distribusi kosmetika
- a. Mock up Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional
- b. Mock up Pemeriksaan sarana distribusi pangan



Gambar 15. Proses Produksi Video *E-learning*

B. Jumlah SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang Tersertifikasi Sesuai Standar

Pemerintah secara konsisten membangun kualitas SDM hal ini tertuang dalam RKP 2020-2024 melalui tajuk "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". SDM yang cakap dan handal akan mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan yang mencakup sebelum dan sesudah peredaran, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.



Dengan semakin kompleksnya serta luasnya cakupan tugas pengawasan obat dan makanan, Badan POM tidak dapat bertindak sendiri dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat melalui program community empowerment dimana melibatkan masyarakat sebagai mitra. Hal ini diwujudkan dalam program-program tahun 2021 yang telah disusun melalui Program Prioritas Nasional yaitu kegiatan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar didukung beberapa kegiatan utama antara lain:

1. Sertifikasi SDM Pengawas Obat dan Makanan
2. Penyusunan Standar kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan
3. Pembinaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
4. Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan
5. Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional PFM
6. Pendidikan Lanjutan Pengawas Obat dan Makanan

B.1. Sertifikasi SDM Pengawas Obat dan Makanan

Dalam upaya mendukung Rencana Kerja pemerintah, Badan POM membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Badan POM (LSP Badan POM) bagi Pengawas Obat dan Makanan. LSP Badan POM berperan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan dimana bagi unsur Pemerintah, Badan POM menjamin tenaga-tenaga penyuluh dan pengawas obat dan makanan hingga ke Pemerintah daerah sehingga cakupan dukungan terhadap UMKM semakin luas. Tidak hanya menjamin pendampingan UMKM oleh Petugas Penyuluh Keamanan Pangan yang tersertifikasi, tapi juga menjamin produk yang diproduksi senantiasa berkualitas dengan pengawasan post market oleh petugas Inspektur Muda Keamanan Pangan yang tersertifikasi.

Masyarakat melalui organisasi masyarakat juga dilibatkan dalam pendampingan UMKM dengan memberikan Pelatihan serta sertifikasi tenaga Penyuluh Keamanan



Pangan. Sehingga dalam SDM yang melakukan pendampingan UMKM secara mandiri dapat terjamin kualifikasi dan kualitasnya.

Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diperlukan suatu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang lisensinya dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tahun 2020 telah berproses re-lisensi LSP Keamanan Pangan BPOM yang telah habis masa berlakunya dan mengajukan perubahan nama LSP menjadi LSP BPOM karena seiring dengan kebutuhan sertifikasi SDM Pengawas Obat dan Makanan tidak hanya terbatas di bidang Pangan namun juga mencakup komoditi yang diawasi oleh Badan POM lainnya yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika

Proses re-lisensi telah selesai dilaksanakannya dengan ditetapkannya Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.0058/BNSP/I/2021 pada tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengawas Obat dan Makanan (LSP BPOM) yang berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 11 Januari 2026 serta diterbitkan Sertifikat Lisensi LSP BPOM sebagaimana terlampir. Dengan diterbitkan Keputusan tersebut, LSP BPOM wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan pedoman BNSP terkait. Sertifikat Lisensi diserahkan langsung oleh kepala BNSP sekaligus pada kegiatan Pencanangan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).



Gambar 16. Penyerahan sertifikat LSP Badan POM oleh Kepala BNSP kepada Kepala Badan POM



BNSP memberikan perpanjangan lisensi kepada LSP BPOM untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 4 (empat) skema sertifikasi meliputi:

1. Skema Sertifikasi Okupasi Penyuluh Keamanan Pangan pertama/ PKP Pertama;
2. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Muda Keamanan Pangan/ Junior District Food Inspector (Junior DFI);
3. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Keamanan Pangan/ District Food Inspector (DFI);
4. Skema Sertifikasi Okupasi Inspektur Kepala Keamanan Pangan/ Lead District Food Inspector (Lead DFI)

Pada Tahun 2021, Pengembangan LSP Badan POM adalah:

1. Melakukan sertifikasi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan (Penyuluh Keamanan Pangan, District Food Inspector, dan PFM)
2. Pelatihan Asesor Kompetensi
3. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri di UPT Badan POM
4. Menyusun SKKNI terkait Obat dan produk Biologi, Obat Tradisional, Produk Komplemen dan Kosmetika
5. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi berbasis Online

Dengan adanya pandemi Covid-19, terdapat kebijakan penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 untuk *refocusing* penanganan pandemi Covid-19, maka dilakukan penyesuaian anggaran serta target output dan Indikator Kinerja Kegiatan pada “Jumlah SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar”, yaitu semula ditargetkan untuk sebanyak 820 (delapan ratus dua puluh) orang disesuaikan menjadi untuk 655 (enam ratus lima puluh lima) orang.

Sampai dengan tahun 2022, jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar sebanyak:



1. Tahun 2020, 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) orang, sedangkan target tahun 2020 adalah sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) orang, sehingga capaian untuk tahun 2021 sebesar 101,32%, dengan kategori capaian kinerja “BAIK”.
2. Tahun 2021, 716 (tujuh ratus enam belas) orang, sedangkan target tahun 2021 adalah sebanyak 655 (enam ratus lima puluh lima) orang, sehingga capaian untuk tahun 2021 sebesar 109,32%, dengan kategori capaian kinerja “BAIK”

B.1.1. Sertifikasi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan (Penyuluh Keamanan Pangan, District Food Inspector, dan Pengawas Farmasi dan Makanan).

Pada tahun 2021, PPSDM POM bersama LSP BPOM melaksanakan Sertifikasi Kompetensi District Food Inspector (DFI) Junior dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dengan hasil sebagai berikut:

1. Sertifikasi Kompetensi District Food Inspector (DFI) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Sertifikasi Kompetensi SDM POM	Jumlah Peserta	Hasil Sertifikasi		Waktu Pelaksanaan	Tempat Uji Kompetensi
		Kompeten	Belum Kompeten		
Sertifikasi Kompetensi Batch 1 Tahun 2021	28	27	1	19 Maret 2021	Aula Hotel Aston Bekasi
Sertifikasi Kompetensi DFI - PPSDM	5	3	2	31 Maret 2021	Ruang LSP Gedung E
Sertifikasi Kompetensi Batch 2 Tahun 2021	24	21	3	8 April 2021	Hotel Aston Tropicana
Sertifikasi Kompetensi Batch 3 Tahun 2021	42	39	3	10 Juni 2021	Hotel Double Tree by Hilton Surabaya



Sertifikasi Kompetensi SDM POM	Jumlah Peserta	Hasil Sertifikasi		Waktu Pelaksanaan	Tempat Uji Kompetensi
		Kompeten	Belum Kompeten		
Sertifikasi Kompetensi Batch 4 Tahun 2021	31	30	1	30 September 2021	Hotel JW Marriott Medan

2. Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Sertifikasi Kompetensi SDM POM	Jumlah Peserta	Hasil Sertifikasi		Waktu Pelaksanaan	Tempat Uji Kompetensi
		Kompeten	Belum Kompeten		
Sertifikasi Kompetensi Batch 1 Tahun 2021	29	27	2	18 Maret 2021	Aula Hotel Aston Bekasi
Sertifikasi Kompetensi Batch 2 Tahun 2021	21	18	3	9 April 2021	Hotel Aston Tropicana Bandung
Sertifikasi Kompetensi Batch 3 Tahun 2021	40	39	1	11 Juni 2021	Hotel <i>Double Tree</i> by Hilton Surabaya
Sertifikasi Kompetensi Batch 4 Tahun 2021	28	27	1	1 Oktober 2021	Hotel JW Marriott Medan





Gambar 17. Sertifikasi Kompetensi Batch 1 Tahun 2021



Gambar 18. Sertifikasi Kompetensi Batch 2 Tahun 2021



Gambar 19. Sertifikasi Kompetensi Batch 3 Tahun 2021



Gambar 20. Sertifikasi Kompetensi Batch 4 Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut Tahun 2022 Setelah dilaksanakan sertifikasi untuk Tenaga Pengawas Obat dan Makanan (Penyuluh Keamanan Pangan, District Food Inspector, dan Pengawas Farmasi dan Makanan) kami akan melaksanakan rangkaian Monitoring dan Evaluasi pemegang sertifikat kompetensi dengan melakukan pertemuan secara online terkait implementasi sertifikat kompetensi yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan Makanan.

B.2. Melaksanakan Pelatihan Asesor Kompetensi

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk mengembangkan standar kompetensi yang merupakan instrumen dalam menjamin mutu kompetensi sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan, serta Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Pengawas Obat dan Makanan (LSP BPOM) selaku Unit Pelaksana Sertifikasi.

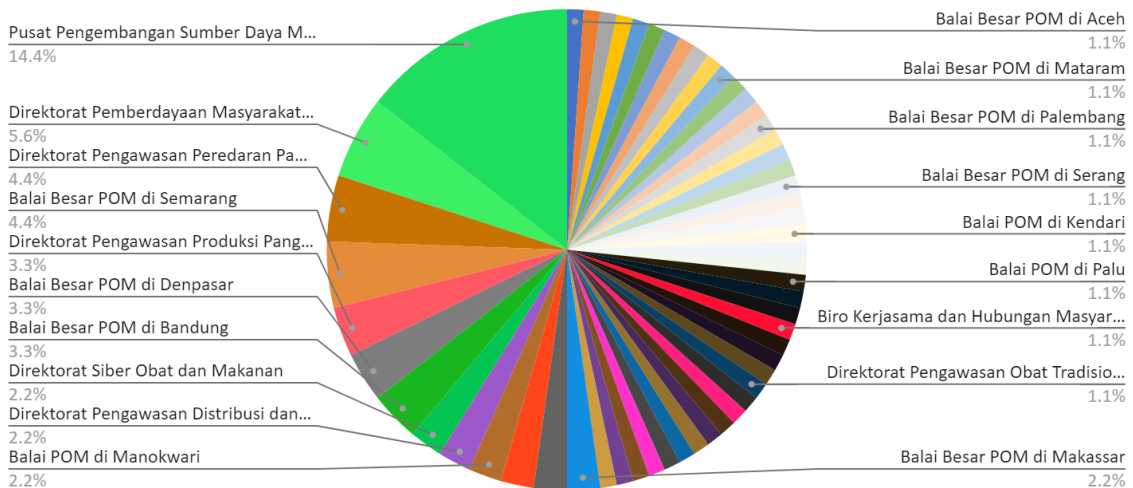
Dalam melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi diperlukan para asesor kompetensi yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengawasan obat dan makanan. Sehubungan dengan hal tersebut PPSDM POM bersama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melaksanakan pelatihan asesor kompetensi teknis untuk kemudian ditetapkan sebagai asesor kompetensi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi Teknis dilaksanakan 2 batch pada:



- Batch - 1: 22 - 26 Maret 2021, bertempat di Jakarta sebanyak 24 (dua puluh empat) peserta/asesor, peserta berasal dari BPOM Pusat dan UPT BPOM bagian Barat dan Tengah.
- Batch - 2 : 12 - 16 April 2021, bertempat di Denpasar sebanyak 24 (dua puluh empat) peserta/asesor, peserta berasal dari UPT BPOM bagian Tengah dan Timur.

Saat ini, LSP telah memiliki 90 (Sembilan puluh) orang asesor yang tersebar di seluruh UPT BPOM dan BPOM Pusat. Berikut data jumlah asesor per unit:

Sebaran Asesor Kompetensi di TUK



Gambar 21. Sebaran Asesor Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi(TUK)

Sebagian besar Asesor sudah ditugaskan untuk mengakses tenaga PKP Pertama dan DFI Junior di beberapa Kota yang menyelenggarakan pelatihan dan asesmen di tahun 2021. Bagi Asesor yang belum mendapatkan tugas di tahun 2021 akan dipetakan untuk mengakses di tahun 2022, mengingat target SDM yang tersertifikasi di tahun 2022 semakin meningkat.





Gambar 23. Pelatihan Asesor Kompetensi LSP BPOM *Batch* 1 di Jakarta



Gambar 22. Pelatihan Asesor Kompetensi LSP BPOM *Batch* - 2 di Denpasar



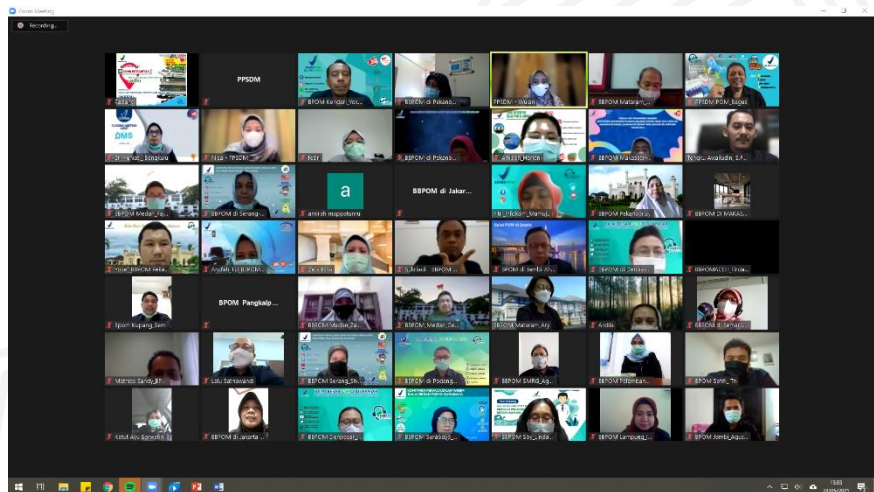
B.3. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri di UPT Badan POM

Dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, LSP Badan POM mengembangkan Tempat Uji Kompetensi yang tersebar di seluruh Balai Besar/Balai POM di 33 Provinsi. Hal ini merupakan upaya konsisten Badan POM dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia, SDM Unggul Indonesia Maju.

TUK akan melayani sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan baik dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah, serta sertifikasi bagi tenaga Inspektur Muda Keamanan Pangan dari Unsur pemerintah yang melakukan pengawasan secara konsisten demi menjamin keamanan serta kesehatan masyarakat.

Pembentukan TUK diawali dengan verifikasi secara online dan offline dan diakhiri dengan Peresmian TUK secara bertahap selama tahun 2021 sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengembangan TUK di UPT BPOM yang diikuti oleh seluruh UPT di Lingkungan Badan POM pada tanggal 24 Mei 2021.



Gambar 24. Sosialisasi Pengembangan TUK

2. Verifikasi mandiri/*Self Assessment* yang dilaksanakan oleh Seluruh Calon TUK pada tanggal 1 - 30 Juni 2021.
3. Verifikasi TUK secara online dan offline yang dilaksanakan sesuai jadwal



Tabel 7. Verifikasi TUK tahun 2021

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Verifikasi TUK BBPOM di Denpasar (<i>Luring</i>)	8 Juni 2021
2	Verifikasi TUK BBPOM di Surabaya (<i>Luring</i>)	9 Juni 2021
3	Verifikasi TUK BBPOM di Makassar (<i>Luring</i>)	10 September 2021
4	Verifikasi TUK BBPOM di Bandung (<i>Luring</i>)	17 September 2021
5	Verifikasi TUK BBPOM di Medan (<i>Luring</i>)	28 September 2021
6	Verifikasi TUK BBPOM di Padang (<i>Luring</i>)	18 Oktober 2021
7	Verifikasi TUK BBPOM di Semarang (<i>Luring</i>)	29 Oktober 2021
8	Verifikasi TUK BPOM di Bengkulu (<i>Luring</i>)	5 November 2021
9	Verifikasi TUK BPOM di Kupang (<i>Luring</i>)	5 November 2021
10	Verifikasi TUK BPOM di Manokwari (<i>Luring</i>)	5 November 2021
11	Verifikasi TUK BBPOM di Pontianak (<i>Luring</i>)	5 November 2021
12	Verifikasi TUK BBPOM di Mataram (<i>Luring</i>)	5 November 2021
13	Verifikasi TUK BBPOM di Serang (<i>Luring</i>)	12 November 2021
14	Verifikasi TUK BBPOM di Bandar Lampung (<i>Luring</i>)	12 November 2021
15	Verifikasi TUK BBPOM di Banjarmasin (<i>Luring</i>)	12 November 2021
16	Verifikasi TUK BBPOM di Palembang (<i>Luring</i>)	12 November 2021
17	Verifikasi TUK BPOM di Gorontalo (<i>Luring</i>)	12 November 2021
18	Verifikasi TUK BBPOM di Manado (<i>Daring</i>)	17 November 2021
19	Verifikasi TUK BPOM di Jambi (<i>Daring</i>)	17 November 2021
20	Verifikasi TUK BBPOM di Jayapura (<i>Daring</i>)	17 November 2021
21	Verifikasi TUK BPOM di Batam (<i>Daring</i>)	17 November 2021
22	Verifikasi TUK BPOM di Mamuju (<i>Daring</i>)	17 November 2021
23	Verifikasi TUK BPOM di Kendari (<i>Daring</i>)	17 November 2021



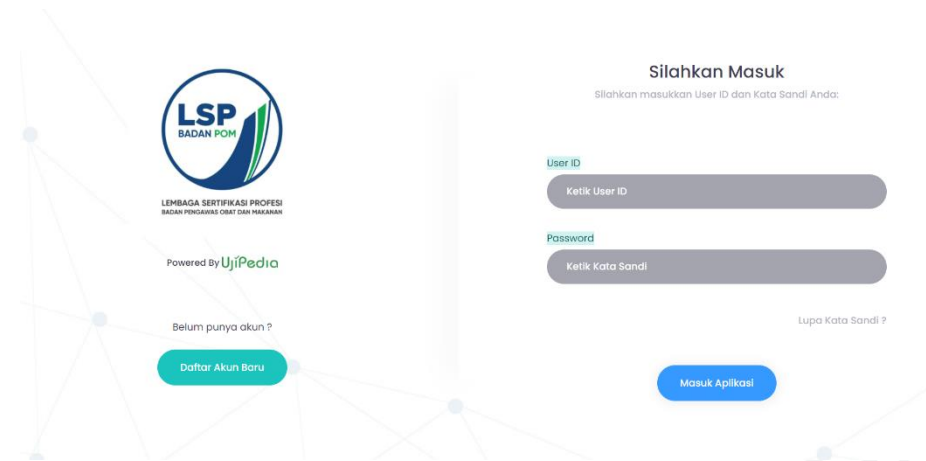
No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
24	Verifikasi TUK BPOM di Pangkal Pinang (<i>Daring</i>)	17 November 2021
25	Verifikasi TUK BBPOM di Banda Aceh (<i>Daring</i>)	17 November 2021
26	Verifikasi TUK BPOM di Ambon (<i>Daring</i>)	17 November 2021
27	Verifikasi TUK BPOM di Ambon (<i>Daring</i>)	17 November 2021
28	Verifikasi TUK BPOM di Sofifi (<i>Daring</i>)	17 November 2021
29	Verifikasi TUK BBPOM di Samarinda (<i>Daring</i>)	17 November 2021
30	Verifikasi TUK BPOM di Palu (<i>Daring</i>)	17 November 2021
31	Verifikasi TUK BBPOM di Palangkaraya (<i>Daring</i>)	17 November 2021



Gambar 25. Verifikasi TUK tahun 2021



LSP Badan POM juga Mengembangkan Sistem Sertifikasi Kompetensi secara online dengan kerjasama dengan LSP Balnesia Internasional dengan menggunakan Aplikasi Ujipedia.



Bimbingan Teknis dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Bimbingan teknis Batch-1, tanggal 13-14 September 2021, dilaksanakan di BBPOM di Denpasar



2. Bimbingan teknis Batch-2, tanggal 12 Oktober 2021, dilaksanakan di The Margo Hotel



Dalam upaya peningkatan pelayanan sertifikasi Oleh LSP Badan POM studi tiru dilakukan terhadap beberapa LSP yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021, LSP yang turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah LSP BPSDM PUPR, LSP Polri dan LSP Pertanian.

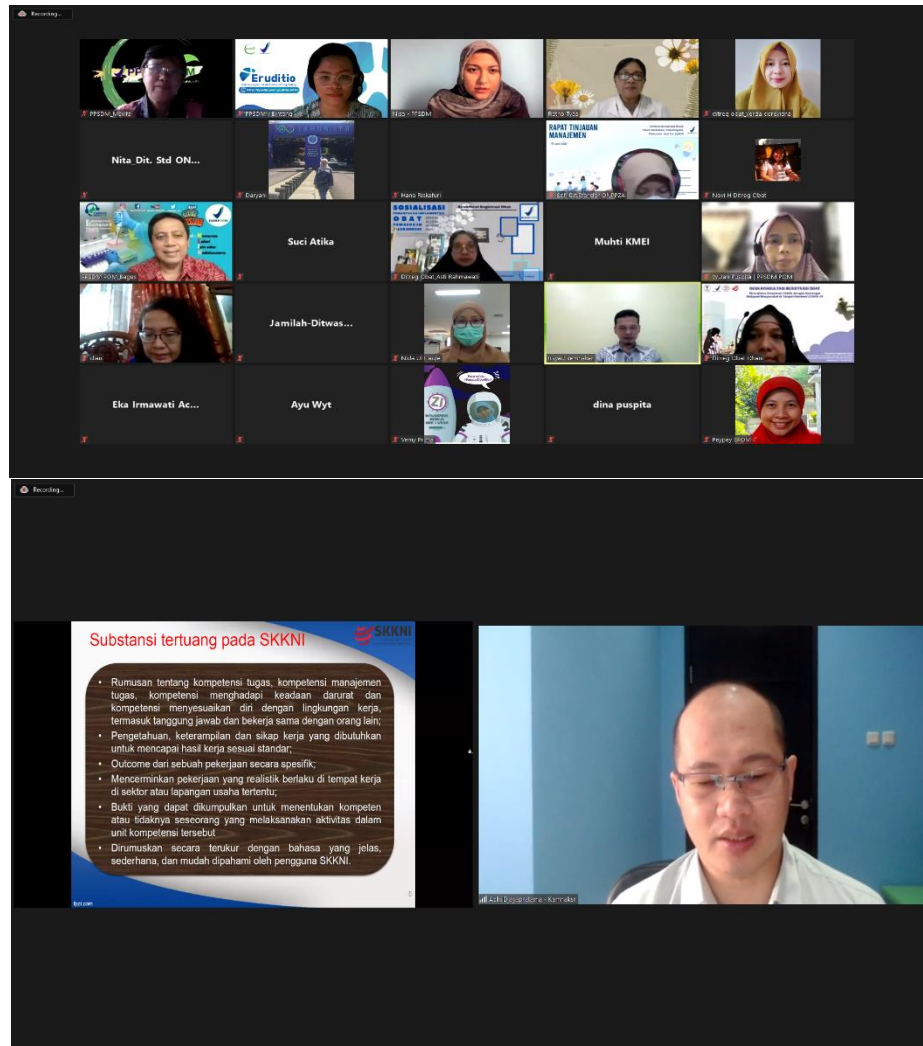
B.4. Menyusun SKKNI terkait Obat dan produk Biologi, Obat Tradisional, Produk Komplemen dan Kosmetika

Dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen untuk mengembangkan standar kompetensi yang merupakan instrumen dalam menjamin mutu kompetensi petugas Pengawas Obat dan Makanan termasuk pengembangan Standar Kompetensi Kerja di bidang Obat, produk Biologi, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi SDM Pengawas Obat dan Makanan, Tim PPSDM sebanyak 2 (dua) orang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 1 sd 6 Maret 2021
2. Sebagai tindak lanjut Pembahasan Penyusunan SKKNI Bidang Pengawasan Mutu Obat dan Produk Biologi yang telah diselenggarakan pada akhir tahun 2020, Tim Perumus dan Tim Verifikasi melaksanakan Finalisasi Tahap Lanjut Penyusunan SKKNI Bidang Pengawasan Mutu Obat dan Produk Biologi yang dilaksanakan secara online pada 29 sd 30 Juni 2021, dan verifikasi SKKNI tanggal 19 sd 20 Agustus 2020, yang melibatkan narasumber dari Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan.

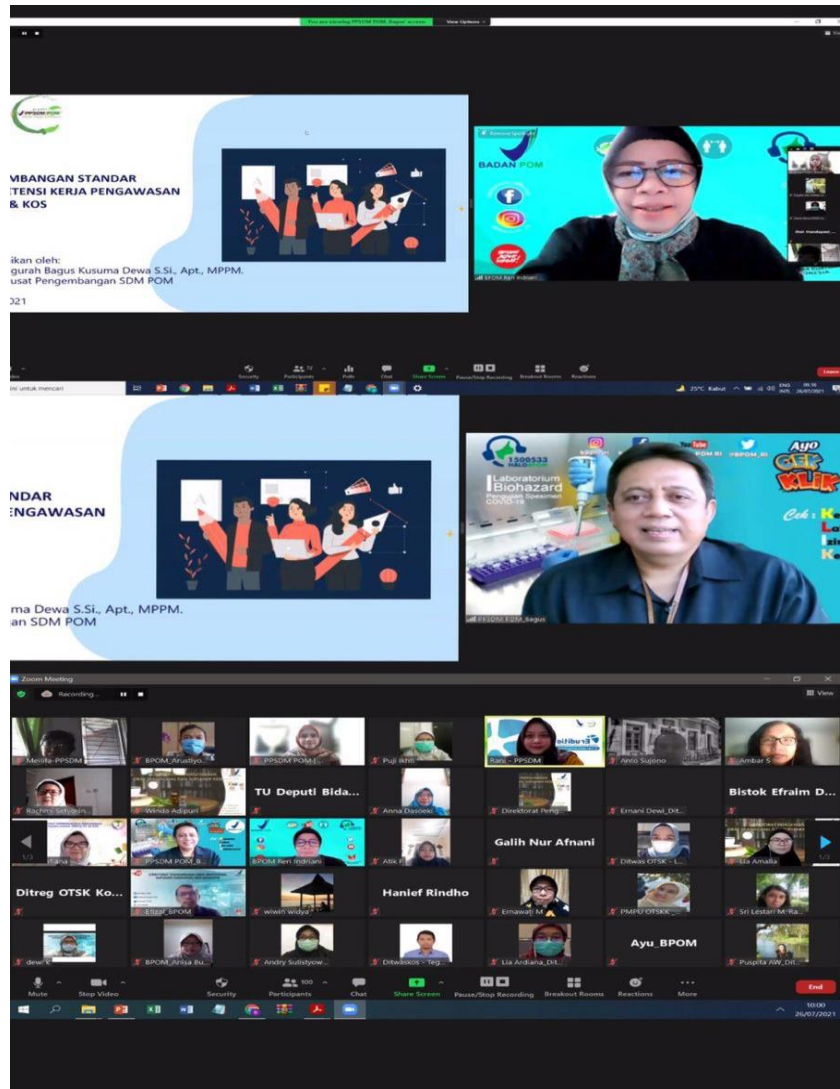




Gambar 26. Finalisasi Tahap lanjut Penyusunan SKKNI Bidang Pengawasan Mutu Obat dan produk Biologi oleh Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program pelatihan Kementerian Tenaga kerja

3. Pada 26 Juli 2021 melakukan pembahasan roadmap penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik akan disusun oleh BPOM yang diwakili oleh Tim Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika sebagai Penyusun dan Verifikator serta Tim PPSDM POM sebagai fasilitator.





Gambar 27. Pembahasan Roadmap Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetika

4. Pada 4-6 Agustus diadakan Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) untuk tim perumus dan tim verifikator guna meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan mengundang narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2021





Gambar 28. Bimtek Penyusunan Standard Kompetensi Teknis Kerja

5. Pada 24 Desember 2021 diadakan di The Westin Jakarta Hotel, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Asih Liza Restanti, Apt, M.Kes ; Tim Verifikator Eksternal Kemnaker RI. Hasil dari pembahasan Lanjutan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah draft Unit Kompetensi yang di review oleh Tim Verifikator Eksternal dari Kemnaker RI.



Gambar 29. Dokumentasi Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK)



Tabel 8. Rancangan Peta Okupasi Pengawasan Obat dalam Kerangka Kualifikasi

LEVEL KKNI	STANDARDISASI	PRODUKSI	REGISTRASI	DISTRIBUSI	PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
IX	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama				
VIII	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya				
VII	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda				
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator kepala (lead Evaluator) Inspektur kepala (Lead Inspector) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator kepala (lead Evaluator) Inspektur kepala (Lead Inspector) Penanggungjawab industri obat, 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator kepala (lead Evaluator) Inspektur kepala (Lead Inspector) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator kepala (lead Evaluator) Inspektur kepala (Lead Inspector) Penanggung jawab fasilitas didistribusi PBF, 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator kepala (lead Evaluator) Inspektur kepala (Lead Inspector) Penanggung jawab laboratorium pengujian obat
VI	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama				
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator senior (senior Evaluator) Inspektur senior (Senior Inspector) 	<ul style="list-style-type: none"> Inspektur obat/ Inspektur bahan baku obat/ Inspektur sarana khusus obat Jenjang menurut PICS: trainee, junior, senior, lead 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator senior (senior Evaluator) Inspektur senior (Senior Inspector) 	<ul style="list-style-type: none"> Inspektur senior (Senior Inspector) Jenjang: inspektur distribusi obat junior, senior, kepala. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator senior (senior Evaluator) Inspektur senior (Senior Inspector) Jenjang: inspektur distribusi obat junior, senior, kepala (iklan dan penandaan) Evaluator Surveillance Mutu Obat (junior, senior, kepala) Inspektur pharmacovigilance (junior, senior, kepala) Evaluator ekspor-impor (junior, senior, kepala) Evaluator produk tembakau (junior, senior, kepala)
V	Pengawas Farmasi Makanan Penyelia				
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator muda (Junior Evaluator) Inspektur muda (Junior Inspector) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator muda (Junior Evaluator) Inspektur muda (Junior Inspector) Pengawas CPOB 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator muda (Junior Evaluator) Inspektur muda (Junior Inspector) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator muda (Junior Evaluator) Inspektur muda (Junior Inspector) Pengawas CDOB 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluator muda (Junior Evaluator) Inspektur muda (Junior Inspector)
IV	Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana Lanjutan				
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Peyusun Standard dan Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Pengawas Farmasi dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Penilai Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Laboratorium,
III	Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana				
		<ul style="list-style-type: none"> Asisten Pemeriksa Sarana Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Asisten Pemeriksa Sarana Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Asisten Pemeriksa Sarana Obat dan Makanan Asisten Penyuluh Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> Asisten Pengujian Laboratorium petugas pengambil contoh
II	<ul style="list-style-type: none"> Laboran. 				



B.5. Sosialisasi dan Menjaring Minat Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif dari K/L maupun Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Pasal 2 ayat 1 berbunyi “Pengawas Farmasi dan Makanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada Instansi Pemerintah”, dimana berdasarkan pasal tersebut Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sudah bersifat terbuka / inklusif, sehingga dapat diampu oleh PNS di lingkungan Instansi Pemerintah di luar Badan POM.

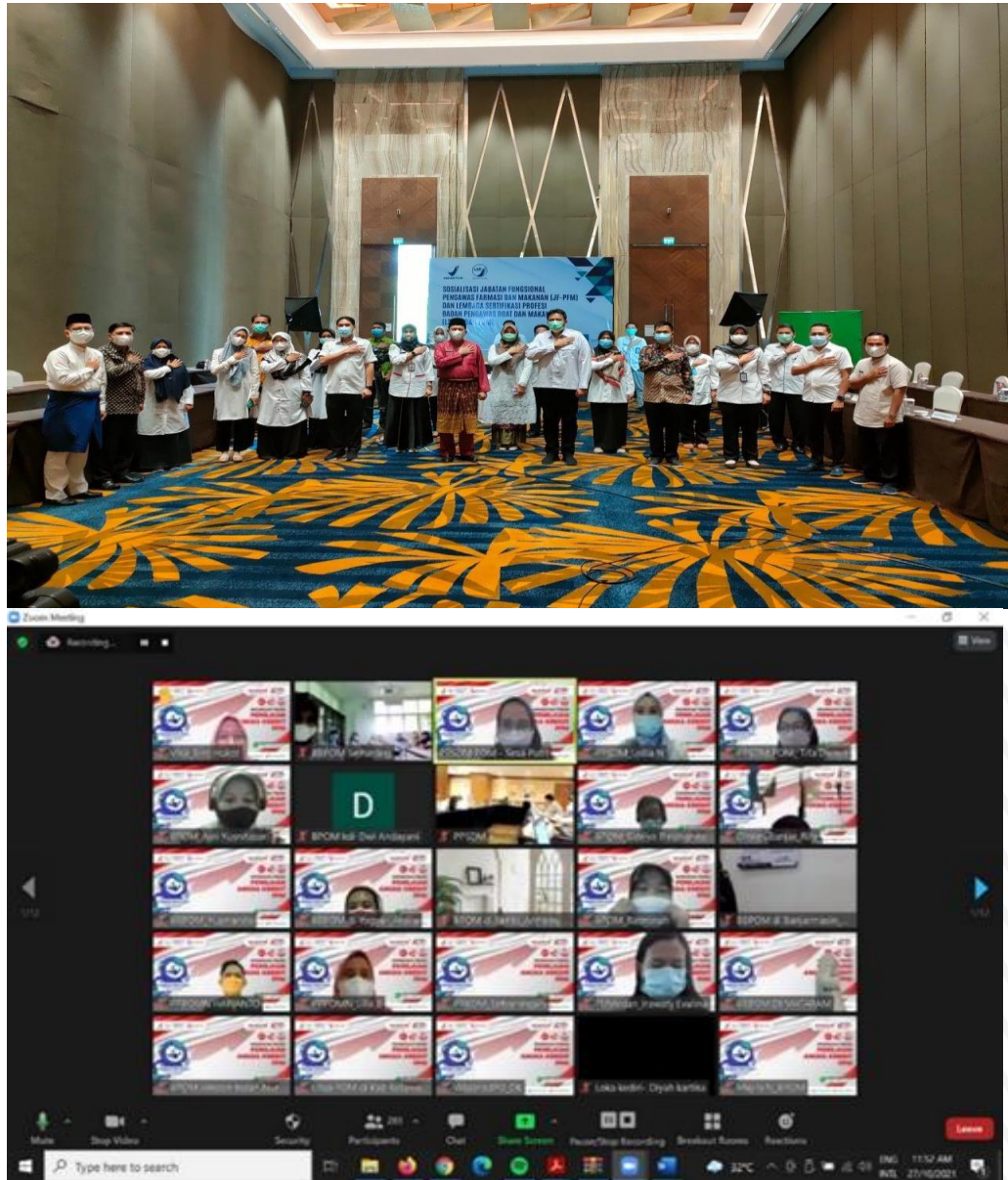
PPSDM sebagai pembina dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan telah melakukan sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada K/L maupun Pemda pada tanggal 09 April 2021 secara luring yang bertempat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM, diikuti oleh perwakilan unit kerja Badan Kepegawaian Daerah / BPSDM / Organisasi Daerah / Dinas Kesehatan / Dinas Ketahanan Pangan / Dinas Pertanian Provinsi / Kabupaten / Kota di sekitar wilayah Kota Pekanbaru.

Selain di kota Pekanbaru, sosialisasi juga telah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Jakarta, dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh perwakilan dari pejabat fungsional PFM yang berasal dari Badan POM, K/L maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Focus Group Discussion tentang review terhadap pelaksanaan PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pada Tahun 2021, sebanyak 8 (delapan) orang dari K/L dan Pemerintah Daerah telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif melalui mekanisme Penyesuaian / Inpassing sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian / Inpassing.



Dan sebanyak 2 (dua) orang dari Pemerintah Daerah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur telah diangkat melalui mekanisme Perpindahan Jabatan.

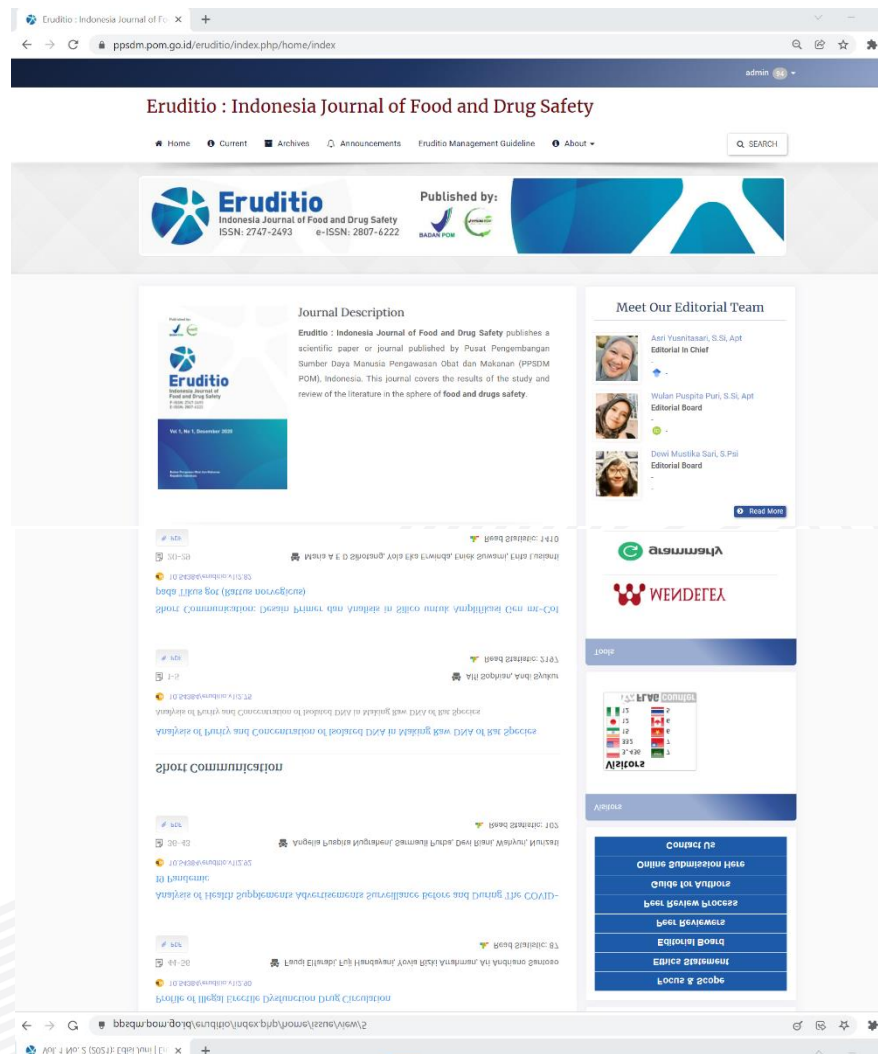


Gambar 30. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Menjaring Minat Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif dari K/L maupun Pemerintah Daerah



B.6. Mengembangkan Jurnal terakreditasi “Eruditio: *Indonesia Journal of Food and Drug Safety*”.

Badan POM menjamin pengembangan profesi para pegawainya termasuk dalam hal pembuatan Karya Tulis Ilmiah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. PPSDM POM berinovasi meluncurkan jurnal ilmiah elektronik dengan nama Eruditio: *Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, yang merupakan jurnal ilmiah elektronik berbasis open journal system (OJS) yang dikelola oleh PPSDM POM. Jurnal ini menjadi wadah kekinian bagi para Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan lainnya di lingkungan Badan POM untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan lebih mudah dan praktis.



Gambar 31. Open Journal System (OJS) Jurnal Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety



Pada tahun 2021 telah diterbitkan masing-masing 6 (enam) artikel pada Eruditio Vol. 1 No. 1 Edisi Desember 2020 dan Eruditio Vol. 1 No. 2 Edisi Juni 2021. Sebagai bentuk persiapan untuk memperoleh akreditasi SINTA, telah dilakukan Bimbingan Teknis OJS, perbaikan tampilan website OJS Eruditio dan pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) yang dimaksudkan untuk memudahkan pertukaran dan integrasi data ke berbagai basis data pengindeks. Saat ini Eruditio sudah memiliki DOI dengan prefix 10.5384 dan semua artikel di Eruditio sudah memiliki DOI.



Gambar 32. Sampul Jurnal Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety Vol. 1 No. 1 Edisi Desember 2020 dan Vol. 1 No. 2 Edisi Juni 2021

Dalam rangka diseminasi informasi mengenai jurnal Eruditio, dilakukan sosialisasi penggunaan Eruditio melalui Sosialisasi Pedoman KTI, Jurnal Eruditio dan *Bridging Competency: Citation, Reference Production dan Plagiarism* dalam Jurnal Farmasi dan Makanan dan Sosialisasi ke beberapa UPT BPOM secara luring maupun daring.



Gambar 33. Sosialisasi Pedoman KTI, Jurnal *Eruditio* dan *Bridging Competency: Citation, Reference Production dan Plagiarisme* dalam Jurnal

B.7. Mengembangkan Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI)

Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan di bidang Obat dan Makanan, dituntut untuk dapat menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk Obat dan Makanan yang beredar. Untuk menjalankan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Pengawas Farmasi dan Makanan Badan POM dituntut untuk bersikap dan bertindak profesional serta memiliki kompetensi yang memadai. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan benar diperlukan wadah atau organisasi untuk Pengawas Farmasi dan Makanan. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu, untuk mengembangkan profesionalitasnya dan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan umum dari sebuah organisasi profesi yaitu: 1) Meningkatkan dan/atau mengembangkan karier anggota. 2) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan anggota. 3) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. 4) Meningkatkan dan/atau mengembangkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan POM sebagai



instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan telah membuat wadah berupa Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.03.21.146 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI) dan berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 13 Maret 2020. Organisasi Profesi yang bernama Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI) sudah melakukan sosialisasi terkait organisasi tersebut pada tanggal 9 Juni 2021 yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan streaming youtube yang dihadiri +/- 1185 orang. Anggota yang telah melakukan pendaftaran dan telah terverifikasi pada aplikasi dengan rincian pendaftar berdasarkan jenjang PFM adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Profesi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PFMI) tahun 2021

Jenjang PFM	Jumlah			Total
	UPT BPOM	Unit Pusat	Unit di Luar BPOM (PFM Inklusif)	
Ahli Utama	0	0	0	0
Ahli Madya	152	95	1	248
Ahli Muda	531	235	0	766
Ahli Pertama	481	201	2	684
Penyelia	69	13	0	82
Mahir	48	10	0	58
Trampil	16	4	0	20
Total	1297	558	3	1858





Gambar 35. Pembukaan Sosialisasi Organisasi Profesi PFMI oleh Sekretaris Utama BPOM



Gambar 34. Penyampaian Pengantar tentang Organisasi PFMI oleh Kepala PPSDM POM





Gambar 36. Paparan tentang Organisasi PFMI oleh Ketua PFMI

B.8. Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Metode pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Angka Kredit

Jabatan fungsional sebagai jabatan yang dapat diduduki oleh Aparatur Sipil Negara yang kariernya dinilai oleh angka kredit. Angka kredit digunakan sebagai tanda melakukan kegiatan jabatan fungsional yang digunakan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Berdasarkan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27), bahwa unit pembina mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada pejabat PFM salah satunya dengan melakukan penilaian angka kredit.

b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan PFM

Pembinaan jabatan fungsional PFM mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020



tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Untuk dapat melaksanakan amanat dalam PermenPAN RB tersebut beserta aturannya, diturunkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pembinaan JF PFM. Petunjuk teknis ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Petunjuk Teknis ditetapkan oleh Badan POM selaku instansi pembina dalam bentuk Keputusan Badan POM.

c. Pengembangan Aplikasi Penilaian Angka Kredit

Sampai saat ini proses penilaian angka kredit masih dengan menggunakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang disampaikan oleh PFM kepada Sekretariat tim Penilai dilengkapi dengan bukti fisik yang berupa dokumen kertas yang jumlahnya sangat banyak dan berat. Dalam proses penilaian tim penilai akan diberikan DUPAK dan bukti fisik tersebut untuk dinilai secara manual. Dalam prosesnya pengiriman dari unit kerja ke sekretariat tim penilai pusat yang ada di Jakarta memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dengan dasar dan latar belakang tersebut, maka diusulkan untuk melakukan pengembangan aplikasi e-dupak PFM untuk mempermudah pengusulan dan penilaian angka kredit pejabat PFM. Pengembangan melibatkan pihak ketiga.

d. Focus Group Discussion

Kegiatan utama dari FGD adalah review terhadap pelaksanaan PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Kendala dalam implementasi PermenPAN RB Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan menjadi bahan rekomendasi kebijakan baru pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.



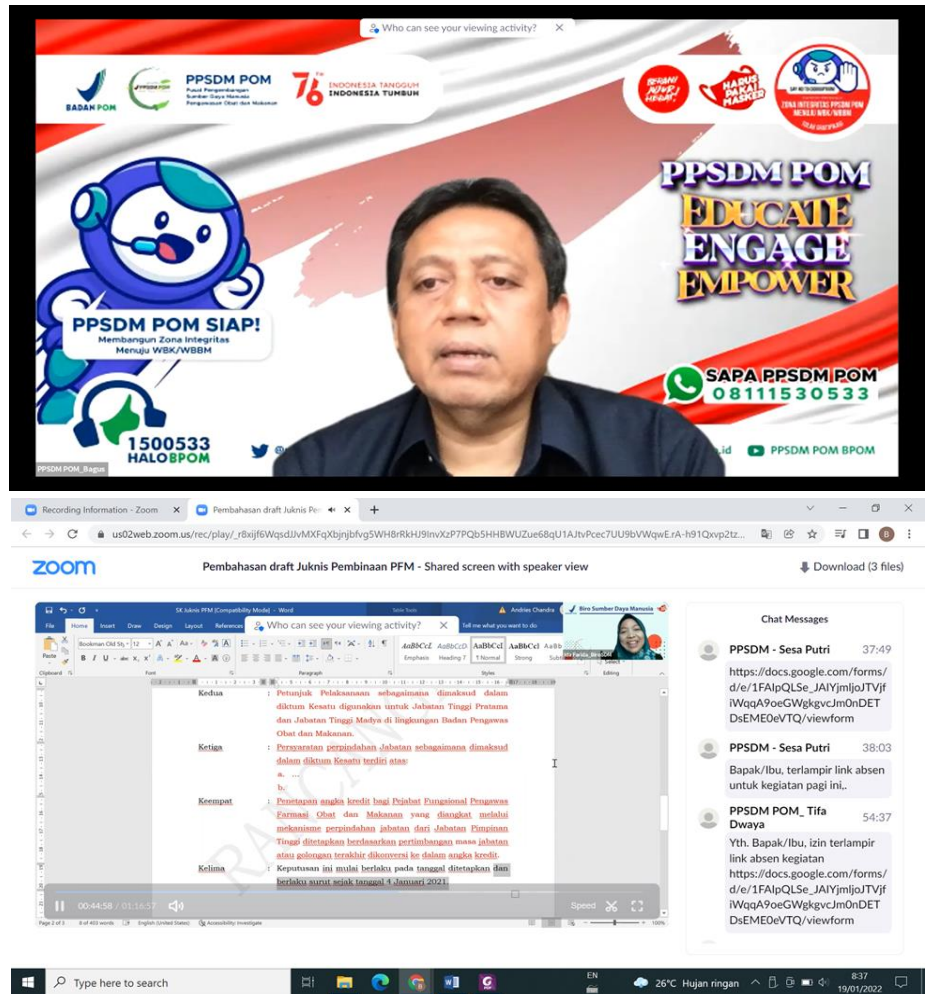
e. Bimbingan Teknis

Pemberian Bimbingan Teknis dilakukan dengan penyampaian materi, diskusi, sosialisasi Jabatan Fungsional sesuai bidangnya, dan simulasi perhitungan angka kredit yang akan menitikberatkan pada permasalahan penilaian sebagai dasar untuk revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.



Gambar 37. Kegiatan Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai Pusat





Gambar 38. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan PFM

**BERITA ACARA
SYSTEM INTEGRATION TEST (SIT)**

Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 melalui Daring (Zoom Meeting), telah dilaksanakan SIT pada Aplikasi Aplikasi Penilaian Angka Kredit PFM yang dihadiri oleh:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan – Fungsi Sistem Informasi
3. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan – Fungsi Perencanaan dan Keamanan TIK
4. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan - Bagian Tata Kelola Data dan Informasi
5. Pengembang Aplikasi

A. Rangkuman Pengujian

Catatan terhadap kemampuan/kekurangan aplikasi pada saat dilakukan SIT

No	Catatan	PIC
1	[Saran] Untuk captcha bisa di ganti dengan warna yang lebih nyata, jangan diberi warna yang samar seperti warna kuning	Pengembang dan Unit
2	[Saran] Tombol next pada review dihilangkan	Pengembang dan Unit

Hasil skoring dan kesimpulan SIT

Kategori	Jumlah	Kesimpulan Untuk Ke tahap selanjutnya
Major	-	Sudah berjalan dengan baik, sehingga dapat dilanjutkan ketahap UAT.
Minor	-	

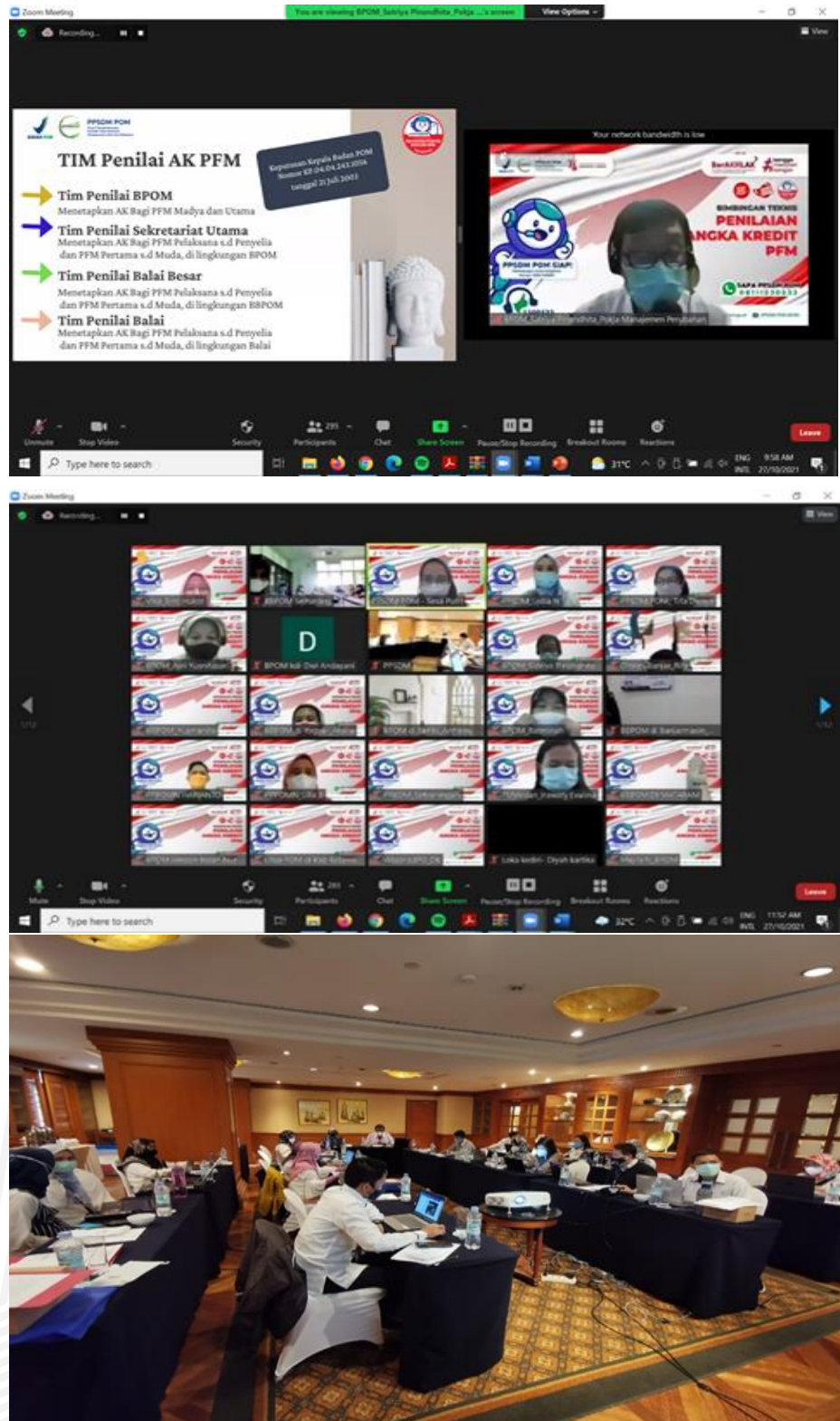
B. Rekomendasi

Berikan kesimpulan terhadap kesiapan sistem untuk diimplementasikan

Kriteria	Ya	Tidak
Sistem dapat diterima	v	
Sistem dapat diimplementasi	v	

Gambar 39. Hasil SIT Pengembangan Aplikasi Penilaian Angka Kredit





Gambar 40. Kegiatan Focus Group Discussion





**Gambar 42. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanggal 18 Oktober 2021,
Balai Besar POM di Padang**



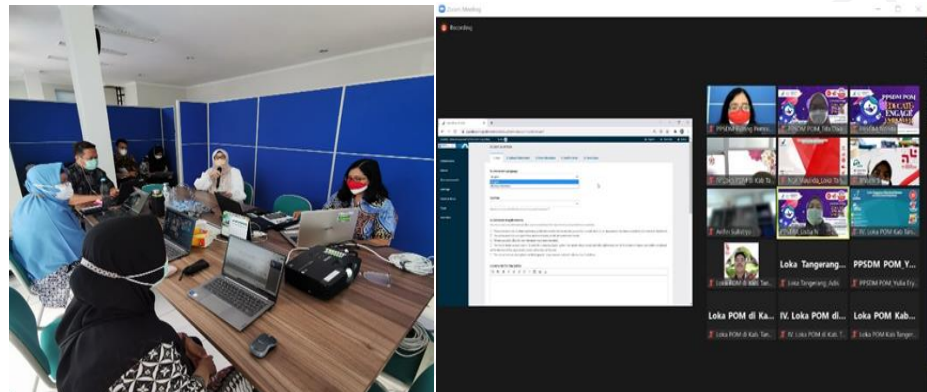
**Gambar 43. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanggal 08 November 2021,
Balai Besar POM di Makassar**



**Gambar 41. Kegiatan Bimbingan Teknis Tanggal 15 November 2021 :
Balai Besar POM di Medan**



Gambar 45. Kegiatan Bimtek Tanggal 15 Desember 2021, Balai Besar POM di Denpasar



Gambar 44. Kegiatan Bimtek Tanggal 24 Desember 2021, Loka POM Tangerang



Gambar 46. Kegiatan Bimtek Tanggal 07 Desember 2021, Balai Besar POM di Bandung



B.9. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior

Pada tahun 2021 pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama sebanyak 113 (seratus tiga belas) peserta dan tenaga District Food Inspector (DFI) Junior diikuti sebanyak 117 (seratus tujuh belas) peserta. Pelatihan dan sertifikasi dilaksanakan sebanyak 4 batch , bertempat di kota Bekasi, Bandung, Surabaya dan Medan. Berdasarkan hasil sertifikasi didapatkan 105 (seratus lima) tenaga PKP dan 110(seratus sepuluh) tenaga DFI yang dinyatakan kompeten.

a. Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama.

Pelatihan Berbasis Kompetensi dan sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama pada Tahun 2021 diselenggarakan secara luring dan diikuti oleh 113 (seratus tiga belas) orang pegawai yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan menjadi penyuluh keamanan pangan di daerah kabupaten/kota.

Tabel 10. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tingkat Pertama Tahun 2021

No	Pelaksanaan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	<i>Batch- 1</i>	Bekasi, 15 sd 17 Maret 2021	29
2	<i>Batch- 2</i>	Bandung, 06 sd 08 April 2021	21
3	<i>Batch-3</i>	Surabaya, 08 sd 10 Juni 2021	37
4	<i>Batch-4</i>	Medan, 28 sd 30 September 2021	26
Jumlah Peserta PKP Pertama Tahun 2021			113

Pelatihan ini menggunakan metode klasikal dengan menggunakan media pembelajaran Sistem Pembelajaran Daring (Si Pandai) dalam hal pengumpulan tugas. Adapun narasumber yang terlibat dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Tahun 2021 berasal dari CKP CBT Centre dan tim Widyaiswara PPSDM POM.



Materi yang diberikan dalam Pelatihan ini yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri. Dengan rincian sebagai berikut:

1. C.100000.028.02

Mendesain Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).

Pada kompetensi ini peserta diberikan materi terkait Identifikasi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Penetapan dan Dokumentasi penerapan persyaratan umum penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) / Good Manufacturing Practices (GMP), Penetapan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Penetapan prosedur monitoring, penetapan koreksi, dan penetapan dokumen rekaman.

2. C.100000.032.01

Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan

Pada kompetensi ini, peserta diberikan materi terkait persiapan rencana pelatihan keamanan pangan, pelatihan keamanan pangan, dan evaluasi pelaksanaan pelatihan keamanan pangan.

3. C.100000.009.01

Menyediakan Informasi Pekerjaan

Pada kompetensi ini, peserta diberikan materi terkait penyediaan dan penerapan informasi sesuai dengan keperluan tempat kerja dan audiens, penanggapi permintaan informasi, serta penggunaan dan pemeliharaan informasi pekerjaan.





Gambar 47. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Bets 1 di Kota Bekasi





Gambar 49. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Batch 2 di Kota Bandung



Gambar 48. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Batch- 3 di Kota Surabaya





Gambar 50. Kegiatan Pelatihan PKP Pertama Batch- 4 di Kota Medan

b. Pelatihan District Food Inspector (DFI) Junior

Pelatihan Berbasis Kompetensi District Food Inspector (DFI) Junior pada Tahun 2021 diikuti oleh 117 (seratus tujuh belas) orang pegawai yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan menjadi inspektur muda keamanan pangan di daerah kabupaten/kota.

Tabel 11. Kegiatan District Food Inspector Junior tahun 2021

NO	Pelaksanaan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Batch- 1	Bekasi, 16 sd 18 Maret 2021	28



NO	Pelaksanaan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
2	<i>Batch- 2</i>	Bandung, 05 sd 07 April 2021	23
3	<i>Batch-3</i>	Surabaya, 07 sd 09 April 2021	37
4	<i>Batch- 4</i>	Medan, 27 sd 29 September 2021	26
Jumlah peserta <i>DFI Junior</i> Tahun 2021			114

Pelatihan ini menggunakan metode klasikal dengan menggunakan media pembelajaran Sistem Pembelajaran Daring (Si Pandai) dalam hal pengumpulan tugas. Adapun narasumber yang terlibat dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi District Food Inspector (DFI) Junior berasal dari Badan POM dan tim Widyaiswara PPSDM POM.

Materi yang diberikan dalam Pelatihan ini yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri, dengan rincian sebagai berikut:

1. Unit Kompetensi Inti

a) C.100000.017.02

Mengelola program audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan

Pada kompetensi ini, peserta diberikan materi terkait Penetapan Program Audit/inspeksi/asesmen Keamanan Pangan; Penerapan Program Audit/inspeksi/asesmen Keamanan Pangan; Pemantauan dan Peninjauan Program Audit/inspeksi/asesmen Keamanan Pangan; serta Peningkatan dan Pengembangan Program Audit/ inspeksi/asesmen Keamanan Pangan



b) C.100000.018.02

Melaksanakan audit/inspeksi/asesmen keamanan pangan

Pada kompetensi ini, peserta diberikan materi terkait Kebijakan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, Label dan Kemasan Pangan; Bahan Tambah Pangan; Inisiasi Audit/inspeksi/asesmen; Pelaksanaan Tinjauan Dokumen; Persiapan Audit/inspeksi/asesmen Lapangan; Pelaksanaan Audit/inspeksi/asesmen Lapangan; Penyiapan, Pengesahan dan Penyampaian Laporan Audit/ inspeksi/asesmen; Penyelesaian Audit/inspeksi/asesmen; serta Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit/inspeksi/asesmen

2. Unit Kompetensi Pilihan:

a) C.100000.021.02

Melakukan inspeksi dan sortasi bahan dan produk

Pada kompetensi ini, peserta diberikan materi terkait Inspeksi Bahan untuk Produksi Pangan dan Penyortiran Bahan untuk Produksi Pangan.

b) C.100000.014.02

Melakukan pengujian organoleptik pada kegiatan inspeksi

Pada kompetensi ini, peserta diberikan materi terkait Penyiapan Pengujian Organoleptik; Penyiapan Contoh/Produk Pengujian; Pengujian Organoleptik pada Kegiatan Inspeksi; serta Penetapan Kesimpulan Hasil Pengujian.





Gambar 51. Kegiatan Pelatihan DFI Junior Batch-1 di Kota Bekasi





Gambar 52. Kegiatan Pelatihan DFI Batch- 2 di Kota Bandung





Gambar 53. Kegiatan Pelatihan DFI Junior Batch- 3 di Kota Surabaya



Gambar 54. Kegiatan Pelatihan DFI Junior Batch- 4 di Kota Medan



C. TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TERKAIT MANAJEMEN PERUBAHAN SESUAI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BADAN POM 2020 – 2024

C.1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan

Perubahan sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024 dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Badan POM Manajemen perubahan dengan target tahun 2021 yaitu 4,30. Hasil penilaian evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) disampaikan di tahun 2022 sehingga hasil capaian dari Sasaran Kegiatan II belum dapat dilaporkan. Sebagai informasi hasil penilaian RB tahun 2020 diberikan oleh KemenPAN RB pada tanggal 31 Maret 2021. Pada laporan ini masih digunakan hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Menpan pada tahun 2020, dengan nilai capaian indeks RB BPOM di tahun 2020 sebesar 83,51 dengan kategori A. Terkait Manajemen Perubahan hal yang sudah baik adalah telah ditetapkan agen perubahan dan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Sebagai apresiasi kinerja agen perubahan telah dilaksanakan Agen Perubahan Award 2020 dan 2021. Adapun rekomendasi Menpan sebagai perbaikan adalah peran agen perubahan khususnya pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum maksimal dan berdampak pada organisasi.

Indeks RB BPOM Pokja Manajemen Perubahan tahun 2020 dihitung berdasarkan nilai aspek pemenuhan dan aspek reform, yaitu dengan nilai aspek pemenuhan sebesar 1,85 dan aspek reform sebesar 2,71 sehingga total indeks adalah 4,56, realisasi capaian nilai reformasi birokrasi Badan POM berdasarkan manajemen perubahan adalah 106,05 % (dengan kriteria BAIK)



D. MENINGKATNYA SDM BADAN POM YANG DIKEMBANGKAN KOMPETENSINYA

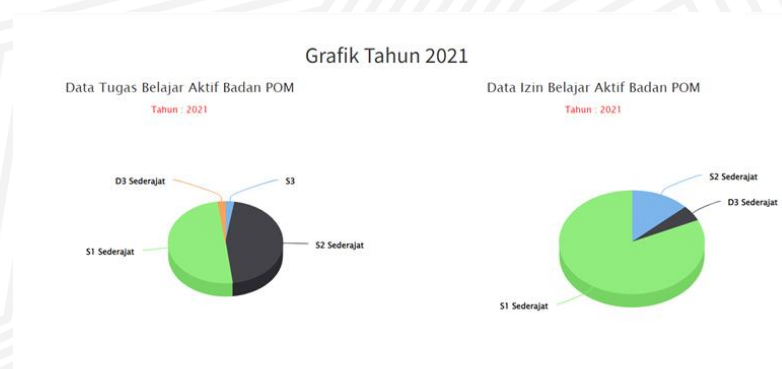
D.1. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.

Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM tahun 2021 adalah 61% dari target 45%, Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial dilaksanakan bagi SDM Badan POM. Pelatihan dilaksanakan secara luar jaringan dan dalam jaringan. Tahun 2021 telah diselenggarakan pelatihan secara mandiri yang tidak terjadwal dengan menggunakan aplikasi IDEAS.

Pelatihan yang diselenggarakan baik secara mandiri oleh PPSDM maupun yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga pelatihan lain sebagai berikut:

a. Pendidikan berkelanjutan

Pengelolaan Peningkatan Kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan. Pada tahun 2021, pegawai Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan, baik melalui Tugas Belajar maupun Ijin Belajar. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang atau 4,93% dari jumlah seluruh pegawai. Dari 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pegawai yang ditingkatkan kompetensinya tersebut sebanyak 5(lima) orang D3, 116(seratus enam belas) S1, 106(seratus enam) Magister dan 6(enam) program doktor.



Gambar 55. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Melalui Pendidikan Lanjutan Selama Tahun 2021



b. Pelatihan Dasar CPNS

Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021 dilaksanakan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan. Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021 kepada 263 peserta, dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 12. Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS selama Tahun 2021

No	Lembaga Pelatihan	Peserta Golongan III	Peserta Golongan II	Jadwal	On Campus 1	Off Campus	On Campus 2
1	Pusdiklat Pegawai Kemendikbud	80	39	14 April s.d 30 Jun 2021	14 April 2021 – 10 Mei 2021	11 Mei 2021 – 23 Juni 2021	24 Juni 2021 – 30 Juni 2021
2	Pusdiklat Kemasetneg Kelas A	15	-	26 Juli s.d 15 Oktober 2021	26 Juli s.d 26 Agustus 2021	27 Agustus s.d 7 Oktober 2021	8 Oktober s.d 15 Oktober 2021
3	Pusdiklat Kemasetneg Kelas B	25	-	26 Juli s.d 26 Oktober 2021	30 Juli s.d 1 September 2021	2 September s.d 15 Oktober 2021	18 Oktober s.d 26 Oktober 2021
4	PPMKP Ciawi (Blended)	-	13	15 Juni s.d 25 Agustus 2021	15 Juni s.d 12 Juli 2021	13 Juli s.d 17 Agustus 2021	18 Agustus s.d 25 Agustus 2021
5	PPMKP Ciawi (Blended)	6	15	2 Juni s.d 11 Agustus 2021	2 Juni s.d 1 Juli 2021	2 Juli s.d 1 Agustus 2021	2 Agustus s.d 11 Agustus 2021
6	Pusbang ASN Ciawi Gol	40	-	12 Jul s.d 30	12 Juli s.d. 6	7 Agustus s.d. 22	23 s.d. 30 September 2021



No	Lembaga Pelatihan	Peserta Golongan III	Peserta Golongan II	Jadwal	On Campus 1	Off Campus	On Campus 2
				Sep 2021	Agustus 2021	September 2021	
7	Pusbang ASN Ciawi	-	30	12 Jul s.d 30 Sep 2021	12 Juli s.d. 6 Agustus 2021	7 Agustus s.d. 22 September 2021	23 s.d. 30 September 2021

Dari 263 peserta yang diikutsertakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021, seluruhnya dinyatakan lulus. Berdasarkan hasil nilai peserta Pelatihan Dasar CPNS, terdapat 20 orang yang mendapat peringkat I s.d III Terbaik pada masing-masing Lembaga pelatihan.

c. Pelatihan Kepemimpinan

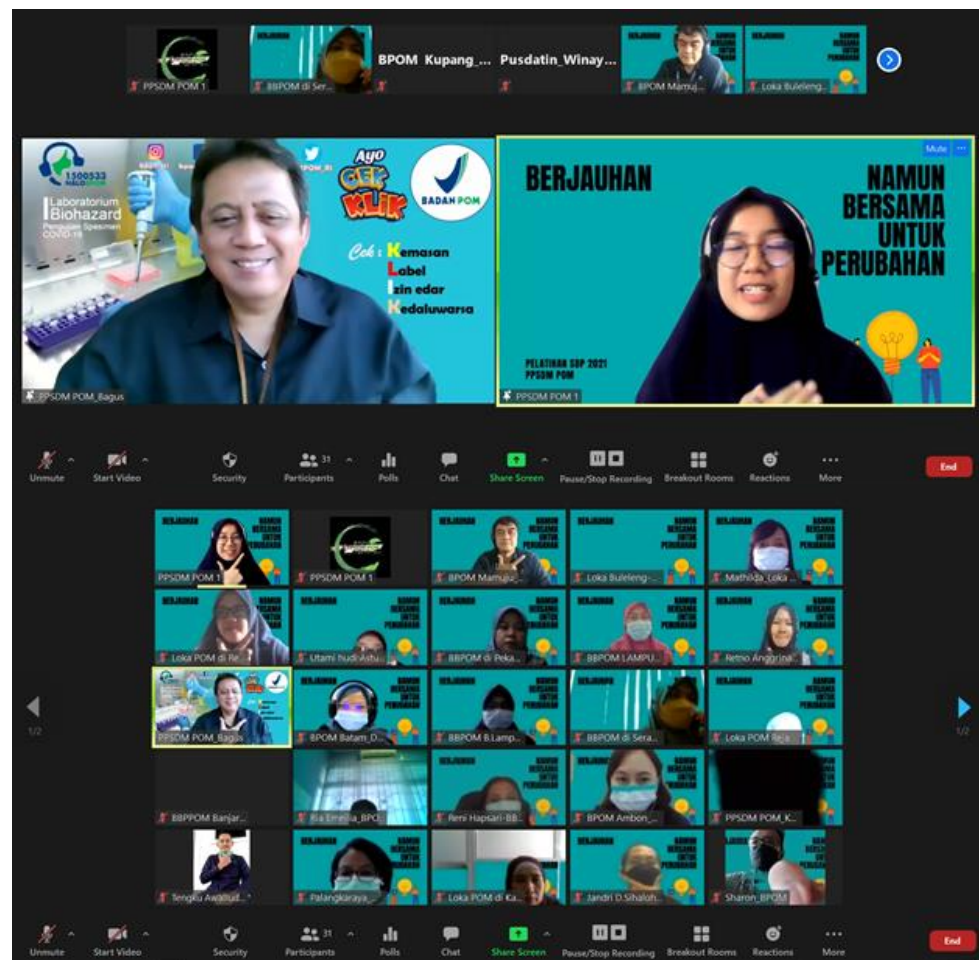
Pelatihan Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Badan POM pada tahun 2021 dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan lain yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan. Jumlah Pejabat Struktural Eselon II yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Struktural Eselon III yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 7 (tujuh) orang.

d. Pelatihan Supervisory Development Program (SDP)

Pelatihan SDP dilaksanakan sebanyak 2 batch. Batch 1 diselenggarakan pada tanggal 21 s.d 25 Juni 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang, dan Pelatihan SDP Batch 2 diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2020 s.d 2 Juli 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang. Pelatihan SDP bertujuan untuk



mengembangkan kompetensi pegawai, khususnya Kompetensi Manajerial untuk level Jabatan Pengawas (Eselon IV) atau Sub Koordinator Fungsi Pekerjaan, dengan target peserta adalah calon Pejabat Pengawas, Pejabat Pengawas, dan/atau Pejabat Fungsional level Ahli Muda yang ditingkatkan Kompetensi Manajerialnya untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan tingkat kesulitan setara Pejabat Pengawas / Sub Koordinator. Pelatihan SDP juga merupakan salah satu program untuk menyiapkan kepemimpinan di Badan POM untuk masa yang akan datang.





Gambar 56. Foto kegiatan Pemberian Materi dan Diskusi dalam Kegiatan Pelatihan SDP 2021

e. Pelatihan Leadership Development Program (LDP)

Pelatihan LDP ditujukan bagi para pimpinan unit yang baru, khususnya Kepala Balai Besar, Kepala Balai, dan Kepala Loka. Pelatihan LDP diselenggarakan pada 19 April s.d 31 Juli 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terbagi dalam 2 kelas, yaitu kelas A dan B. Rangkaian kegiatan terdiri dari penyampaian materi, diskusi interaktif, penyusunan Plan of Action (PoA) yang dilanjutkan dengan pelaksanaan PoA yang telah disusun melalui pendampingan (Coaching dan Mentoring) baik dari pimpinan pembina (para deputy) hingga para expert selaku coach profesional. kegiatan diakhiri dengan penyampaian hasil PoA yang telah dilaksanakan dan diuji oleh pejabat tinggi madya dan dipaparkan langsung dihadapan para peserta lainnya.

f. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan

Pelatihan ini memiliki fokus pelatihan untuk meningkatkan pelayanan dengan menyiapkan diri melakukan continuous improvement dan inovasi baru. Improvement dan inovasi baru tersebut guna mewujudkan pelayanan prima pada unit kerja di lingkungan BPOM. Materi pelatihan meliputi pentingnya training pelayanan publik, grooming yang harus dimiliki petugas pelayanan, memahami

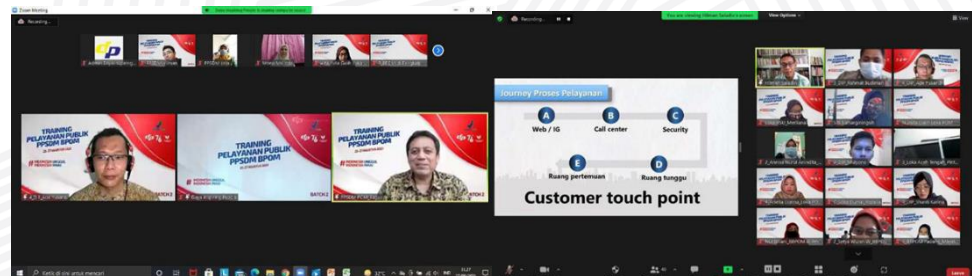


karakter pelanggan dengan menggunakan metode disc, cara menghadapi komplain, service innovation, dan develop strategy. Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan tahun 2021 diselenggarakan dalam 3 batch dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 13. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Tahun 2021

No.	Pelatihan	Waktu	Metode Pelatihan
1	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan <i>Batch 1</i>	28–30 Juli 2021	Daring
2	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan <i>Batch 2</i>	25–27 Agustus 2021	Daring
3	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan <i>Batch 3</i>	7–9 September 2021	Luring

Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Batch 1 diikuti oleh 27 peserta dengan rincian 9 peserta dari Balai Besar POM, 7 peserta dari Balai POM, dan 11 peserta dari Loka POM. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Bets 2 diikuti oleh 34 peserta dengan rincian 1 peserta dari Unit Pusat BPOM, 7 peserta dari Balai Besar POM, 3 peserta dari Balai POM, 23 peserta dari Loka POM. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Batch 3 diikuti oleh 36 peserta Unit Pusat BPOM dengan rincian 7 orang peserta dari Kedeputusan 1, 7 orang peserta dari Kedeputusan 2, 3 orang peserta dari Kedeputusan 3, 3 orang peserta dari Kedeputusan 4, 3 orang peserta dari Biro – Biro, dan 13 orang peserta dari Pusat – Pusat.



Gambar 57. Foto kegiatan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Secara Daring





Gambar 58. Foto kegiatan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan Secara Luring

g. Pelatihan Training Need Analysis (TNA)

Pelatihan ini ditujukan agar para peserta mampu menganalisa kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sasaran organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai, berprestasi dan meningkatkan kontribusi bagi unit kerja dan instansi, meningkatkan kepuasan kerja, lepas dari rutinitas dan kejenuhan suasana kerja yang kurang kondusif, meningkatkan keberanian pegawai untuk menerima tugas-tugas baru dan menantang, mampu menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Program Pelatihan TNA tahun 2021 diselenggarakan dalam 3 batch:

Tabel 14. Kegiatan Pelatihan Training Need Analysis (TNA) tahun 2021

No	Pelatihan	Waktu	Metode pelatihan
1	TNA Batch 1	27 s.d 29 Oktober 2021	Daring
2	TNA Batch 2	1 s.d 3 November 2021	Daring
3	TNA Batch 3	8 s.d 10 November 2021	Luring





Gambar 59. Dokumentasi Kegiatan selama Pelatihan TNA 2021

h. Pelatihan Fungsional non PFM

Diklat Fungsional merupakan jenis diklat PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenjang jabatan fungsional ini terdiri dari diklat fungsional keahlian dan diklat fungsional keterampilan.

Diklat Fungsional dilakukan baik dengan pola Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan mendaftarkan peserta ke Instansi Pembina masing-masing Jabatan Fungsional. Kurikulum diklat mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing. Penyelenggaraan diklat diselenggarakan secara klasikal (tatap muka) baik luring maupun daring. Berikut adalah daftar pelatihan fungsional yang diikuti Badan POM pada tahun 2021:



Tabel 15. Kegiatan Pelatihan Fungsional non PFM Selama Tahun 2021

No	Pelatihan Fungsional	Jumlah Peserta	Pola Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Pembina
1	Analisis Anggaran Ahli Pertama	29 orang	RM	3-5 Maret 2021	Kemenkeu Dirjen Anggaran (<i>Daring</i>)
2	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	2 orang	RM	24 Februari - 30 Maret 2021	Pusbang ASN BKN (<i>Daring</i>)
		2 orang	RM	25 Mei - 28 Juni 2021	
3	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	1 orang	PNBP	7 Juni - 3 September 2021	BPSDM Kemenkumham (<i>Daring</i>)
4	Pranata Humas Ahli Pertama	1 orang	RM	8 Maret - 6 April 2021	Balitbang SDM Kominfo (<i>Daring</i>)
		1 orang	PNBP	3-29 Oktober 2021	
5	Widyaiswara	2 orang	PNBP	Februari - Maret 2021	Kemenkes (<i>Daring</i>)
		1 orang	PNBP	7 Juni - 1 Juli 2021	
6	Penjenjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	2 orang	RM	21 Juni - 22 September 2021	Pusdiklat LKPP (<i>Daring</i>)



No	Pelatihan Fungsional	Jumlah Peserta	Pola Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Instansi Pembina
7	Pembentukan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	16 orang	RM	11-20 Oktober 2021	Pusdiklat LKPP (Daring)
8	Penata Laksana Barang Jengjang Terampil	3 orang	RM	'23 Agustus - 10 September 2021	Kemenkeu Dirjen Kekayaan Negara, Direktur BMN (Daring)
9	Penata Laksana Barang Jengjang Mahir dan Penyelia	3 orang	RM	'8-26 November 2021	Kemenkeu Dirjen Kekayaan Negara, Direktur BMN (Daring)
10	Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis	3 orang	RM	'13-25 September 2021	Kemenkes Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Daring)
11	Perencana Pertama Angkatan 53	24 orang	Swakelola	Nov-21	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (Daring)

i. Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilaksanakan secara daring sebanyak 7 *batch*, yang terdiri dari pembelajaran mandiri, *webinar*, dan tatap muka online. Pembelajaran mandiri dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Si Pandai dan pembelajaran webinar serta tatap muka *online* menggunakan *zoom meeting*. Dalam Pelatihan Fungsional Pengawas farmasi dan Makanan peserta diberikan penugasan berupa PoA secara berkelompok berdasarkan fungsi PFM



dan selanjutnya ditutup dengan presentasi dihadapan coach, mentor, penguji dan rekan rekan seangkatan. Secara terperinci pelatihan Fungsional PFM Tingkat Keahlian tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Kegiatan Pelatihan Fungsional PFM Selama Tahun 2021

Batch	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
I	16 Februari s.d 28 April 2021	40	Lulus 100%
II	16 Februari s.d 26 Maret 2021	40	Lulus 100%
III	19 Maret s.d 16 Juni 2021	30	Lulus 100%
IV	19 Maret s.d 26 Juni 2021	34	Lulus 100%
V	24 Mei s.d 1 Juli 2021	37	Lulus 100%
VI	24 Mei s.d 13 Juli 2021	38	Lulus 100%
VII	5 s.d 30 Juli 2021	35	Lulus 100%
Jumlah Peserta		254	100%

j. Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelatihan Pembentukan PPNS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Penyidik di lingkungan Badan POM. PPSDM POM telah menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan PPNS Batch 1 selama 60 (enam puluh) hari dengan pola 400 jam pelajaran (JP) yang dimulai dari tanggal 25 Mei s.d 23 Juli 2021 dengan metode tatap muka di Diklat Reserse Lemdiklat Polri Megamendung, Bogor. Peserta pelatihan berjumlah 30 (tiga puluh) peserta didik yang berasal dari Unit Kerja Pusat, Balai/Balai Besar POM, dan Loka POM di seluruh Indonesia.



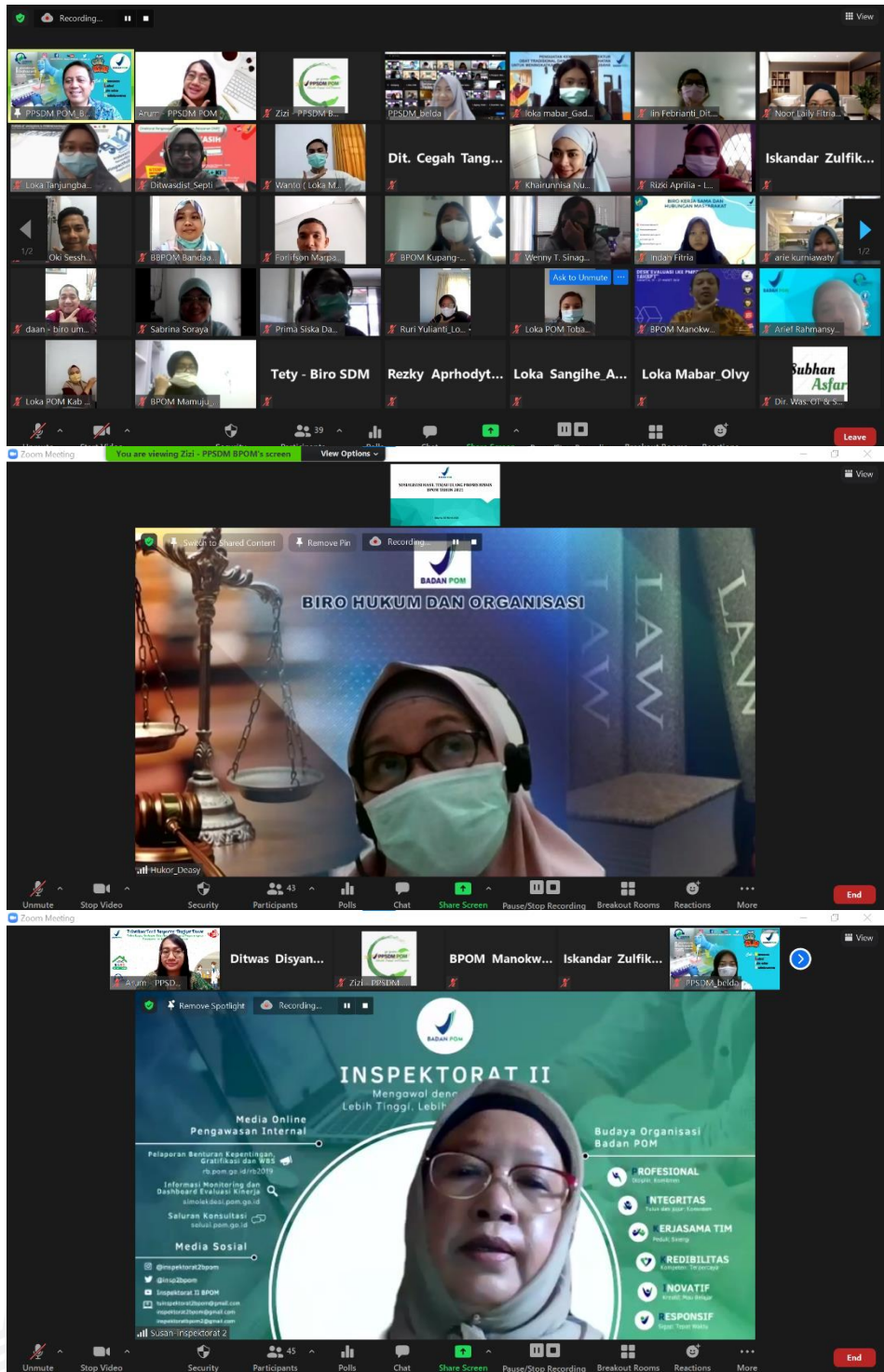


Gambar 60. Kegiatan Pelatihan Pembentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil tahun 2021

k. Pelatihan Auditor Internal

Dalam rangka persiapan audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 tahun 2021. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Standar Persyaratan Kompetensi untuk Laboratorium ISO 17025:2017. Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan PT Tuv Sud sebagai narasumber. Pelatihan ini diselenggarakan dalam 2 Batch. Batch I diselenggarakan pada tanggal 23 - 26 Maret 2021 diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta. Batch II diselenggarakan pada tanggal 27 - 28 Mei 2021 diikuti 10 (sepuluh) peserta. Peserta pelatihan berasal dari seluruh unit kerja di BPOM berdasarkan data auditor dan masukan dari Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat II BPOM.





Gambar 61. Kegiatan Pelatihan Auditor Internal Tahun 2021

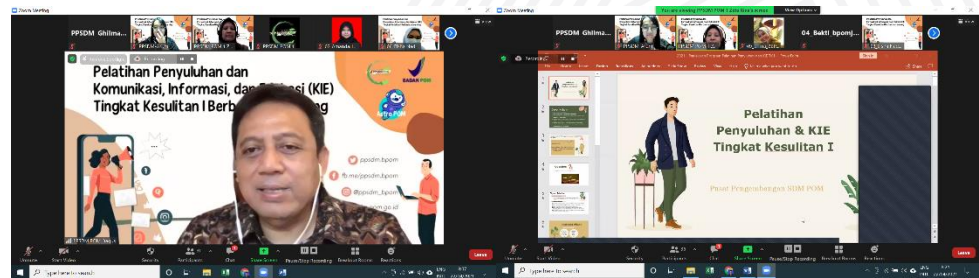
I. PELATIHAN PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) TINGKAT KESULITAN I BERBASIS E-LEARNING

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tingkat pertama, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online*/dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi Si Pandai dan zoom meeting sebanyak 2 batch, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Kegiatan pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tingkat Kesulitan I

Batch	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
I	22 April - 05 Mei 2021	32	Lulus 96,8%
II	06 - 27 Mei 2021	28	Lulus 100%

Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Unit Kerja Pusat di BPOM sebagai narasumber. Peserta berasal dari UPT BPOM di seluruh Indonesia yang telah diseleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.



Gambar 62. Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I



m. Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tingkat Ahli Muda, PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II yang dilaksanakan secara luring. Metode yang digunakan pada pelatihan ini yaitu Hybrid Learning berupa pembelajaran non klasikal dan klasikal. Pembelajaran non klasikal dilaksanakan secara online/dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi Si Pandai, Live Chat Whatsapp Group, dan zoom meeting dengan jadwal sebagai berikut:

Non Klasikal	14 - 15 September 2021
Klasikal	20 - 23 September 2021

Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Unit Kerja Pusat di BPOM sebagai narasumber. Peserta berjumlah 25 (dua puluh lima) berasal dari UPT BPOM di seluruh Indonesia yang telah diseleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.



Gambar 63. Kegiatan pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Tingkat kesulitan II tahun 2021

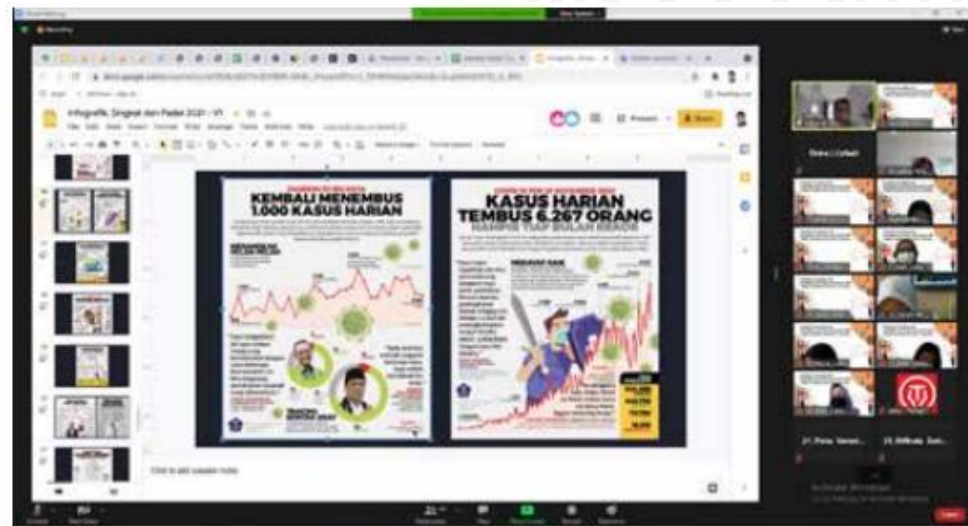


n. Pelatihan Infografis

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), PPSDM POM menyelenggarakan Pelatihan Infografis bagi Peserta Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Berbasis E-Learning dan Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II. Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan PT Tempo sebagai narasumber. Pelatihan ini dilaksanakan secara online/dalam jaringan dengan menggunakan *zoom meeting* sebanyak 3 batch, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan pelatihan Infografis Selama Tahun 2021

Batch	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Peserta
I	28 - 30 April 2021	32
II	19 - 21 Mei 2021	28
III	16 - 20 September 2021	25



Gambar 64. Kegiatan Pelatihan Infografis selama tahun 2021



o. Public Speaking dan Komunikasi yang Efektif

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), PPSDM POM menyelenggarakan Public Speaking dan Komunikasi yang Efektif Bagi Peserta Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan I Berbasis E-Learning dan Pelatihan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II. Pelatihan ini diselenggarakan bekerjasama dengan CV Daya Inspiring People sebagai narasumber. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 3 batch, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Kegiatan Pelatihan Public Speaking dan Komunikasi efektif Selama Tahun 2021

Batch	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Peserta	Metode
I	22 April 2021	32	Zoom Meeting
II	06 Mei 2021	28	Zoom Meeting
III	23 September 2021	25	Tatap Muka

p. Pelatihan TOT DFI dan PKP

Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas Pengawas Pangan di Kabupaten/Kota atau District Food Inspector (DFI) dan tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP), PPSDM POM menyelenggarakan pelatihan *Training of Trainer* (TOT) DFI dan PKP yang diperuntukkan bagi pegawai yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau *trainer* dalam pelatihan DFI *Junior* dan Pelatihan PKP. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online*/dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi Si Pandai dan zoom meeting sebanyak 5 batch, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 21. Kegiatan Pelatihan Pemeriksaan sarana Distribusi Tingkat Kesulitan II selama tahun 2021

Batch	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
I	6 - 15 Oktober 2021	30	Lulus 96,67%
II	27 Oktober - 5 November 2021	30	Lulus 100%

Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Pemeriksaan Sarana Distribusi Tingkat Kesulitan II adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dalam melakukan Pemeriksaan Sarana Distribusi Tingkat Kesulitan II, serta untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Para peserta berasal dari Unit Pelaksana Teknis BPOM di Balai Besar/Balai/Loka POM. Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran hybrid dengan Pembelajaran Daring menggunakan media pembelajaran (Si Pandai) dan aplikasi zoom meeting untuk metode pembelajaran tatap muka online serta pembelajaran luring dilaksanakan di Kota Semarang untuk Batch 1 dan Kota Bandung untuk Batch 2. Adapun Narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari unit kerja teknis internal BPOM.

r. Pelatihan Pelatihan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pelatihan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan diselenggarakan dalam 1 (satu) Batch dilakukan secara daring dengan total 27 JP selama 4 hari pada tanggal 7 – 10 Desember 2021. Para peserta berasal dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di Balai Besar/Balai/Loka POM.



Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran Sistem Pembelajaran Daring (Si Pandai) dan aplikasi zoom meeting untuk metode pembelajaran tatap muka online. Adapun Narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari expert di luar Badan POM, yaitu PUSDIKLAT APU PPT PPATK, KPK, BNN, Praktisi Hukum, dan Kejaksaan Agung. Dari 40 (empat puluh) peserta Pelatihan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, didapatkan 40 peserta yang dinyatakan lulus (tingkat kelulusan 100%).

s. Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan DIP TK I

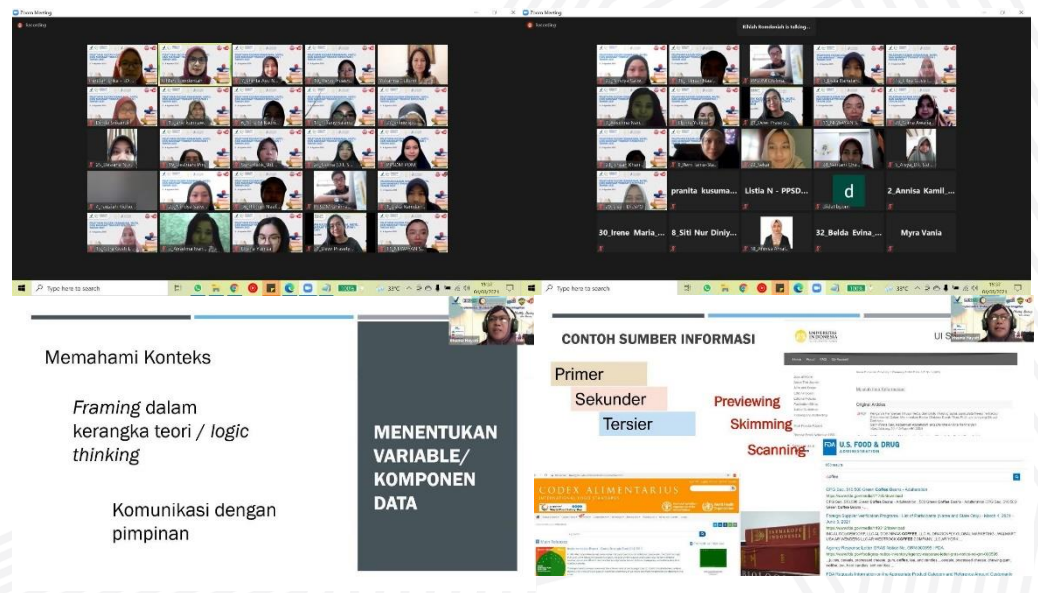
Pelatihan Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I diselenggarakan dalam 1 (satu) Batch dilakukan secara daring dengan total 32 JP selama 5 hari pada tanggal 27 September s.d 1 Oktober 2021. Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I Tahun 2021 meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dalam melakukan penilaian produk kosmetik; meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dalam melakukan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP); dan pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja, serta untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Para peserta berasal dari Unit Pelaksana Teknis BPOM di Balai Besar/Balai/Loka POM. Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran Sistem Pembelajaran Daring (Si Pandai) dan aplikasi *zoom meeting* untuk metode pembelajaran tatap muka *online*.

Adapun Narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari unit kerja teknis dan *expert* di luar Badan POM dengan 43 (empat puluh tiga) peserta Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk (DIP) Tingkat Kesulitan I Tahun 2021 dan didapatkan 43 peserta yang dinyatakan lulus (100%).



t. Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tk. I

Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tk. I diselenggarakan dari tanggal 2 s.d 6 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan PPSDM POM. Total peserta pelatihan adalah sebanyak 36 orang yang merupakan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli fungsi standarisasi dan yang ada di unit kerja pusat, serta diikuti oleh 4 orang Widyaiswara PPSDM POM. Narasumber yang terlibat dalam pelatihan ini yaitu berasal dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan internal BPOM. Evaluasi yang digunakan pada Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat Tingkat Kesulitan I Tahun 2021 yaitu evaluasi level 1 (Evaluasi terhadap penyelenggara dan narasumber), evaluasi level 2 (Evaluasi terhadap capaian akademik) hingga evaluasi level 3 (Evaluasi terhadap perubahan sikap kerja). Hasil evaluasi level 1, dengan menggunakan skala likert memperoleh nilai 4,42 dari 5, sedangkan evaluasi level 2, yang dilakukan terhadap capaian akademik peserta pelatihan, seluruh peserta dinyatakan lulus.



Gambar 65. Kegiatan Pelatihan Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat

u. Pelatihan Penanganan Kasus di Bidang Obat dan Makanan

Pelatihan Penanganan Kasus di Bidang Obat dan Makanan dilaksanakan berdasarkan kerjasama PPSDM POM dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari atau 24 jam pelajaran dari tanggal 8 s.d 9 Desember 2021 dengan metode hybrid (luring dan daring). Tujuan dari Pelatihan ini yaitu meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan penyegaran kembali bagi anggota PPNS BPOM dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik dalam pelanggaran Peraturan yang berkaitan dengan peredaran Obat dan Makanan, dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan penyegaran kembali bagi anggota PPNS BPOM dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik dalam pelanggaran Peraturan yang berkaitan dengan peredaran Obat-obatan dan Makanan. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) peserta didik, yang terdiri dari 27 peserta mengikuti secara luring dan 40 peserta mengikuti secara daring. Peserta pelatihan berasal dari Unit Kerja Pusat, Balai/Balai POM, dan Loka POM di seluruh Indonesia. Materi yang diberikan diantaranya Peningkatan Kemampuan dan Teknik Metode Penyidikan oleh PPNS, Strategi atas Permasalahan Penegakan Hukum di Lingkungan BPOM, Implementasi dan Implikasi Strategi Pemeriksaan Penyidikan, Efektivitas Proses Justisia dalam Konteks Regulasi BPOM, Kiat-kiat sebagai Ahli Perkara di Lingkup BPOM, dan Langkah-langkah Proses Pulbaket dan Strategi Pemeriksaan di Lingkup BPOM.



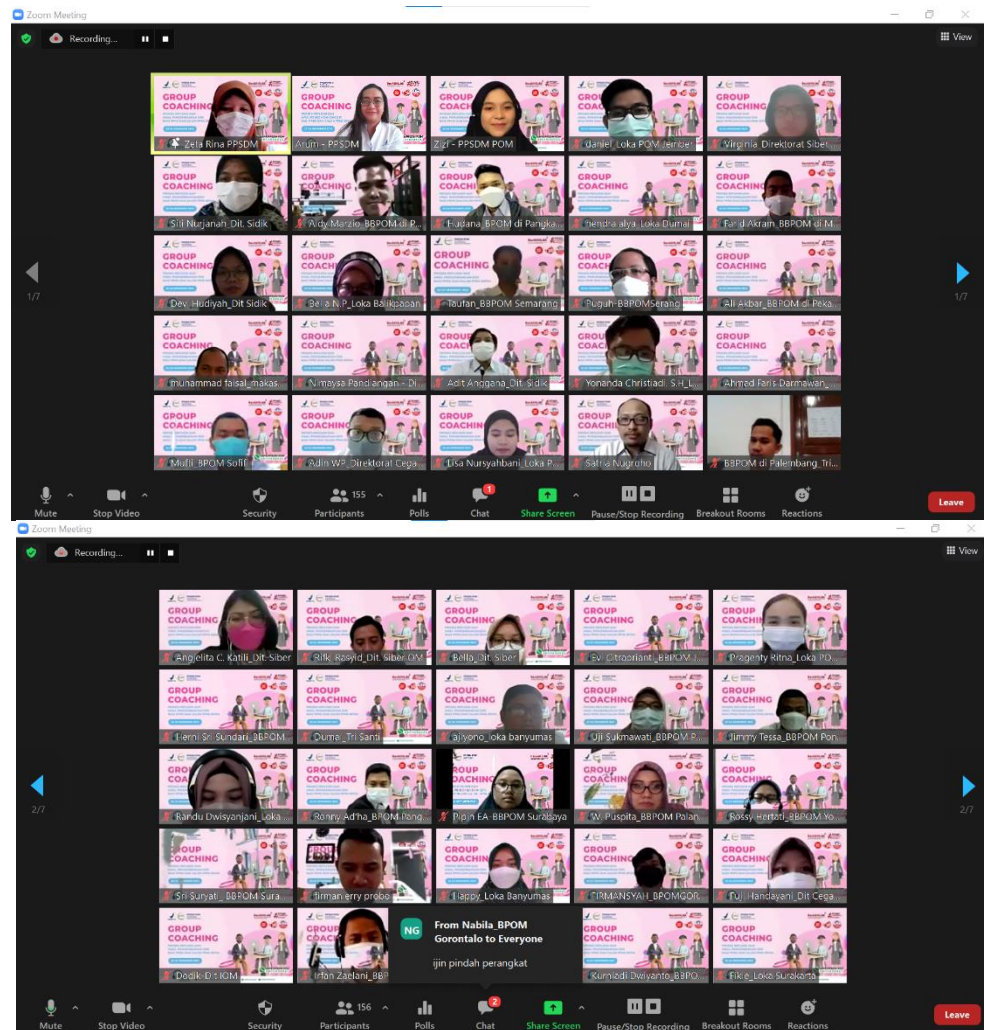
Gambar 66. Kegiatan Pelatihan Penangan Kasus di Bidang Obat dan Makanan tahun 2021



v. Group Coaching Proses Refleksi dan Awal Pengembangan Diri bagi PPNS dan Calon PPNS BPOM

Menindaklanjuti arahan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PB202131038 pada tanggal 23 November 2021 perihal Laporan Hasil Penilaian Potensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan SDM POM Nomor PB.01.04.9.91.11.21.572 dan sebagai upaya penguatan kapasitas PPNS BPOM, maka PPSDM POM akan menindaklanjuti hal tersebut dengan pelatihan *soft skills* yang mengedepankan materi-materi terkait *Leadership* dan *Decision Making*. Oleh karena itu, pada tanggal 22-24 Desember 2021, PPSDM POM menyelenggarakan Sosialisasi dan *Group Coaching* Proses Refleksi dan Awal Pengembangan Diri bagi PPNS dan Calon PPNS BPOM. Kegiatan ini diawali dengan Sosialisasi Kegiatan *Group Coaching* Proses Refleksi dan Awal Pengembangan Diri yang dapat diikuti oleh seluruh Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan Fungsi Penyidikan. Materi yang disampaikan adalah Gambaran Umum Hasil Talent Mapping dan Pemanfaatannya serta *Ground Rules Group Coaching* dengan *tools Points of You*. Kemudian dilanjutkan *Group Coaching* Proses Refleksi dan Awal Pengembangan Diri bagi PPNS dan Calon PPNS BPOM dilaksanakan pada tanggal 23-24 Desember 2021 yang diikuti oleh 144 peserta 1 grup terdiri dari 3 orang *coachee* dan 1 orang *coach*, secara umum kegiatan berlangsung lancar dan kesan positif.





Gambar 67. Kegiatan Group Coaching Proses Refleksi dan Awal Pengembangan Diri PPNS dan Calon PPNS BPOM

w. Pelatihan Certified Assessor

Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi. Asesor kompetensi merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu. Untuk dapat menjadi seorang asesor, pegawai terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan selama 40 jam pelajaran dan dilanjutkan dengan uji kompetensi oleh Master Asesor dari BNSP. Jika dinyatakan lulus, maka pegawai tersebut akan mendapatkan sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan asesor kompetensi di Badan POM.



Berikut daftar pelaksanaan pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi tahun 2021:

Tabel 22. Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi Tahun 2021

Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Penyedia
Maret 2021	1 orang	Telkom
1-5 November 2021	3 orang	LSP K3 Nasional

x. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa SDM Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa, sesuai pasal 88 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023. Berikut daftar pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar tahun 2021:

Tabel 23. Kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Tingkat Dasar tahun 2021

Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Penyedia
15-18 Februari 2021	2 orang	Puspin
15-18 Maret 2021	2 orang	Puspin
15-30 November 2021	40 orang	LPKN



D.2. Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti

Pengembangan kompetensi yang berkualitas dapat dilakukan bekerjasama dengan institusi pendidikan, lembaga diklat dan instansi pembina pejabat fungsional. Tahun 2021 ditargetkan akan ada 12 kerjasama yang ditindaklanjuti oleh PPSDM dan capaiannya adalah 12 Kerjasama(KS) (100%). 12 Kerjasama tersebut antara lain dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, ANRI, BKN, Unpad, PPAK, PPMKP, Wisconsin, Kemendikbud, Sekretariat Negara, dan Polri.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, PPSDM POM harus membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi. Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk penyelenggaraan peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal dan kerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi SDM Badan POM. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kuota dari masing-masing Lembaga pelatihan, maka saat ini belum seluruh Pejabat Struktural Badan POM memperoleh kesempatan pelatihan kepemimpinan, sedangkan pada saat diterapkannya sistem merit di Badan POM, maka syarat pelatihan kepemimpinan harus terpenuhi. Tahun 2021 ini, telah diselenggarakan kerjasama internasional dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri berupa penyelenggaraan webinar di bidang Pangan.

E. MENINGKATNYA KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

E.1. Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan level 1 digunakan untuk mengetahui kualitas pelatihan menurut peserta, evaluasi tersebut adalah kesiapan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas, lingkungan dan Suasana Lingkungan dalam Mendukung Proses Pembelajaran, ketepatan Waktu Pelaksanaan, kesesuaian Pelaksanaan dengan Tujuan, Pelayanan yang diberikan Panitia terhadap Peserta dan Kualitas Materi dari awal sampai dengan akhir. Target tahun 2021, nilai kepuasan penyelenggaraan pelatihan adalah 4.50 (dari nilai maksimal 5), dan tercapai 4,65.



E.2. Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi

Sebagaimana mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2021, Target IKK Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi adalah sebesar 91% dengan periode pelaporan akhir tahun. Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan PPSDM POM Badan POM, diperoleh hasil sebesar 99% SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka capaian indikator tersebut adalah 108,79% dengan kategori capaian kinerja “BAIK”.

F. TERLAKSANANYA RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN POM TERKAIT MANAJEMEN PERUBAHAN SESUAI ROAD MAP

Target persentase terlaksananya rencana aksi reformasi birokrasi BPOM terkait manajemen perubahan tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai target dan bila dibandingkan di tahun 2020 pelaksanaannya melampaui target dimana rencana 86 % dan realisasi 96 % sehingga capaian kinerja 111,63 %. Untuk itu perlu direncanakan rancangan strategis agar nilai ini berkesinambungan atau meningkat capaian tiap tahun.

Tabel 24. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021

RENCANA AKSI 2021	URAIAN RENCANA AKSI	Realisasi %
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BPOM	Evaluasi Anggota Tim RB BPOM Th 2020 dan Pembentukan kembali Tim RB BPOM 2021, menyesuaikan struktur baru BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM	100
Survei Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM	Survei implementasi RB untuk mengetahui indeks persepsi pegawai terhadap pelaksanaan RB di BPOM dan Unit Kerja, dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dengan target survei kepada seluruh pegawai BPOM	100



RENCANA AKSI 2021	URAIAN RENCANA AKSI	Realisasi %
Pembangunan <i>Transformational Leadership</i> BPOM	Pembangunan <i>Transformational Leadership</i> BPOM melalui program pengembangan kompetensi pemimpin perubahan pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM	100
Perencanaan dan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> Perubahan BPOM (wajib dan mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan penyusunan <i>Quick Wins</i> BPOM melibatkan seluruh unit kerja - Penetapan <i>Quick Wins</i> BPOM melalui SK Kepala BPOM - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi <i>Quick Wins</i> BPOM, dilakukan setiap triwulan dan akhir tahun pelaksanaan <i>Quick Wins</i> 	75
Pemantauan, Monitoring, Evaluasi implementasi RB, dilakukan secara online maupun offline	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Implementasi aplikasi E-Monev RB BPOM - Monitoring dan evaluasi RB BPOM, dilakukan setiap triwulan selama tahun 2021 secara <i>online</i> dan/atau <i>offline</i> 	75
Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi RB, terintegrasi dan selaras dengan Rencana Strategis Organisasi BPOM	Penyusunan rencana aksi RB di BPOM tahun 2021 berdasarkan Roadmap RB BPOM 2020-2024 dengan melibatkan stakeholders terkait	100
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPOM	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong unit kerja untuk melaksanakan pembangunan ZI di lingkungan BPOM - Monev pelaksanaan Implementasi rencana aksi pembangunan ZI di tiap unit kerja BPOM setiap triwulan 	75



RENCANA AKSI 2021	URAIAN RENCANA AKSI	Realisasi %
Mendorong unit kerja membudayakan nilai integritas kepada semua pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pemimpin perubahan sebagai role model dalam implementasi budaya integritas di BPOM - Bersama dengan Agen Perubahan BPOM pada setiap unit kerja melaksanakan rencana aksi untuk mendukung internalisasi budaya integritas kepada semua pegawai BPOM 	100
Pengelolaan Agen Perubahan Birokrasi BPOM melalui pengembangan kompetensi dan pengawalan rencana aksi Agen Perubahan Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kompetensi Agen perubahan BPOM melalui pelatihan dan/atau pendampingan pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan BPOM - Monev rencana aksi Agen Perubahan BPOM dilakukan secara berkala melalui aplikasi e-Monev RB BPOM 	100
Rencana Aksi Perubahan wajib bagi Tim Agen Perubahan Birokrasi Unit Kerja : "Penguatan Nilai Integritas dan Anti Korupsi"	Kewajiban salah satu rencana aksi Agen Perubahan BPOM adalah mendukung penguatan nilai integritas dan anti korupsi	75
Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi kepada Pegawai BPOM	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi rencana aksi RB BPOM kepada seluruh SDM di Lingkungan BPOM melalui berbagai kegiatan dan media - Sosialisasi rencana aksi RB BPOM kepada seluruh SDM di Lingkungan BPOM melalui rencana aksi agen perubahan BPOM 	65
Sosialisasi dan Internalisasi perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> pegawai untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan revolusi industri 4.0	Sosialisasi dan Internalisasi melalui webinar dengan tema perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> pegawai untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan revolusi industri 4.0	66,7



RENCANA AKSI 2021	URAIAN RENCANA AKSI	Realisasi %
Pembangunan ekosistem inovasi dan budaya <i>sharing knowledge</i> melalui penerapan Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPONI BPOM)	Pemanfaatan aplikasi SIMPONI BPOM dalam implementasi manajemen pengetahuan mendukung RB BPOM	91,67
Pembangunan digital mindset pegawai BPOM	- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan bagi pegawai BPOM, termasuk kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penilaian kompetensi pegawai	91,67

Kelompok Kerja Manajemen Perubahan mewujudkan Kepemimpinan Perubahan melalui peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan yang sistematis yang dimulai dari pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dengan:

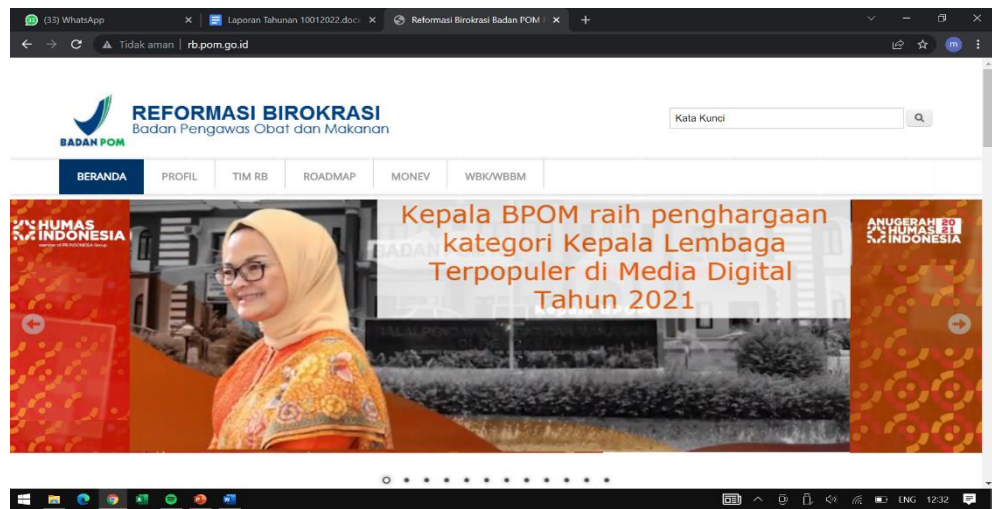
1. Pembentukan Tim RB BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.11.21.435 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BPOM.
2. Pembentukan Tim RB dan Penyusunan rencana kerja RB pada enam Unit Eselon I BPOM, 28 Unit Eselon II Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM

F.1. Road Map Reformasi Birokrasi

1. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.07.21.314 Tahun 2021 tentang Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;



- Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.21.126 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021;
- Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HK.02.02.2.82.04.21.100 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021; dan
- Pengelolaan, pengembangan dan pemutakhiran data pada subsite Reformasi Birokrasi BPOM (rb.pom.go.id) sebagai salah satu media informasi dalam rangka internalisasi RB yang dapat menjangkau unit kerja dan pegawai di lingkungan BPOM secara menyeluruh.



Gambar 68. Subsite Reformasi Birokrasi BPOM tahun 2021

F.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

- Implementasi subsite e-monevrb.pom.go.id



Gambar 69. Subsite e-monevrb.pom.go.id

Tahun 2020 Badan POM melakukan pembangunan aplikasi e-monev Reformasi Birokrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Agen Perubahan. Aplikasi ini mulai digunakan pada tahun 2021.

2. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi dilakukan setiap triwulan untuk memantau kemajuan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dapat diakses melalui subsite rb.pom.go.id.
3. Dilakukan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan BPOM pada tanggal 2 s.d 3 September 2021 Sebagai Tindak Lanjut Capacity Building Agen Perubahan Tahun 2021.
4. Seluruh tahapan PMPRB di Lingkungan Badan POM telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Seluruh perencanaan dituangkan dalam Keputusan Inspektur Utama No. HK.02.02.7.72.02.21.04 tentang Road Map PMPRB Badan POM Tahun 2021.

Seluruh Tahapan PMPRB tahun 2021 direncanakan mulai bulan Januari 2021 dengan mengakomodir seluruh tahapan dalam PMPRB dengan dilengkapi target waktu dan output. Aktivitas yang direncanakan antara lain meliputi

1. Pelaksanaan Survei SHPRB (IPP dan IPAK) dan SIO-SIJ (sesuai Roadmap SIO SIJ)
2. Penyusunan SE PMPRB Badan POM
3. Persiapan Tim PMPRB Badan POM (Sosialisasi)
4. Pengisian LKE PMPRB dan Penilaian Asesor
5. Reviu oleh Koordinator Asesor
6. Konsensus
7. Submit PMPRB



F.3. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

1. Pengelolaan agen perubahan:

a. AoC Awards 2021/Agen Perubahan Awards 2021

AOC Awards sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi BPOM selama tahun 2020. Ditetapkan 5 terbaik Tim Agen Perubahan Unit Kerja Pusat dan 5 Terbaik Tim Agen Perubahan Balai/ Balai Besar POM yang mendapatkan penghargaan Agen Perubahan Awards 2021.

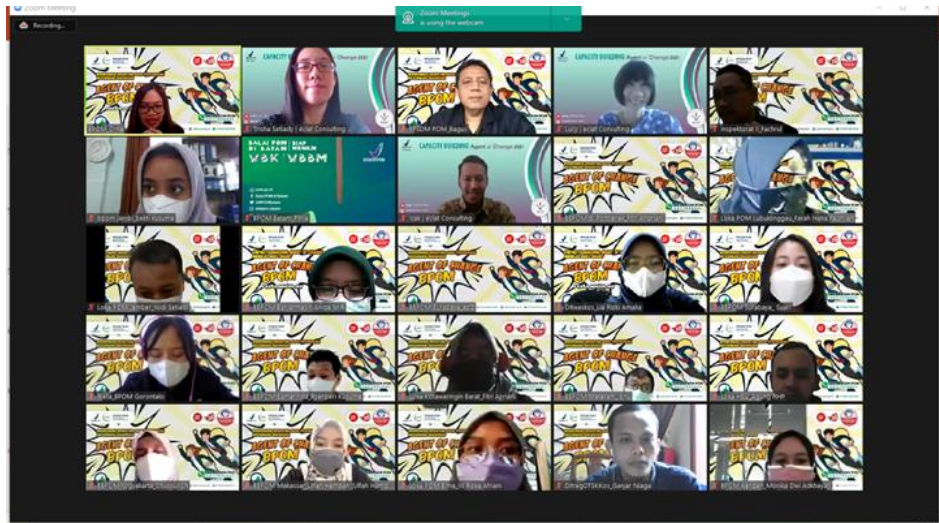


Gambar 70. Kegiatan Presentasi 5 Tim Agen Perubahan Terbaik BPOM 2021

b. *Capacity Building* dan Rencana Aksi AoC 2021

Sebagai salah satu bentuk peningkatan kompetensi Agen Perubahan, pada tanggal 9 s.d 13 Agustus 2021 telah dilaksanakan *Capacity Building* Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Serta Monitoring Rencana Aksi Melalui Aplikasi E-Monev RB Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2021. Kegiatan diikuti oleh 193 perwakilan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dari Unit Kerja Pusat, Balai/ Balai Besar POM, dan Loka POM.





Gambar 72. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Agen Perubahan 2021

Selain itu, dilakukan juga Pelatihan *Competency Upskilling Agile Agent of Change* yang dilaksanakan selama 4 hari pada 15 s.d 19 November 2021 yang diikuti oleh 198 *Agile Agent*.



Gambar 71. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Agile Agent 2021

c. Pelaksanaan Rencana Aksi AoC 2021

Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi masing-masing unit kerja menyusun Rencana Aksi Agen Perubahan Birokrasi tahun 2021, dengan jumlah Rencana Aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi minimal sejumlah anggota Tim Agen



Perubahan Reformasi Birokrasi (1 Agen Perubahan = 1 Rencana Aksi Perubahan). Monev rutin setiap Bulan. Dalam masa pelaksanaan rencana aksinya juga dilakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan komitmen dan kekompakan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan POM, antara lain melalui pembentukan forum komunikasi Agen Perubahan, pembinaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan POM.

d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan *Agent of Change*

Telah dilakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana Aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi setiap bulan untuk memastikan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan POM telah melaksanakan tugasnya dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dengan baik. *Monitoring* dan evaluasi rencana aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan POM juga dilakukan secara *online* melalui <http://siasn.pom.go.id> dan selanjutnya nanti pada tahun 2021 akan dikembangkan [e.monev rb.pom.go.id](http://e.monev.rb.pom.go.id).

e. Sosialisasi *Core Values* ASN: BerAKHLAK

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman agen perubahan dan pemimpin perubahan dan diharapkan agen perubahan BPOM baik di pusat maupun di daerah memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan, PPSDM POM telah melakukan sosialisasi *Core Value* ASN: BerAKHLAK dalam beberapa kegiatan diantaranya:



Tabel 25. Kegiatan tentang Core Value ASN BerAKHLAK tahun 2021

No.	Judul Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Peserta	Narasumber
1.	<i>Capacity Building Agile Agent</i>	16 November 2021	Perwakilan Agen perubahan BPOM seluruh Indonesia	Drs. Teguh Widjinarko, MPA, Staf Ahli Budaya Kerja Kementerian PANRB
2.	Peningkatan Peran dan Kompetensi Pemimpin Perubahan	15 Desember 2021	Seluruh pimpinan unit kerja sebagai pemimpin perubahan pada masing-masing unit di seluruh Indonesia	Dra. Damayani Tyastianti, M.Q.M, Asisten Deputi Integritas dan Evaluasi Sistem Merit SDM Aparatur Kementerian PANRB

f. Survei Persepsi Pegawai

Untuk mengawal upaya perubahan mind set dan culture set pegawai BPOM melalui peningkatan pemahaman pegawai terkait Reformasi Birokrasi dan Internalisasi Budaya Organisasi, serta dalam usaha pembangunan Zona Integritas di BPOM dilakukan survei Persepsi Pegawai terhadap Implementasi RB dan Budaya Organisasi yang dilaksanakan pada Januari dan Juli 2021. Sebanyak 5.821 pegawai BPOM (ASN dan non ASN) telah mengisi survei bulan Juli 2021, dengan hasil Indeks Persepsi Pegawai terhadap Pelaksanaan RB BPOM adalah 3,509 (skala 0-4), sedangkan Indeks Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Budaya Organisasi adalah 3,468 (skala 0-4).



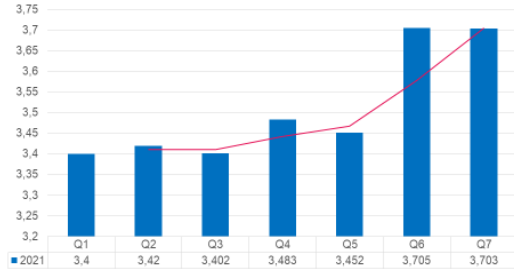


**HASIL SURVEI
INDEKS PERSEPSI RB TAHUN 2021**
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pelaksanaan Survei Juli 2021



Keterangan:

1. Saya memahami 8 area perubahan Reformasi Birokrasi BPOM = 3,4
2. Saya mengetahui program kerja Reformasi Birokrasi BPOM dan unit kerja saya = 3,420
3. 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi BPOM telah dilaksanakan di unit kerja saya = 3,402
4. Reformasi Birokrasi berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja saya = 3,483
5. Seluruh pegawai di unit kerja saya terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM = 3,452
6. Saya berkomitmen mendukung Reformasi Birokrasi BPOM di unit kerja saya = 3,705
7. Saya akan mendukung dan menggerakkan perubahan di BPOM menuju yang lebih baik = 3,703



Keterangan:

Skor BPOM (3,509)
Total Responden 5821

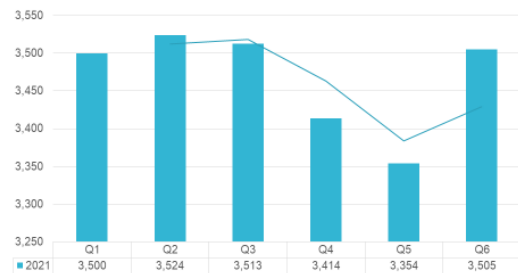


**HASIL SURVEI
INDEKS BUDAYA ORGANISASI TAHUN 2021**
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pelaksanaan Survei Juli 2021



Keterangan:

1. Mayoritas pegawai di unit kerja saya menunjukkan profesionalisme, obyektif, tekun, dan komitmen tinggi dalam pekerjaan = 3,5
2. Mayoritas pegawai di unit kerja saya bekerja sesuai dengan nilai-nilai luhur sesuai keyakinan masing-masing = 3,524
3. Mayoritas pegawai di unit kerja saya dapat dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan sesuai target kualitas dan waktu = 3,513
4. Mayoritas pegawai di unit kerja saya lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan berkolaborasi dengan pegawai dari unit organisasi atau instansi lain = 3,414
5. Mayoritas pegawai di unit kerja saya menghasilkan pembaharuan dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan dalam setahun terakhir = 3,354
6. Mayoritas pegawai di unit kerja saya menunjukkan kepekaan dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada pegawai internal dan stakeholders eksternal = 3,505



Keterangan:

Skor BPOM (3,468)
Total Responden 5821

Gambar 73. Hasil Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi dan Indeks Budaya Organisasi BPOM tahun 2021

2. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan tahun 2021

Pelatihan ini memiliki fokus pelatihan untuk meningkatkan pelayanan dengan menyiapkan diri melakukan continuous improvement dan inovasi baru. Improvement dan inovasi baru tersebut guna mewujudkan pelayanan prima pada unit kerja di lingkungan BPOM. Materi pelatihan meliputi pentingnya training pelayanan publik, grooming yang harus dimiliki petugas pelayanan, memahami karakter pelanggan dengan menggunakan metode disc, cara menghadapi komplain, *service innovation*, dan *develop strategy*. Pelayanan Publik Tingkat



Lanjutan tahun 2021 diselenggarakan dalam 3 batch dari tanggal 28 Juli sampai 9 September 2021 dan diikuti oleh 97 peserta.

3. Optimalisasi Sarana Komunikasi Digital

Knowledge Management System BPOM (SIMPHONI) dan <https://siasn.pom.go.id> digunakan dalam sosialisasi dan penyampaian informasi Reformasi Birokrasi serta nilai budaya organisasi BPOM. Tahun 2021 terdapat 1679 data/informasi/pengetahuan yang telah *publish* dan dikelola dalam *Knowledge Management* BPOM.

4. Sosialisasi RB dan Pembangunan Zona Integritas ditambah dengan materi Sosialisasi Core Values ASN: BerAKHLAK sebanyak 2 kali dengan mengundang narasumber dari Kementerian PAN RB.

5. Quick Wins BPOM tahun 2021

Quick Wins BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.07.20.314 Tahun 2021 tentang Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021, yang meliputi:

1. Jalur Obat Surat Keterangan Impor Super Cepat Coronavirus Disease (JOSS REDAM COVID-19)
2. Pendampingan Registrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Startup Obat Tradisional dan Kosmetika
3. Penguatan Regulasi Untuk Mendukung UMKM Obat Tradisional Dan Kosmetika Berdaya Saing
4. Fasilitasi Percepatan Bagi UMKM Obat Tradisional dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Produk Termasuk Eksportasi.
5. Implementasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) Bertahap.



6. Penguatan Implementasi Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Tradisional
7. Penyusunan blueprint dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Aplikasi e-Registration Pangan Olahan
8. Chatbot Konsultasi Standar Pangan (KUSAPA)
9. Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro Kecil Pangan Olahan
10. Elektronik Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (e-Monevrb)
11. Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Integrated Development and Training Information System (IDEAS)
13. Pengawasan Pengujian Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

G. TERWUJUDNYA ORGANISASI PPSDM POM YANG EFEKTIF

G.1. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM

Dalam rangka mendukung Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM serta membangun komitmen dalam membangun Zona Integritas, maka dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

G.1.1. Penandatanganan Pakta Integritas

Acara penandatanganan Pakta Integritas dilakukan bersama sama oleh seluruh pegawai PPSDM POM pada tanggal 1 Maret 2021 di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor PPSDM POM yang berlokasi di Gedung Gudang Listrik Jl. Salemba Raya No.19, Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap individu pegawai PPSDM POM untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; tidak menerima gratifikasi; bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; menghindari



pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas; serta menyampaikan informasi penyimpangan integritas.



Gambar 74. Penandatanganan Pakta Integritas Semua Tim PPSDM tahun 2021

G.1.2. Penggalangan Komitmen ZI Menuju WBK / WBBM

Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, RT.07, RW.01, Gambir, Jakarta, 10110 telah dilaksanakan suatu acara dalam rangka penggalangan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM). Acara tersebut dihadiri oleh mitra kerja PPSDM POM, antara lain dari instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan swasta, dengan jumlah peserta sebanyak 101 (seratus satu) orang baik secara offline sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang dan online sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Tujuan kegiatan pada hari ini yaitu untuk:

- Melaksanakan penggalangan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) PPSDM POM. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama PPSDM POM dengan mitra kerja. Penggalangan komitmen ini dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan wawasan dan perolehan kiat-kiat terkait Pembangunan Zona Integritas serta Penguatan Pelayanan Publik, sehingga pegawai PPSDM POM dapat menyiapkan dan mengimplementasikan dengan baik dalam rangka menuju WBK / WBBM. Kegiatan ini mengundang narasumber dari Inspektorat II Badan POM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, dan Motivator Sinergi Consulting.







Gambar 75. Kegiatan Penggalangan Komitmen, Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021



G.2. Nilai AKIP PPSDM POM

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP), dan pencapaian kinerja organisasi. Komponen yang dievaluasi adalah: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja.

Pada tahun 2021 nilai SAKIP PPSDM POM mencapai 75,09 terhadap target 83 atau tercapai 90,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Nilai SAKIP PPSDM TA 2020 tahun 2021

NO	Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,06
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15	11,18
4	Evaluasi Internal	10	7,27
5	Capaian Kinerja	20	12,83
6	Nilai hasil evaluasi	100	75,09
Tingkat akuntabilitas kinerja			BB

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target nilai AKIP PPSDM POM TA 2020 di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan belum dilakukan dengan mapping/pemetaan terhadap sasaran strategis dan indikator.



- b. Review renstra secara berkala belum dilakukan dan belum didokumentasikan dengan baik.
- c. Menetapkan target kinerja belum semuanya berdasarkan basis data yang memadai.
- d. Monitoring pencapaian Rencana aksi atas kinerja (RAPK) secara berkala termasuk analisis keberhasilan/kegagalan serta rencana dan evaluasi tindak lanjut belum dilakukan secara tepat waktu.
- e. Belum semuanya menyusun cascading indikator kinerja sampai level individu yang selaras dengan indikator unit kerja.
- f. Memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- g. Belum memanfaatkan TI untuk pengukuran kinerja

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan rekomendasi Inspektorat pada hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Melengkapi dasar penetapan target kinerja dengan basis data yang memadai dan argumen serta perhitungan yang logis.
- b. Rencana aksi agar dilengkapi dengan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja agar dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.
- c. Monitoring capaian kinerja koordinator, sub koordinator atau ketua tim, agar disertai kesimpulan, hambatan, rekomendasi dan tindak lanjutnya
- d. Menyempurnakan pelaksanaan evaluasi internal untuk perbaikan pelaksanaan program /kegiatan dimasa yang akan datang antara lain melalui :



- Melakukan evaluasi kegiatan dengan menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan kegiatan.
- Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dengan perencanaan kinerja.
- Melengkapi hasil evaluasi internal mengenai hambatan, kesimpulan dan rencana aksi tindak lanjutnya serta ditambahkan informasi terkait dasar penetapan target per triwulan.
- Menyampaikan hasil evaluasi internal serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

H. TERSEDINYA SDM PPSDM POM YANG BERKINERJA OPTIMAL

H.1. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM

Indeks Profesionalitas ASN adalah nilai hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dari para ASN. Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat profesionalisme seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala minimal sekali setiap tahun. Pengukuran indeks profesionalitas ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ASN telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Hasil pengukuran indeks ini dapat memberikan manfaat dari berbagai sudut pandang. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai rumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi yang dapat dilihat dari capaian kerjanya. Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN yang dapat dilihat dari 4 dimensi yang telah disebutkan sebelumnya. Pada tahun 2021, hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tercapai 81,89 dari target 77. Dengan demikian indikator ini sudah tercapai 106,35% dari target yang ditetapkan di tahun 2021.



I. TERBANGUNNYA SISTEM OPERASIONAL TERMASUK TIK PPSDM POM TERINTEGRASI DAN ADAPTIF

I.1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang Optimal

Pada tahun 2021, realisasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi PPSDM POM yang optimal sebesar 1,00. Dengan demikian capaian tahun 2021 untuk Indikator ini sebesar 50% dengan target sebesar 2,00. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh PUSDATIN BPOM beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Data dan informasi mutakhir tentang PPSDM POM yang masuk dashboard BOC setiap bulan tidak lancar (nilai 1)
- b. Pemanfaatan sistem informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh ASN BPOM yaitu email corporate nilai 2 serta dashboard BOC nya nilainya 0

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks pengelolaan data dan informasi adalah:

- a. Ditetapkan tim untuk monitoring pemanfaatan data dan informasi mutakhir serta untuk pemanfaatan sistem informasi, tentunya diharapkan oleh yang mengerti TI.
- b. Perlu kartu kontrol masing -masing ASN agar memanfaatkan email corporate.dan kontrol yang menyampaikan berita di dashboard BOC.

J. TERKELOLANYA KEUANGAN PPSDM POM SECARA AKUNTABEL

J.1. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM

Nilai kinerja anggaran diperoleh melalui rumus perhitungan berikut: Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) PPSDM POM untuk tahun anggaran 2021 adalah 88,68 dan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:



Tabel 27. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) PPSDM tahun 2021

Komponen	%
Penyerapan Anggaran.	99,25
Konsistensi RPD Awal.	99,31
CRO.	100
Efisiensi.	4,45
Nilai Efisiensi.	61,12

Selain Nilai EKA, komponen lain dalam perhitungan nilai kinerja anggaran adalah nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Untuk tahun anggaran 2021, PPSDM POM memperoleh nilai IKPA sebesar 94,24 yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

Tabel 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPSDM tahun 2021

Komponen	%
Dispensasi SPM.	100
Uang Persediaan.	96
Data Kontrak.	90
Kesalahan SPM.	80
Retur.	99,66
Hal. 3 DIPA.	81,80
Revisi DIPA.	100
Kemajuan Tagihan	92,31
Rekon LPJ.	100
Realisasi.	90,29
Renkas.	0
Pagu Minus.	100



Komponen	%
Capaian Output.	100

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPSDM POM di tahun 2021 tercapai 90,90 dari target yang ditetapkan yaitu 94, atau tercapai 96,70%. Jika dibandingkan dengan NKA PPSDM POM pada tahun 2020 sebesar 86,07 atau tercapai 91,60% maka terjadi kenaikan sebesar 5,10%.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas belanja (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah.
- Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ).
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi

J.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM

Realisasi indikator Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM tahun 2021 adalah 100% terhadap target tahunan 92% sehingga diperoleh persentase capaian 108,7%.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan tingkat efisiensi penggunaan anggaran di PPSDM POM adalah sebagai berikut:

- Rapat khusus tim keuangan, pengadaan dengan Kapus PPSDM, PPK dan PPSPM
- Pada awal tahun anggaran juga telah dilakukan rapat pembahasan bersama kepala PPSDM POM, Penanggung Jawab (PJ) program beserta seluruh staf tentang perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyampaikan POA masing-masing bidang dan bagian



- c. Monev laporan keuangan, minimal secara triwulan, hal ini telah dilakukan baik untuk tingkat PPSDM POM dan tingkat SESTAMA

K. SURVEI INDEKS KEPUASAN PELANGGAN DAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Dalam rangka melakukan evaluasi dan peningkatan mutu terhadap kualitas pelayanan kepada pegawai, PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM melakukan survei kepuasan pelayanan kepada pelanggan atau pegawai di lingkungan BPOM tahun 2021.

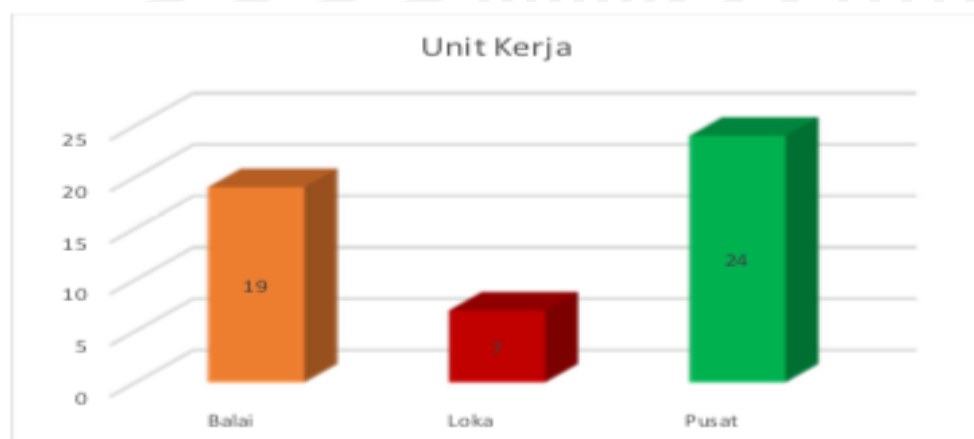
Survei ini dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 s.d 02 Maret 2021. Hasil survei merupakan bahan masukan untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan membangun zona integritas yang dilakukan oleh PPSDM POM.

K.1. Profil Responden Survei

Survei terhadap kepuasan pelanggan PPSDM POM tahun 2021 dilakukan dengan jumlah responden 50 orang, dengan profil sebagai berikut:

1. Responden Survei Menurut Unit Kerja

- a. Responden dari Balai Besar / Balai POM (19) orang
- b. Responden dari Loka POM (7) orang
- c. Responden dari Unit Kerja Pusat (24) orang

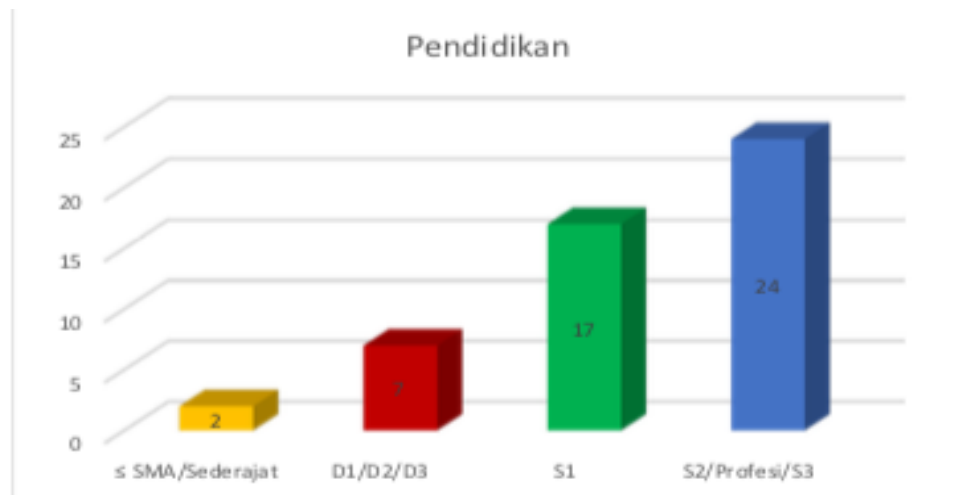


Gambar 76. Responden Survei menurut Unit Kerja Tahun 2021



2. Responden Survei Menurut Pendidikan

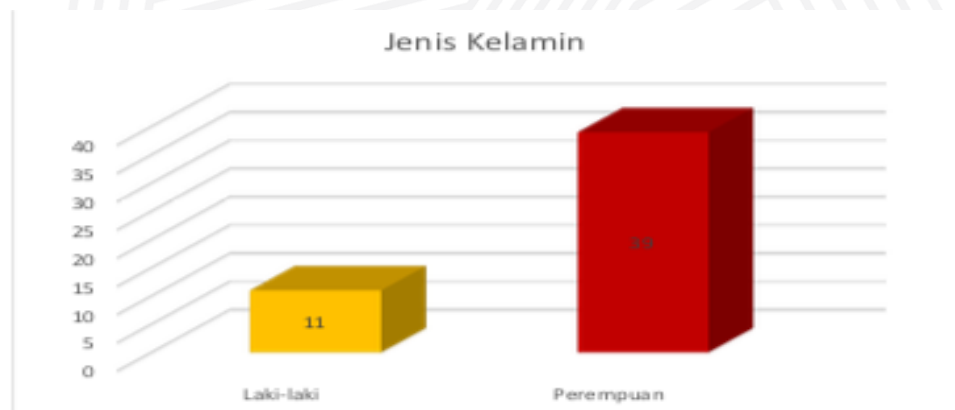
- a. Responden dengan pendidikan SMA / Sederajat (2) orang
- b. Responden dengan pendidikan Diploma III (7) orang
- c. Responden dengan pendidikan Strata 1 / Diploma IV (17) orang
- d. Responden dengan pendidikan Strata 2 / Strata 3 (24) orang



Gambar 77. Responden Survei Menurut Pendidikan tahun 2021

3. Responden survei menurut Jenis Kelamin

- a. Responden dengan jenis kelamin laki-laki (11) orang
- b. Responden dengan jenis kelamin perempuan (39) orang



Gambar 78. Responden Survei Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



K.2. Hasil Survei Kepuasan Pelanggan

Dari survei yang dilaksanakan dapat disampaikan bahwa indeks kualitas pelayanan PPSDM POM tahun 2021 secara keseluruhan adalah 3,59 (dari skala 4,00), dengan 3 jenis layanan yang telah dinilai responden. Untuk nilai indeks kepuasan pelanggan per item maka dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 29. Survei Kepuasan Pelanggan PPSDM tahun 2021

Aspek Penilaian	Indeks Kualitas Pelayanan
Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan?	3.57
Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur / alur pelayanan?	3.61
Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	3.57
Apakah menurut penilaian Saudara, jangka waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	3.56
Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?	3.56
Bagaimana penilaian Saudara mengenai kejelasan informasi tentang biaya pelayanan?	3.64
Bagaimana penilaian Saudara mengenai kompetensi petugas dalam pelayanan?	3.67
Bagaimana penilaian Saudara	3.59



Aspek Penilaian	Indeks Kualitas Pelayanan
mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?	
Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?	3.49

K.3. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi

Dari survei yang dilaksanakan, dapat disampaikan bahwa indeks persepsi anti korupsi PPSDM POM tahun 2021 secara keseluruhan adalah 3,70 (dari skala 4). Untuk nilai indeks persepsi PPSDM POM per item dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 30. Hasil Survei Anti Korupsi PPSDM Tahun 2021

Aspek Penilaian	Indeks Anti Korupsi
Petugas pada unit pelayanan ini berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya	3.67
Petugas memberikan pelayanan tanpa diskriminasi	3.67
Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan	3.69



Aspek Penilaian	Indeks Anti Korupsi
Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	3.73
Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)	3.73
Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro	3.72

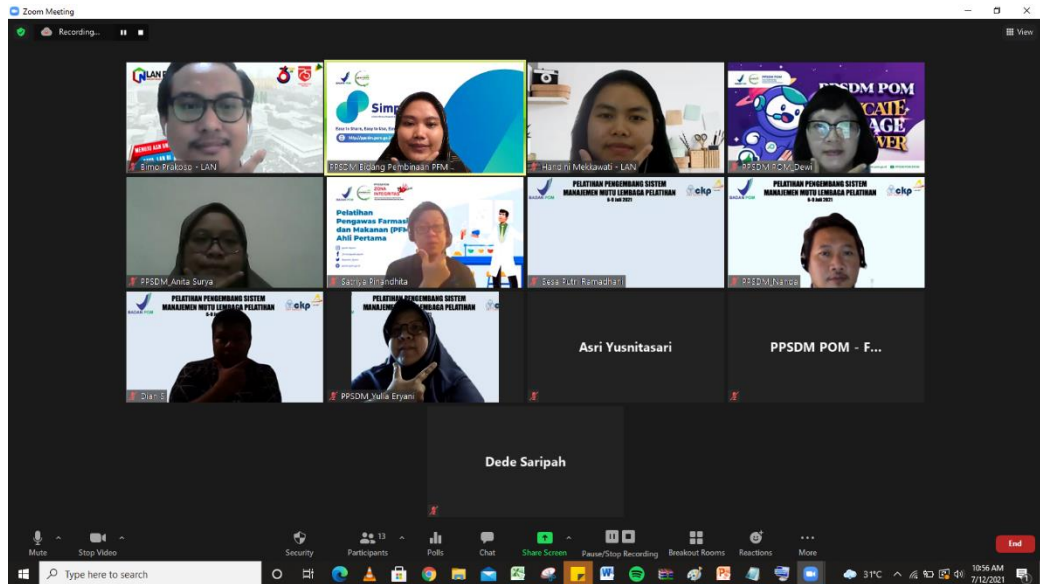
L. AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. Pemberian Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintahan mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah.

PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM, sebagai unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan terus berbenah mempersiapkan diri menjadi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan akreditasi sebagai berikut:



1. Sosialisasi Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang mencakup pembahasan atau refreshment terkait Prosedur dan mekanisme dan pembiayaan akreditasi lembaga diklat dan program pelatihan.



Gambar 79. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan

2. Studi tiru akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Program Pelatihan ke Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.



Gambar 80. Kegiatan Study Tiru Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan ke BPSDM Jabar



M. SISTEM MANAJEMEN MUTU (QMS)

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menerapkan QMS ISO 9001:2015. Sistem Manajemen Mutu membantu memelihara dan meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi nilai tambah terhadap pelayanan berupa kepercayaan stakeholder. Dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia POM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Audit Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 oleh TUV Rheinland yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. Hasil Audit Surveillance saat itu adalah:
 - Tim audit tidak menerbitkan ketidaksesuaian baik Mayor maupun minor dan observasi. Organisasi direkomendasikan untuk mendapatkan ISO 9001:2015.
2. Pelaksanaan Audit Internal yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Auditor dari Pusat Data dan Informasi. Hasil Audit Internal tersebut tidak terdapat temuan Mayor maupun minor, adapun saran perbaikan, yaitu:
 - Pada RTM yang dilakukan tanggal 25 Mei 2021 dijelaskan bahwa belum dilakukan reviu SOP Mikro setelah adanya perubahan SOTK baru di PPSDM. Pada SOP POM-10.01/CFM.01/SOP.03/ IK.82.01 Tentang Penyelenggaraan pelatihan, terdapat bisnis proses yang melibatkan unit di luar PPSDM yaitu pihak ketiga. Disarankan untuk segera dilakukan reviu SOP yang menyesuaikan perubahan SOTK baru di PPSDM POM dan adanya perubahan pejabat struktural menjadi fungsional serta penomoran pada SOP Mikro dan memperhatikan keterlibatan pihak eksternal PPSDM POM pada SOP Mikro.
 - Dalam pelaksanaan uji kompetensi sudah dilakukan sistem elektronik dan telah dilakukan pengiriman feedback kepada unit teknis/balai. Namun hasil uji kompetensi tersebut belum dimanfaatkan oleh unit teknis dalam penyusunan gap kompetensi. Untuk itu disarankan agar dilakukan sosialisasi kepada unit teknis/balai secara langsung bukan hanya dalam bentuk surat sehingga dapat dimanfaatkan oleh unit teknis terkait.



- SOP POM SOP POM- 10.01/CFM.01/SOP.03/ IK.82.01 tentang Penyelenggaraan pelatihan outputnya mendukung capaian kinerja pada SK.3 IKK3.1 dengan target pada tahun 2021 adalah sebesar 45%, setelah dilihat ke dalam aplikasi SIASN pada capaian JP peningkatan kompetensi pegawai, hasil capaian hingga awal juni 2021 sudah mencapai 56,5% sehingga perlu dilakukan review kembali terhadap target kinerja tersebut atau review terhadap DO targetnya.
- Untuk aplikasi - aplikasi yang digunakan oleh PPSDM, aplikasi tersebut belum semua melewati proses pengujian sistem. Disarankan untuk melakukan pengujian sistem sebelum sistem digunakan.
- Juknis dan pedoman dalam melakukan pembinaan PFM telah dibuat namun belum disahkan, disarankan untuk segera disahkan agar menjadi acuan resmi dalam melaksanakan kegiatannya.

3. Rapat Tinjauan Manajemen yang diikuti oleh semua pegawai. Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2021, yaitu ketika sebelum dilaksanakannya audit internal yang diadakan pada tanggal 25 Mei 2021 dan ketika setelah dilaksanakan Audit internal yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021.

4. Sudah dilakukan Pelatihan pemahaman dan audit internal QMS ISO 9001:2015 untuk calon auditor, sebanyak 2 orang, yaitu Ahmad Kurniawan dan Belda Evina pada tanggal 23-25 Maret 2021.



Gambar 81. Sertifikat ISO 9001:2015 PPSDM POM



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

A.1. KESIMPULAN UMUM

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan selama tahun 2021 telah melakukan penilaian dan pengembangan kompetensi sesuai dengan amanat yang menjadi tanggung jawabnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dari keseluruhan kegiatan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai ASN BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi secara akumulatif adalah 4.934 (79.65%) dari 4.573 pegawai ASN Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, realisasi indikator “Persentase SDM Badan POM yang Memenuhi Standar Kompetensi” adalah 103.44 % berdasarkan persentase 79.65% pegawai ASN yang memenuhi Standar Kompetensi dibandingkan target 77% yang ditetapkan.
2. Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar dengan capaian 716 orang atau 109,31 % dari target tahun 2021 sebesar 655 orang.
3. Telah dilakukan Review SKKNI Keamanan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 618 tahun 2016 dan mulai menyusun SKKNI terkait Bidang Pengawasan Mutu Obat dan Produk Biologi serta terkait bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
4. Telah dilakukan sosialisasi untuk menjaring minat pengawas farmasi dan makanan Inklusif dari K/L maupun Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2021 di Kota Pekanbaru dan tanggal 27 Oktober 2021 di Jakarta.
5. Telah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan PFM Tahun 2021 berupa penilaian Angka Kredit, Penyusunan Petunjuk Teknis, pengembangan



- aplikasi penilaian Angka Kredit, Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis.
6. Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama District Food Inspector (DFI) Junior sebanyak 4 (empat) batch yang diikuti oleh 113 (seratus tiga belas) peserta untuk PKP Pertama dan DFI Junior diikuti sebanyak 117 (seratus tujuh belas) peserta.
 7. Telah disusun Naskah Soal Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ahli Pertama s.d Ahli Madya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan
 8. Telah dilakukan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Diklat dan Akreditasi Program Pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang mencakup pembahasan atau refreshment terkait Prosedur dan mekanisme dan pembiayaan akreditasi lembaga diklat dan program pelatihan dan studi tiru dengan BPSDM Jawa Barat sebagai langkah persiapan akreditasi lembaga diklat dan program pelatihan.
 9. Telah dikembangkan Jurnal terakreditasi “Eruditio Indonesia Journal of Food and Drug Safety”, yaitu Eruditio Vol. 1 No. 1 edisi Desember 2020 dan Eruditio Vol. 1 No. 2 edisi Juni 2021.
 10. Telah dilakukan pembentukan organisasi profesi pengawas Farmasi dan Makanan sesuai SK Ka badan POM no HK.02.02.1.2.03.21.146 tanggal 30 Maret 2021 dan berbadan hukum sesuai Akta Notaris no 06 tanggal 13 Maret 2020. Sudah dilakukan sosialisasi terkait organisasi profesi kepada seluruh PFM dan saat ini sudah ada +/- 1858 anggota yang telah mendaftar dan dilakukan verifikasi melalui aplikasi PFMI.
 11. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM tahun 2021 adalah 61 % dari target 45 % dengan capaian 135,56 % melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis bagi Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Non PFM.



12. Jumlah Kerja sama yang ditindaklanjuti di bidang pengembangan kompetensi tahun 2021 adalah 12 kerjasama, sesuai dengan target tahun 2021 yaitu 12 kerjasama (100%)
13. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian Indikator Kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan” sebesar 4,56, sehingga capaian untuk tahun 2021 sebesar 106,05 %, dengan kategori capaian kinerja “ BAIK”.
14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPSDM POM tahun 2021 mencapai nilai sebesar 75,09 dengan target 83, atau tercapai 90,47%.
15. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tahun 2021 tercapai 81,89 dengan target 77, atau tercapai 106,35% dari target yang ditetapkan.
16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM tahun 2021 adalah 1,00 dengan target 2,00, atau tercapai 50%. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan awareness pegawai PPSDM POM dalam pemanfaatan email corporate serta dashboard BOC sebagai komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi.
17. Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPSDM POM pada tahun 2021 adalah 90,90 dari target 94, atau tercapai sebesar 96,70%.
18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM pada tahun 2021 mencapai 100%, atau tercapai 108,70% dari target yang ditetapkan sebesar 92%.

A.2. KENDALA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Rencana Strategis Badan POM dan ketersediaan anggaran sesuai DIPA 2021. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan terkait pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masih banyak pegawai / unit melakukan pengembangan kompetensi tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.



Berdasarkan hasil evaluasi pengembangan kompetensi Badan POM Tahun 2021, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebesar 12%.

2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi di masa pandemi, terutama pelatihan yang memerlukan keterampilan seperti praktek lapangan dalam pemeriksaan sarana, sehingga metoda pelatihan blended, pembelajaran mandiri dengan menggunakan si pandai, klasikal zoom meeting dan praktek dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas, peserta sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai yang memerlukan pelatihan tersebut.
3. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan pelatihan secara luring di era pandemi meningkat, seperti halnya diperlukannya test covid dan ruang pertemuan yang lebih luas. Terbatasnya anggaran pengembangan kompetensi di PPSDM POM, sehingga untuk dapat memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 JP untuk seluruh SDM Badan POM. dilaksanakan pembelajaran mandiri tidak terjadwal menggunakan aplikasi IDEAS.
4. Belum semua pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM dapat dilaksanakan secara mandiri karena keterbatasan narasumber/widyaiswara yang dimiliki, terutama pelatihan terkait dengan mansoskul dan teknis tingkat kesulitan II dan III.
5. Belum ditetapkannya Peraturan Kepala Badan POM tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 2 Tahun 2020, sehingga masih menggunakan Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.04.04.243.1056 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya.
6. Belum memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan penilaian maupun pengembangan kompetensi yang memadai, sebagai persyaratan utama dalam akreditasi lembaga diklat. Saat ini PPSDM POM masih dalam status sewa gedung milik swasta. PPSDM POM belum terakreditasi sebagai Lembaga Penyelenggara diklat karena terbatasnya kuota pengajuan akreditasi oleh Lembaga Administrasi



- negara (LAN), selain itu Program Pelatihan Teknis bidang pengawasan obat dan makanan yang mendapat akreditasi C akan berakhir masa akreditasinya pada tahun 2022.
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan penilaian maupun pengembangan kompetensi.
 8. Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan perubahan metode kegiatan yang dilakukan antara lain dari luring menjadi daring dan untuk kompetensi teknis hal ini ikut mempengaruhi penyerapan ilmu oleh peserta, untuk mengurangi efek ini dibantu dengan video e-learning.
 9. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi ASN BPOM yaitu email corporate.
 10. Belum optimalnya pemanfaatan waktu penyusunan soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena kendala penginputan kisi-kisi dan skema soal ke dalam aplikasi sewaktu kegiatan penyusunan soal SKB
 11. Belum optimalnya pemanfaatan Eruditio oleh PFM sebagai salah satu wadah pengembangan profesi yaitu publikasi karya tulis ilmiah terkait pengawasan obat dan makanan, selain itu Eruditio juga belum mengajukan akreditasi SINTA karena belum menerbitkan 4 (empat) terbitan jurnal.
 12. Belum optimalnya pengembangan organisasi profesi PFMI karena keterbatasan waktu pengurus organisasi yang sudah cukup padat dengan pekerjaan wajib sehari - harinya, selain itu juga karena aplikasi PFMI yang mengalami kendala beberapa kali sehingga menghambat penghimpunan anggota.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya, diperlukan upaya dan langkah-langkah perbaikan yaitu dengan melakukan perencanaan dan monitoring evaluasi yang rinci sampai output dan tanggal kegiatan serta peningkatan intensitas komunikasi antara pihak-pihak terkait, baik di lingkungan internal organisasi maupun entitas terkait pelaksanaan tindak lanjut.



Adapun rencana tindak lanjut yang kami usulkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM PPSDM sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang diperlukan oleh SDM Badan POM
2. Optimalisasi sosialisasi kebijakan terkait pengembangan kompetensi secara luring dan daring, serta menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan yang diberikan oleh peserta.
3. Penetapan pedoman pengembangan kompetensi di lingkungan Badan POM di awal tahun, sehingga diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi di Badan POM lebih baik. Selain itu untuk monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit akan difasilitasi dengan aplikasi
4. Menginisiasi dilakukannya kesepakatan dengan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka pembinaan pengembangan lembaga Diklat di PPSDM POM, baik dari segi sarana dan prasarana maupun segi pemenuhan SDM yang dibutuhkan. Perlunya membuat pengajuan akreditasi lembaga diklat dan reakreditasi program pelatihan teknis di awal tahun 2022, dan mengundang LAN untuk melakukan sosialisasi dan desk persiapan akreditasi dan reakreditasi.
5. Melakukan pemantauan proses penetapan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 2 Tahun 2020, dan terus melakukan pembinaan kepada Pejabat Fungsional PFM baik yang ada di Badan POM maupun yang ada di K/L atau Pemerintah Daerah (PFM Inklusif)
6. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga Diklat yang sudah terakreditasi atau yang telah menerapkan corporate university dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
7. Merencanakan percepatan pembangunan sarana Diklat ataupun pemanfaatan sarana Badan POM yang tidak digunakan untuk dialihfungsikan sebagai sarana Diklat.



8. Mengoptimalkan sarana informasi yang sudah ada seperti subsite ppsdm.pom.go.id, aplikasi siasn terutama menu pengembangan kompetensi, maupun Learning Management System untuk optimalisasi penyelenggaraan pelatihan maupun penilaian kompetensi menggunakan teknologi informasi. Dalam pengembangannya, PPSDM POM berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Biro Umum, dan Biro SDM
9. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi email corporate dengan mengajak setiap pegawai PPSDM POM aktif dalam mengakses masing-masing email corporate miliknya. Selain itu melakukan pemantauan akses email corporate setiap pegawai dengan minimal 1 (satu) kali aksis setiap bulannya.
10. Perlu memastikan bahwa kisi-kisi dan skema soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terinput ke dalam aplikasi sebelum kegiatan penyusunan Soal SKB dilaksanakan
11. Perlunya mengoptimalkan penggunaan Eruditio untuk memudah publikasi karya tulis ilmiah khususnya bagi PFM dengan melakukan sosialisasi Eruditio ke seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis, dan memfasilitasi publikasi output kegiatan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dasar maupun lanjutan yang dilakukan PPSDM POM.
12. Perlu mengingatkan pengurus untuk terus melaporkan perkembangan organisasi profesi kepada kepala pusat PPSDM selaku instansi pembina organisasi, dan perlu dilakukan pengembangan aplikasi PFMI agar mempermudah organisasi dalam mengelola keanggotaan.



